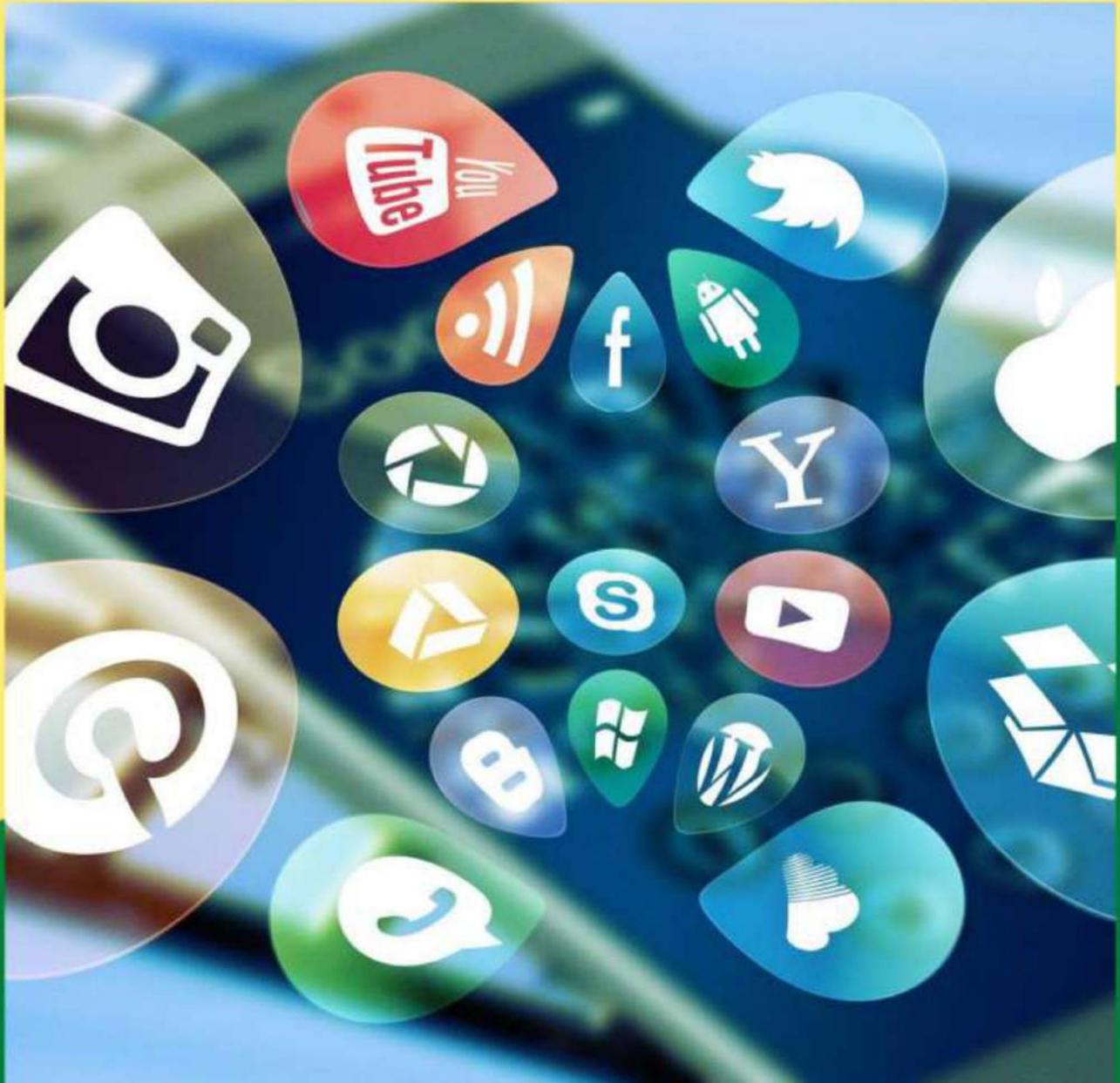




BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021

**bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

orientasi Pelayanan • kuntabel • ampelan
karmas • ayai • dapti • akaborati



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

PPID Bappeda Provinsi Lampung
Tahun 2021



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban PPID Pembantu Bappeda kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Tahun 2021.

Bappeda Provinsi Lampung sebagai badan publik melalui PPID telah menyediakan akses informasi tentang program dan kinerja perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung. Hal tersebut sesuai dengan amanat keterbukaan informasi sebagaimana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut Badan Publik untuk membuka akses sebesar-besarnya dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Laporan ini menggambarkan pengelolaan dan pelayanan informasi di Bappeda melalui *website* www.bappeda.lampungprov.go.id dan akun-akun media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *Youtube*. Hal ini merupakan sarana penyediaan informasi PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung selain penyediaan informasi melalui akses layanan langsung pada desk/meja layanan.

PPID Bappeda Provinsi Lampung akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dalam rangka mendorong implementasi keterbukaan informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan untuk masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 30 Desember 2021

Ketala Bappeda Provinsi Lampung,



Ir. Muljadi Irsan M.T.

Pejabat Utama Madya

No. 19670517 199303 1 011

Daftar Isi

- 5. Gambaran Umum
Kebijakan Pelayanan
Informasi Publik di
Bappeda Provinsi
Lampung

- 9. Gambaran Umum
Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik di
Bappeda Provinsi
Lampung Tahun 2021

- 15. Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik PPID
Bappeda Provinsi
Lampung Tahun 2021

- 25. Capaian PPID Bappeda
Provinsi Lampung Tahun
2016-2020

- 27. Rekomendasi dan
Rencana Tindak Lanjut

Lampiran...

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

1. Komitmen Bappeda Provinsi Lampung dalam Keterbukaan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan (ketentuan pasal 17). Berdasarkan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung membuka akses seluas-luasnya kepada publik untuk

memperoleh akses informasi publik yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sebagai pelaksana urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Bappeda berkomitmen melaksanakan keterbukaan Informasi Publik dengan mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik secara konsisten sesuai amanat undang-undang yang berlaku. Transparansi keterbukaan informasi publik yang dilakukan dimaksudkan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan serta program-program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

2. Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk upaya kepatuhan terhadap implementasi pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Bappeda Provinsi Lampung telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 800/061/VI.01/UPTD/2021 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Bappeda Provinsi Lampung dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Informasi Publik yang dimaksud mencakup aspek-aspek:

- a. Kelembagaan,
- b. Dukungan anggaran,
- c. Kinerja pelayanan permohonan informasi, dan
- d. Penyampaian informasi publik.

Berbagai inovasi layanan Informasi Publik berbasis teknologi informasi juga terus dikembangkan untuk mencapai kualitas pelayanan Informasi Publik yang berkualitas kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan *Website* Bappeda Provinsi Lampung <https://www.bappeda.lampungprov.go.id/>.

3. Kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Bappeda sebagai salah satu badan publik telah membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi pada desk layanan informasi Bappeda Provinsi Lampung. PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung bertanggung jawab melakukan :

- Penyediaan,
- Penyimpanan,
- Pendokumentasian,
- Pelayanan, dan
- Pengamanan informasi publik.



Gambar 1. Struktur PPID di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung

Dengan dibentuknya PPID lingkup Bappeda Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Bappeda dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu Bappeda yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja/bidang pada Bappeda Provinsi Lampung yang termuat dalam SK Kepala Bappeda 800/06/VI.01/UPTD/2021. Secara struktural, Kepala Bappeda Provinsi Lampung memegang kendali sebagai Atasan PPID dan Sekretaris Bappeda sebagai Ketua PPID. Selengkapnya, struktur organisai PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 1 di atas.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Bappeda sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

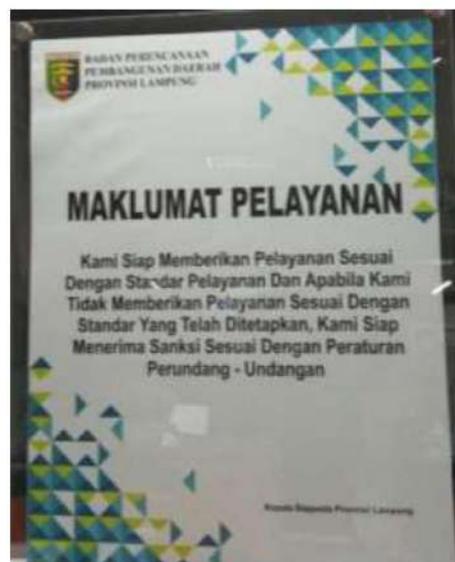
Dengan dibentuknya PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Bappeda dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja/bidang di Bappeda Provinsi Lampung. PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) No.VI.01.1.13 tentang Pelayanan Permohonan Informasi Publik Bappeda Provinsi Lampung, No.VI.01.1.14 tentang Penanganan Keberatan Informasi publik, No.VI.01.1.15 tentang Fasilitasi Sengketa Informasi Publik, No.VI.01.1.16 tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik Bappeda Provinsi Lampung, dan No.VI.01.1.12 tentang Uji Konsekuensi Informasi publik. Selain SOP, PPID Pembantu juga didukung oleh Daftar Informasi Publik (DIP) baik informasi publik yang diumumkan secara serta merta, berkala, maupun dikecualikan.

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, Bappeda Provinsi Lampung senantiasa melengkapi sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau Pemohon Informasi, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik berjalan dengan semestinya. Sarana dan prasarana pendukung

pelayanan keterbukaan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung antara lain sebagai berikut:

a. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan Informasi publik yaitu pernyataan komitmen dari segenap elemen/unsur PPID pembantu Bappeda Provinsi Lampung untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dengan memberikan pelayanan Informasi Publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia sesuai dengan standar layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.



Gambar 2. Maklumat Pelayanan

b. Standar Pelayanan Informasi Publik

Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan layanan Informasi Publik di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung maka telah ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan Informasi Publik berdasarkan pada ketentuan dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

c. Daftar Informasi Publik (DIP)

Dalam rangka memudahkan proses layanan permintaan/akses dokumen Informasi Publik, PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung telah menyusun Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, yang terdiri dari kategori informasi berkala, informasi

serta-merta, dan informasi yang harus tersedia setiap saat (tidak termasuk informasi yang dikecualikan) yang dapat diakses pada website Bappeda Provinsi Lampung pada menu PPID/Daftar Informasi Publik.

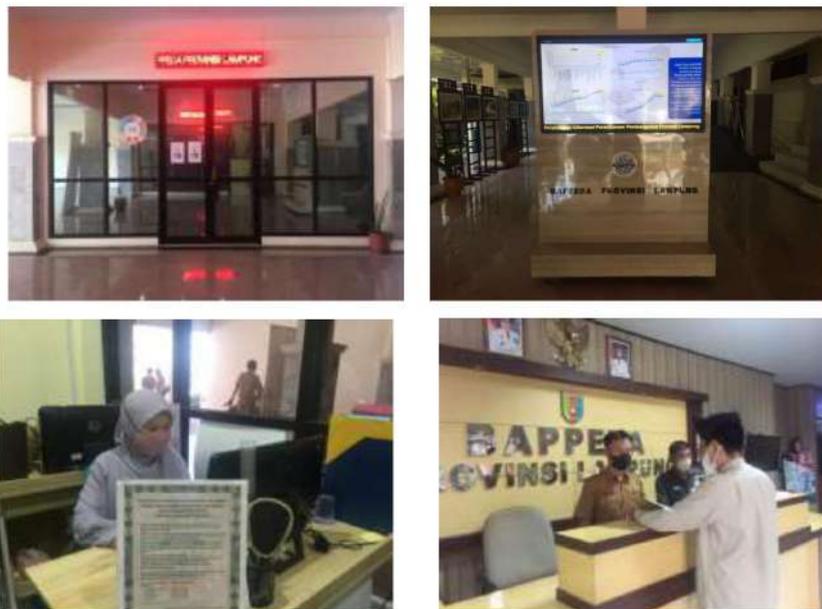
d. Regulasi/Peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik

PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung telah mendokumentasikan dan memuat dokumen regulasi/peraturan yang lengkap terkait keterbukaan Informasi Publik.

e. Ruang Layanan Informasi Publik (Desk Layanan Informasi Publik)

Bappeda Provinsi Lampung telah menyediakan ruangan khusus untuk Pelayanan Informasi Publik yaitu Ruang Pusat Layanan Informasi Publik yang dapat dilihat pada Gambar 3.

Ruang tersebut ditempatkan di muka depan gedung Bappeda Provinsi Lampung yang terintegrasi dengan ruang klinik perencanaan dan berdekatan dengan UPTB Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Pusdatin Bangda), Perencanaan dan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung sehingga dapat dengan mudah di akses publik. Ruang Pusat Layanan Informasi Publik Bappeda Provinsi Lampung selain berfungsi sebagai meja/desk layanan permohonan Informasi Publik satu pintu/terpusat (*front office*) juga dijadikan sarana sosialisasi dan konsultasi informasi terkait perencanaan pembangunan. Di tahun 2021 ini, Bappeda juga menyediakan Dashboard Display Data Digital untuk mempermudah tamu/pengunjung dalam mengakses informasi terkait pembangunan sektoral di Provinsi Lampung.



Gambar 3. Ruang Layanan PPID

Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat langsung mendatangi meja layanan informasi yang tersedia (desk layanan informasi publik) dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi publik dan surat pernyataan penggunaan informasi publik.

f. Ruang Layanan Dokumen Informasi Publik (*Back Office*)

Pemohon informasi akan difasilitasi oleh petugas *back office* PPID Pembantu yang ada disetiap unit kerja/bidang untuk memperoleh dokumen/informasi yang dibutuhkan baik berbentuk data elektronik/*soft copy* maupun non elektronik/*hardcopy*.

g. Papan Pengumuman (*Media Informasi*)

Sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara, dan alur permintaan Informasi Publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan progress kegiatan Pelayanan Publik yang dijalankan Bappeda Provinsi Lampung. Selain itu, Bappeda juga menyediakan monitor/display informasi yang dapat digunakan oleh publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara langsung di Kantor Bappeda.

h. Hot Spot Area

PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung juga telah menyediakan *hot spot area* untuk memfasilitasi tamu yang akan mengakses berbagai informasi melalui internet.

i. Portal PPID Pembantu

Portal Menu PPID pembantu terhubung dengan fitur PPID dalam *Website* Resmi Bappeda Provinsi Lampung dan menjadi data base Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bisa dengan mudah diakses public di situs <https://bappeda.lampungprov.go.id/>. Panduan layanan permohonan informasi bagi Pemohon dapat dengan mudah diakses melalui *website* E-PPID tersebut.

j. Portal Bappeda Provinsi Lampung

Portal Data Bappeda Provinsi Lampung yang menyajikan data-data dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung. Portal Data ini menyediakan data yang akurat, terbuka, terpusat dan terintergrasi dan dapat dengan mudah diakses serta digunakan kembali yang terkoneksi dengan Portal Data Pemerintah Provinsi Lampung.

k. Sarana Penunjang Lainnya

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas dan fungsi Bappeda dapat secara langsung melalui:

1. Email Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung pelayananppid@gmail.com

2. *SMS/WhatsApp* ke *official number* Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung 08117245527
3. Telepon (0721) 485458
4. *Fax* (0721) 486396

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Bappeda sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Sebagai bentuk upaya kepatuhan terhadap implementasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut, maka Bappeda Provinsi Lampung menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Bappeda Provinsi Nomor: 800/06/VI.01/UPTD/2021 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Dengan dibentuknya PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Bappeda dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja/bidang pada Bappeda Provinsi Lampung. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi pada desk layanan informasi Bappeda Provinsi Lampung.

PPID Pembantu di Bappeda Provinsi Lampung dalam melayani permohonan informasi publik dibantu oleh masing-masing PPID di unit/bidang kerja yang ada di Bappeda seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung. Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung ditujukan kepada PPID dan akan dilayani sesuai prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID akan diterima oleh Koordinator/Atasan PPID dan akan diteruskan ke PPID Bidang/Unit di Bappeda.

Tugas dan fungsi PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung meliputi:

1. Membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan.
7. Merekrut Satu Tenaga Kontrak sebagai Jurnalis Keterbukaan Informasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 027/85/VI.01/Sek/2021.

3. Anggaran Pelayanan Informasi di Bappeda

Anggaran Operasional pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda melekat pada DPA Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 yang meliputi: anggaran yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik di Bappeda untuk pemeliharaan website Bappeda adalah Rp36.000.000,- pada Tahun Anggaran 2021. Anggaran tersebut termuat di DPA Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2021 dalam program kegiatan penyusunan profil lampung.

PELAKSANAAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

A. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

1. Alur Pelayanan Permohonan Informasi



Gambar 4. Alur Pelayanan Informasi Publik di Bappeda

- 1) Pemohon informasi datang ke Desk Layanan Informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi.
- 2) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
- 3) Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
- 4) Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, maka PPID dapat menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.

2. Operasional Pelayanan

Pelayanan informasi publik didukung *front office* dan *back office*:

- 1) *Front office* meliputi Desk Layanan Langsung dan Desk Layanan Via Media
- 2) *Back office* meliputi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

3. Operasional waktu pelayanan permohonan informasi:

- | | | |
|----|---------------|-----------------|
| 1) | Senin – Kamis | : 09.00 – 14.00 |
| | Istirahat | : 12.00 – 13.00 |
| 2) | Jumat | : 09.00 – 14.00 |
| | Istirahat | : 12.00 – 13.00 |

4. Komponen Pendukung Layanan Informasi

Dalam melaksanakan kegiatan layanan informasi ini secara efektif dan efisien, Unit PID menyediakan komponen pendukung sebagai berikut:

- 1) Sistem Informasi “Pengelolaan Informasi dan Dokumen”
- 2) Website <https://bappeda.lampungprov.go.id/>
- 3) *Official Account* media sosial
- 4) Sarana dan prasarana, meliputi:
 - i. Dashboard Display Data Digital

- ii. Meja pelayanan informasi
- iii. Daftar informasi publik
- iv. Seperangkat komputer yang terhubung internet
- v. Standar Operasional Prosedur
- vi. Sumber Daya Manusia

5. Bebas Biaya Pelayanan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bappeda Provinsi Lampung menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

B. Kategori Informasi Publik

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a) Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:

- 1) informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya.
- 2) struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural
- 3) laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

b) Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1) Nama program dan kegiatan
- 2) Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
- 3) Target dan/atau capaian program dan kegiatan
- 4) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan

- 5) Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 - 6) Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
 - 7) Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 - 8) Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
 - 9) Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum
- c) Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- 1) Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 2) Rencana dan laporan realisasi anggaran
 - 3) Neraca
 - 4) Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 - 5) Daftar aset dan investasi;
 - d) Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 - 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 - 3) Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak.
 - 4) Alasan penolakan permohonan Informasi Publik
 - e) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan.
 - 2) Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
 - f) Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
 - g) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
 - h) Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;

i) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

b) Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nomor
- 2) Ringkasan isi informasi
- 3) Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
- 4) Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
- 5) Waktu dan tempat pembuatan informasi
- 6) Bentuk informasi yang tersedia
- 7) Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

c) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1) Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
- 2) Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan
- 3) Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
- 4) Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
- 5) Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
- 6) Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;

d) Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

e) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:

- 1) Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
- 2) Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
- 3) Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
- 4) data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;

f) Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

g) Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

- h) Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- i) Data perbendaharaan atau inventaris;
- j) Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- k) Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- l) Informasi mengenai kegiatan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- m) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- n) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- o) Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- p) Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- q) Informasi tentang standar pengumuman informasi bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerjadengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- r) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

C. Kategori Informasi Publik Yang Dikecualikan

Berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda yang paling utama adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, Bappeda tidak memiliki informasi yang dikecualikan. Namun, jika terdapat informasi yang dirasa perlu dirahasiakan dalam suatu dokumen, PPID dapat melakukan uji konsekuensi terhadap informasi tersebut atau menghitamkan/mengaburkan bagian-bagian yang bersifat rahasia.

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

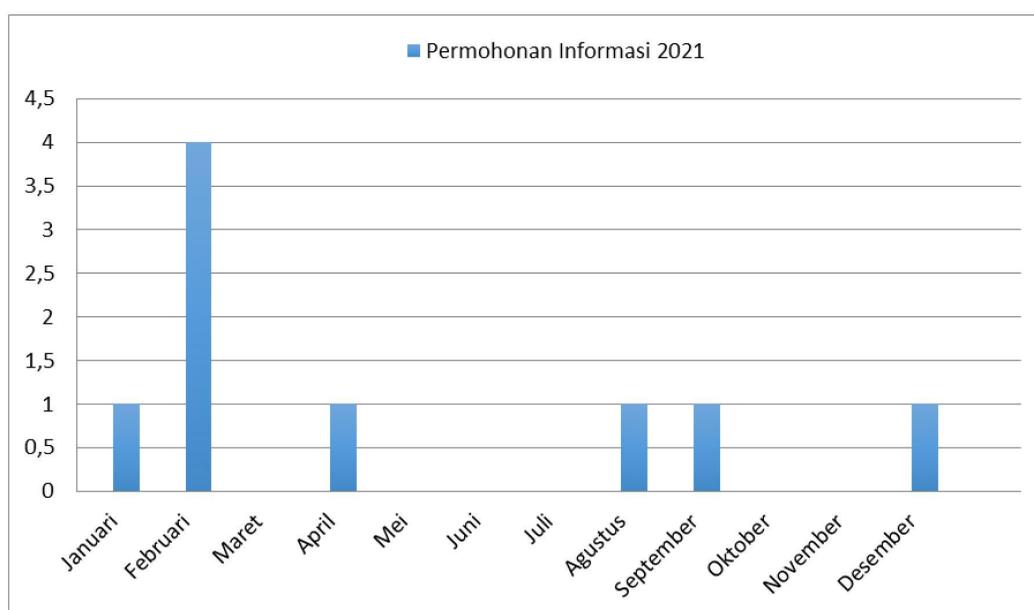
Selama tahun 2021, PPID di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung menerima 9 (Sembilan) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain: Mahasiswa dan OPD. Jumlah permohonan sebanyak 9 ini adalah data permohonan yang langsung ditangani oleh PPID Pembantu Bappeda, dimana 9 (Sembilan) permohonan dikabulkan sepenuhnya. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (Satu) permohonan adalah 1 (Satu) sampai dengan 10 (Sepuluh) hari kerja.

Pemohon Informasi juga dapat melihat Daftar Informasi Publik (DIP) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda sesuai ketentuan UU KIP yang dapat diakses di *website* Bappeda Provinsi Lampung secara lengkap. Rincian permohonan informasi di Bappeda Provinsi Lampung selama 2021 dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daftar Pemohon Informasi Publik di Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Nama Pemohon	Instansi	Informasi yang diminta	Tanggal	Status
1	Yuliza Pratiwi	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Falkutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Data SHP Batas Administrasi Kabupaten Pesawaran, Data SHP Penggunaan Lahan Kabupaten Pesawaran Tahun 2015-2020	14 Januari 2021	dipenuhi
2	Hernanda Airaputri	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera	Analisis Kebutuhan Air Pada Daerah Irigasi Way Semah Kabupaten Pesawaran	03 Februari 2021	dipenuhi
3	Afifah Fadia Rasman	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera	Perubahan Morfologi Wilayah Peri urban Akibat Pengaruh Keberadaan Kampus Institut Teknologi	15 Februari 2021	dipenuhi
4	Afi Fauziah	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera	Studi Perbandingan Metode OBIA dan Interpretasi Visual Untuk Mengidentifikasi Permukiman Kumuh Di Kecamatan Bumi Waras Menggunakan Data Penginderaan Jauh	23 Februari 2021	dipenuhi
5	Setia Puji Astuti	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi	Studi Perbandingan Metode Supervised (Maximum Likelihood) dan Metode Neural Network Untuk Mengidentifikasi Pemukiman Kumuh Di	24 Februari 2021	dipenuhi

		Sumatera	Kecamatan Bumi Waras Menggunakan Data Pengideraan Jauh		
6	Desi Ramadani	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera	Analisis Keseimbangan Air pada Daerah Irigasi Bekri, Kabupaten Lampung Tengah	22 April 2021	Dipenuhi
7	Apriani Susanti Egi Lystia Br. Ginting, S.PWK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	Melakukan pengumpulan kebutuhan data untuk pekerjaan Kajian dan Peta Potensi Wilayah Tata Guna Lahan (kebutuhan data terlampi), Berkoodinasi dengan instansi terkait aparat kewilayahan kecamatan dan desa	4 Agustus 2021	Dipenuhi
8	Lutfiyaniha Hadi Desvina	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan	Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi Bunut Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Air	3 September 2021	Dipenuhi
9	Uli Ranawati	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera	Integrasi Peta RT/RW dan RZWP-3-K Provinsi Lampung untuk Pembangunan Berkelanjutan	4 November 2021	dipenuhi



Gambar 5. Garfik permohonan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung per bulan selama tahun 2021

Dapat dilihat bahwa permohonan informasi yang masuk ke PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung selama Tahun 2021 sebanyak 9 (Sembilan) permohonan. Pada tahun 2021 permohonan informasi paling banyak terdapat di Triwulan I yaitu 1 permohonan di Bulan Januari, 4 permohonan di Bulan Februari.

E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan kegiatan layanan informasi ini secara efektif dan efisien, Unit PPID menyediakan Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik sebagai berikut:

a. Website



b. Media Sosial

Selain melalui *website*, Bappeda Provinsi Lampung juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial yang terdiri dari:

1. *Facebook* (BappedaLampung)
2. *Twitter* (@bappeda_lpg)
3. *Instagram* (@bappeda_lampung)
4. *YouTube* (Bappeda Provinsi Lampung)



c. Papan Informasi



Mengikuti perkembangan teknologi Papan informasi Bappeda Provinsi Lampung saat ini sudah beralih menjadi Dashboard Display Data Digital untuk mempermudah tamu/ pengunjung dalam mengakses informasi terkait pembangunan sektoral di Provinsi Lampung.

CAPAIAN PPID BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016-2020

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Bappeda Provinsi Lampung selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Penyediaan Sekeratariaat Layanan Informasi Publik;
3. Pengembangan konten/menu PPID pada *website* Bappeda;
4. Penyediaan Daftar Informasi Publik yang memuat informasi yang wajib tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (ketentuan UU KIP);
5. Implementasi Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung;
6. Peringkat Terbaik I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk kategori SKPD Provinsi Lampung Tahun 2016.
7. Peringkat Terbaik I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk kategori SKPD Provinsi Lampung Tahun 2017.
8. Peringkat Terbaik II Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk kategori SKPD Provinsi Lampung Tahun 2018.
9. Sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2019 Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung, dengan nilai 97,506.
10. Sebagai Juara III Lomba Media Sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung 2020



Gambar 5. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016



Gambar 7. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2018



Gambar 8. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019



Gambar 9. Penghargaan Juara III Lomba Media Sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung 2020



REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui PPID di tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bappeda akan terus melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi dan pendokumentasian di Tahun Anggaran 2022;
2. Melakukan *benchmark* atau studi banding ke PPID kementerian/lembaga lain untuk menjadi acuan peningkatan kualitas PPID;
3. Meningkatkan koordinasi dari setiap unit/bidang kerja di Bappeda.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 8001/061/Vl.01/UPFD/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menyebarluaskan Informasi terkait perencanaan dan capaian pembangunan di Provinsi Lampung kepada masyarakat umum;
- b. bahwa untuk menyebarluaskan informasi dimaksud, dilakukan melalui media sosial dan website Bappeda Provinsi Lampung;
- c. bahwa agar pelaksanaan dilakukan dengan tertib, dipandang perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tahun 2017;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Bappeda Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA,



Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Lampiran I: Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung

Nomor : 800/06/VI.01/UPTD/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama Jabatan
1	3	2
1.	Atasan PPID	Kepala Bappeda
2.	Ketua PPID	Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bappeda
3.	Sekretaris PPID	Kasubbag TU UPTD Pusdatin Bangda
4.	Koordinator Pengolahan Data	Kabid Perencanaan Makro dan Evaluasi Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Kasubbid Perencanaan Makro Kasubbid Pengendalian Kebijakan
5.	Koordinator Klasifikasi Informasi	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kasubbid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I Kasubbid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II Kasubbid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III
6.	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kasubbid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Kasubbid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Kasubbid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II
7.	Koordinator Fasilitasi Sengketa Informasi	Kabid Perencanaan Perekonomian Kasubbid Perencanaan Perekonomian I Kasubbid Perencanaan Perekonomian II Kasubbid Perencanaan Perekonomian III

KEPALA,



Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 800/ 06.01/VI.01/Sek/2021.

Dasar : Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 800/06/VI.01/UPTD/2021 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

NO.	NAMA	BIDANG
1.	FITRIA WULANDARI, S.I.Kom.	UPTD Pusat Data Dan Informasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Provinsi Lampung.

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 4 Januari 2021



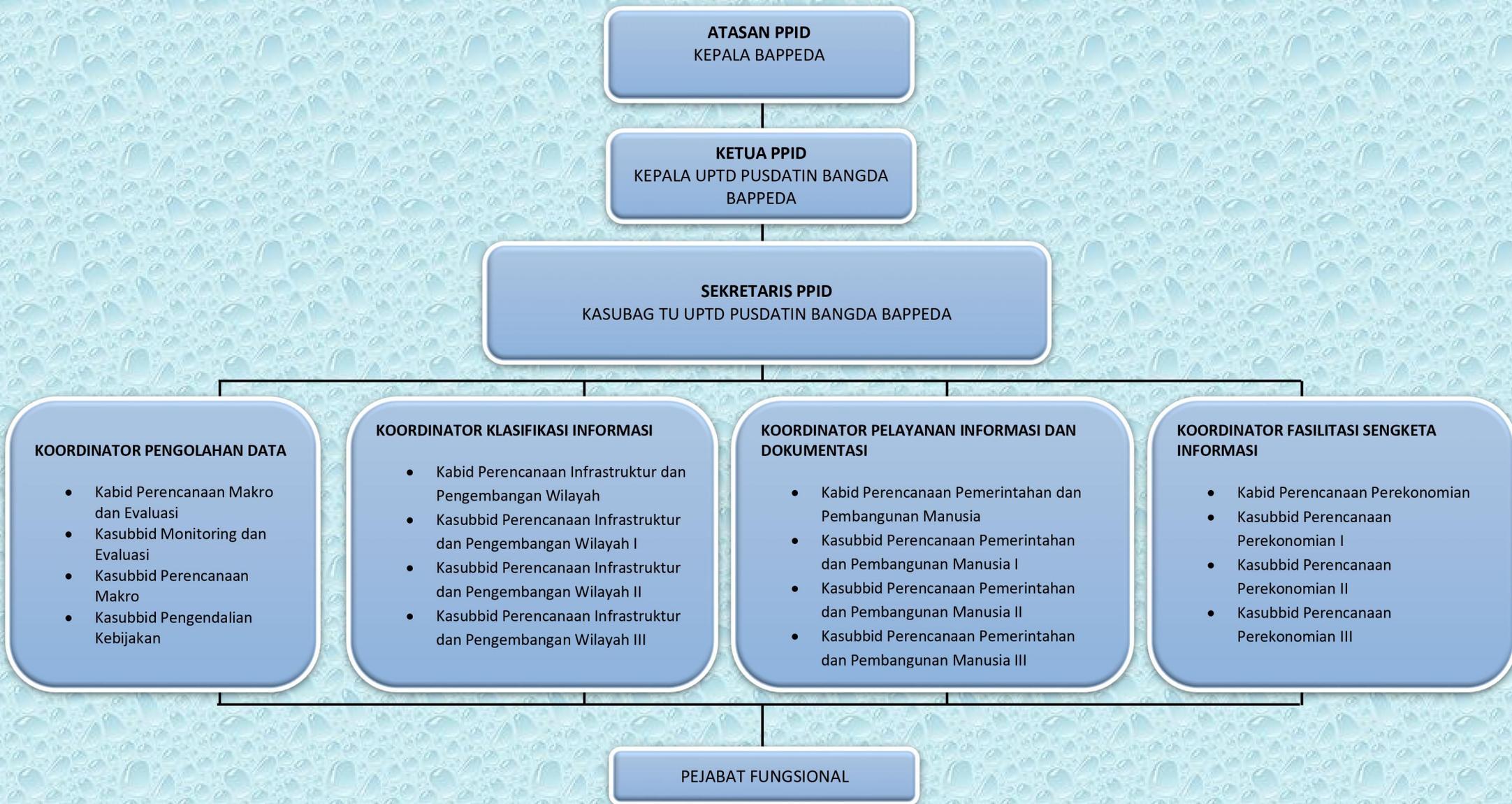
Ir. MULYADI IRSAN, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011



STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG



LAPORAN RILIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
JANUARI-JUNI 2021

LAPORAN RILIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
JANUARI 2021

Laporan Rilis Bappeda Provinsi Lampung

Januari 2021

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
1	08 Januari 2021	Rapat Tindak Lanjut Penyampaian Surat Menteri/Kepala Badan Perihal Pengusulan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri	 <p>Rapat Tindak Lanjut Penyampaian Surat Menteri/Kepala Badan Perihal Pengusulan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri</p> <p>Bandar Lampung - Menindaklanjuti Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.548/M.PPN/D.8/PP.05.01/07/2020 Tanggal 03 Juli 2020 Perihal Pengusulan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri Untuk Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/Blue Book) 2020-2024, dan Penyampaian Jawaban Menteri/Kepala Badan melalui Surat Menteri/Kepala Badan.</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung Fredy SM besama Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Lampung mengikuti "Rapat Tindak Lanjut Penyampaian Surat Menteri/Kepala Badan Perihal Pengusulan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri TA 2020-2024 Mitra Direktorat Transportasi" melalui zoom meeting, di Ruang Rapat Kepala Bappeda.</p> <p>Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Marga ini, diikuti oleh Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Direktur Sistem dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Perhubungan, Setditjen Perkeretaapian, Direktorat Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Bappenas, dan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.</p>
2		Bimbingan Teknis Konvergensi Penurunan Stunting Lampung Tengah dan Tanggamus	

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Bimbingan Teknis Konvergensi Penurunan Stunting Lampung Tengah dan Tanggamus	<p data-bbox="758 376 1002 392">Jumat 08 Januari 2021 - 10:34:44, Dibaca 203</p> <p data-bbox="758 447 1422 513">Bimbingan Teknis Konvergensi Penurunan Stunting Lampung Tengah dan Tanggamus</p> <p data-bbox="758 545 1481 660">Bandar Lampung - Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung Eka Yuslita Dewi memimpin Bimbingan Teknis Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Tengah dan Tanggamus di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Senin (24/08/2020). Kegiatan ini juga dilaksanakan melalui zoom meeting.</p> <p data-bbox="758 688 1481 772">Dalam kegiatan ini Kabupaten Fokus Stunting Tahun 2020 memaparkan hasil pelaksanaan aksi konvergensi aksi 1-4 Tahun 2020. Dengan menyertakan data dukung hasil pelaksanaan aksi #1 (Analisis Situasi), aksi #2 (rencana kegiatan), aksi #3 (reembuk stunting), aksi #4 (peraturan Bupati/Walikota tentang peran desa).</p> <p data-bbox="758 801 1481 885">Kegiatan ini juga dihadiri oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (dengan mengikutsertakan Tenaga Ahli Madya Pelayanan Sosial Dasar (TAM PSD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten, serta Organisasi Perangkat Daerah terkait.</p>
3	13 Januari 2021	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat	 <p data-bbox="892 1436 1070 1451">Rabu 13 Januari 2021 - 19:13:46, Dibaca 339</p> <p data-bbox="738 1514 1490 1545">Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat</p> <p data-bbox="738 1575 1505 1690">Bandar Lampung - Dalam rangka percepatan pembangunan sektor pariwisata khususnya Kawasan Pantai Barat Lampung Kabupaten Pesisir Barat. Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan Rapat Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat di Ruang Rapat Haris Hasyim Lantai 1 Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (13/01/2021).</p> <p data-bbox="738 1719 1505 1802">Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Fredy SM ini, dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Edarwan, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, dan OPD terkait.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat	<p>"Salah satu potensi besar pariwisata di Lampung, oleh karena itu berdasarkan Arahan Gubernur Lampung, perlu adanya pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, terutama infrastruktur terkait yang saat ini masih kurang memadai. Untuk mendukung development tersebut, Kita Perlu melakukan <i>brainstorming</i> Dan penajaman <i>rencana induk</i>," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung Fredy SM.</p> <p>"Ada beberapa hal yang harus kita prioritaskan terutama terkait tata ruang. Terkait tata ruang, kita harus segera menyelesaikan apa saja yang harus kita lakukan, karena tata ruang sangat penting, sebagai acuan untuk membuat <i>master plan</i> . Kemudian <i>master plan</i> yang sudah kita sempurnakan akan segera kita laporkan ke Gubernur," tambah Fredy.</p> <p>Fredy berharap kedepan akan ada rapat tindak lanjut bersama kabupaten/kota serta OPD terkait. "Harapannya kedepan ada rapat tindak lanjut bersama kabupaten/kota. Kemudian kita juga akan mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, dalam rangka pengembangan <i>kerajinan</i> dan kuliner-kuliner yang ada di sana," ujarnya.</p> <p>Rapat ini membahas terkait pengembangan jalan di Kawasan Pariwisata Pesisir Barat terutama di Tanjung Setia, Pulau Pisang, Daerah Labuhan Jukung dan sekitarnya. Kemudian pengembangan wisata alam berbasis konservasi, Rute Pesawat, penataan tata letak bangunan serta tersedianya prasarana pendukung seperti Post Jaga, Mushola, dan <i>Food Court</i>. Serta kebutuhan tenaga listrik.</p>
4	23 Januari 2021	Persiapan Penilaian PPD 2021 dan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Lampung 2022	 <p>Persiapan Penilaian PPD 2021 dan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Lampung 2022</p> <p>Bandar Lampung - Bappeda Provinsi Lampung telah melaksanakan Rapat Persiapan Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 dan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2022 di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Provinsi Lampung, Jumat (22/1/2021).</p> <p>PPD merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota, yang telah berhasil dalam menyusun dokumen perencanaan serta capaian pembangunan yang terbaik. Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. PPD tingkat Provinsi akan diberikan saat Musrenbangnas, sementara di tingkat kabupaten kota akan diberikan saat Musrenbang Prov.</p>

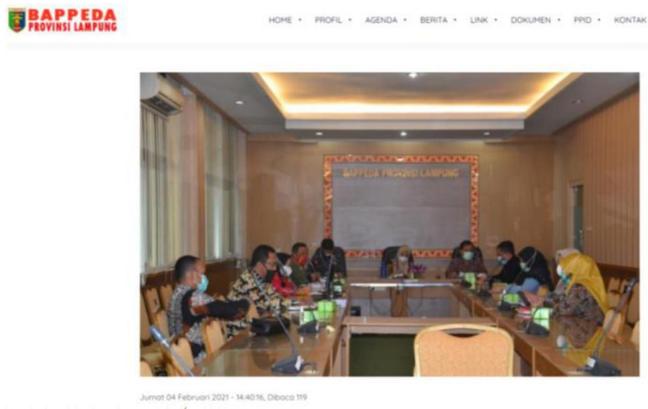
No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		<p>Persiapan Penilaian PPD 2021 dan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Lampung 2022</p>	<p>"Terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan penilaian PPD tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kalau penilaian PPD sebelumnya itu dilakukan evaluasi secara fisik. Namun di tahun ini karena adanya Covid-19, pelaksanaannya dilakukan secara online atau menggunakan aplikasi web-based. Pengelompokan Tim Penilai Independen (TPI) berdasarkan keseimbangan komposisi keahlian melalui penambahan di bidang lingkungan, jurnalistik, inovasi, LSM, dan perencanaan pembangunan untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Adanya penambahan item penilaian indikator lingkungan hidup terkait komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaporan rencana aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kemudian penilaian terkait kebijakan Pemerintah Daerah untuk penanganan Covid-19 dalam pelaksanaan pembangunan daerah," ujar Kepala Perencanaan Makro dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung, Marlina Emidianti saat menyampaikan paparannya.</p> <p>Tahapan Penilaian PPD ini terdiri dari Tahap 1 yaitu Penyampaian Dokumen RKPD dan Inovasi dengan bobot 30%. Tahap 2 Presentasi dan Wawancara dengan bobot 25%. Tahap 3 Verifikasi dengan bobot 45%. Adapun Pemerintah Provinsi Lampung saat ini sedang dalam tahap 1. "Kita saat ini sedang berada di Tahap 1. Saat ini kita sudah dan sedang mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sementara PPD di tingkat kabupaten dan kota akan segera dibentuk Tim Penilainya," ujar Marlina.</p> <p>Rapat yang dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung Evie Fatmawaty dan dihadiri oleh Bidang Teknis, Sekretariat, dan UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah ini, tidak hanya membahas terkait Persiapan Penilaian PPD Tahun 2021, namun dilanjutkan dengan pembahasan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022. Pembahasan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022 ini, membahas terkait Tema, Prioritas, dan Sasaran Makro di Tahun 2022</p>

LAPORAN RILIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
FEBRUARI 2021

Laporan Rilis Bappeda Provinsi Lampung

Februari 2021

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
1	2 Februari 2021	Koordinasi Penyusunan RISPAM Provinsi Lampung	 <p>Koordinasi Penyusunan RISPAM Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung - Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Lampung Ahmad Lianurzen memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (2/2/2021). Menurut Ahmad Lianurzen, Dokumen RISPAM rencananya akan dituntaskan di tahun 2021.</p> <p>"Rencana Rinci Dokumen RISPAM ini, seharusnya sudah diselesaikan. Namun karena ada refocusing maka belum dapat diselesaikan. Rencananya akan dituntaskan di tahun 2021. Dan terdapat 2 kawasan yang masuk dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu Bandar Lampung dan Kawasan Pariwisata Pesisir Barat,"ujarnya." ujar Lianurzen.</p> <p>Berdasarkan keterangan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Lampung Maria Doeni Isa, Untuk Dokumen RISPAM 15 Kab/Kota di Provinsi Lampung, sudah disusun. Namun masih ada yang harus ditinjau ulang. Karena terdapat 8 PDAM di Lampung yang sudah mati. Dan Hanya Kabupaten Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Bandar Lampung yang PDAM nya masih hidup.</p> <p>Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Belli Pahlupi juga menyampaikan, "Melalui rapat ini, Kita mencoba berinisiasi untuk mengembangkan wilayah-wilayah RISPAM kewenangan provinsi yaitu lintas kabupaten/kota, bagaimana bisa melayani Wilayah Metro, Natar-Lampung Selatan, termasuk Wilayah Kota Baru, dan beberapa bagian yang berdekatan dengan pusat distribusi. Harapannya kedepan tindak lanjut untuk melakukan Detail Engineering Design (DED) menjadi lebih ringan.</p> <p>Rapat ini juga dihadiri oleh Budi M Habibi Kepala Sub Koordinator Pelaksana Tugas Perencanaan Umum Bidang KPISDA BBWS Mesuji-Sekampung, dan Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
2	4 Februari 2021	Rapat Penetapan Satu Data Smart Village	 <p>Rapat Penetapan Satu Data Smart Village</p> <p>Bandar Lampung - Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Eka Yuslita Dewi memimpin Rapat Penetapan Satu Data Smart Village di Ruang Rapat Haris Hasyim Bappeda Provinsi Lampung, Kamis (4/2/2021).</p> <p>Rapat yang bertujuan untuk membahas penyusunan indikator-indikator dalam mendukung program Smart Village Provinsi Lampung dan tata kelola pengumpulan data ini dihadiri oleh Kepala Pusdatin UPTB Bappeda Provinsi Lampung, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Kepala Bidang Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Perwakilan dari OPD terkait dan Pendamping Desa. Serta dua narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung.</p> <p>Berdasarkan hasil rapat tersebut, diperoleh tindak lanjut sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginisiasi proses penyusunan SOP terhadap data IDM untuk dikirim ke Pus 2. Bekerjasama dengan BPS untuk melatih tenaga Pendamping dalam pengumpul Data Desa. 3. Data DTKS sebagai data kemiskinan yang telah diolah untuk digunakan dalam pengumpulan data dan verifikasi dengan didukung intervensi program dan kegiatan melalui analisis ruang, antar waktu, dan analisis wilayah. 4. Terkait tata kelola, pendamping membutuhkan bimbingan teknis tentang konsep pengumpulan 5. Pemetaan indikator - indikator yang menjadi standar pengumpulan data.
3		Sekretaris Bappeda Sampaikan Dukungan Program Daerah Dalam Pengawasan Keamanan Pangan	 <p>Sekretaris Bappeda Sampaikan Dukungan Program Daerah Dalam Pengawasan Keamanan Pangan</p> <p>Bandar Lampung - Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung, Eka Yuslita Dewi menyampaikan dukungan Bappeda Provinsi Lampung terhadap Advokasi Program Nasional (Advokasi Program Nasional) untuk Pekan Nasional Keamanan Pangan Desa (GKPD), Pekan Nasional Aman dari Bahan Berbahaya (GPABB), dan Pekan Nasional Aman Anak Sekolah (GPJAS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021. Acara ini berlangsung di PPKM Bandar Lampung, Kamis (4/2/2021).</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		<p>Sekretaris Bappeda Sampaikan Dukungan Program Daerah Dalam Pengawasan Keamanan Pangan</p>	<p>Sekretaris Bappeda Sampaikan Dukungan Program Daerah Dalam Pengawasan Keamanan Pangan</p> <p>Bandar Lampung – Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung Evie Fatmawaty menjadi narasumber pada Advokasi Program Nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) Pasar Pangan Aman dari Bahan Berbahaya (PPABB) dan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tingkat Provinsi Lampung 2021, yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM Bandar Lampung di Hotel Novotel, Kamis (4/2/2021).</p> <p>"Keamanan pangan merupakan Pilar ke-3 Rencana Aksi Daerah. Pengawasan pangan segar yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilaksanakan terhadap pangan segar di peredaran maupun pada proses produksi. Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan di pusat dan daerah secara garis besar diarahkan pada kegiatan koordinasi dan kelembagaan penanganan keamanan pangan segar, serta pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar," ujar Evie saat menyampaikan paparannya.</p> <p>Ia juga menyampaikan, terdapat beberapa program atau kegiatan terkait keamanan pangan di Provinsi Lampung Tahun 2021, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi • Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya • Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi • Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota <p>Selanjutnya, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten Kota • Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi <p>Dan Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan berkualitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pemantapan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan • Sub Kegiatan pengawasan dan pengendalian produk <p>Kemudian, Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melalui kegiatan pengawasan barang yang diatur tata niaganya. Serta Program Pemberdayaan Industri yaitu kegiatan bimbingan teknis Gugus Kendali Mutu (GKM).</p>
4	17 Februari 2021	<p>Penandatanganan Dokumen Penetapan Kinerja dan Pakta Integritas Bappeda Provinsi Lampung</p>	 <p>The image shows a screenshot of the official website of BAPPEDA Provinsi Lampung. At the top, there is a navigation menu with links for HOME, PROFIL, AGENDA, BERITA, LINK, DOKUMEN, PPD, and KONTAK. Below the menu is a news article titled "Penandatanganan Dokumen Penetapan Kinerja dan Pakta Integritas Bappeda Provinsi Lampung". The article includes a photograph of several officials in blue batik uniforms signing documents at a table. One official is standing and speaking into a microphone, while others are seated at the table.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		<p>Penandatanganan Dokumen Penetapan Kinerja dan Pakta Integritas Bappeda Provinsi Lampung</p>	<p>Kamis 17 Februari 2021 - 11:04:02, Dibaca 128</p> <p>Penandatanganan Dokumen Penetapan Kinerja dan Pakta Integritas Bappeda Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung – Bappeda Provinsi Lampung menggelar Penandatanganan Dokumen Penetapan Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2021 Pegawai Bappeda Provinsi Lampung dengan Kepala Bappeda Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (17/2/2021).</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, dalam sambutannya menyampaikan “Bappeda memiliki sumbangan besar terhadap hasil pembangunan yang ada di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu Bappeda harus bekerja dan memberikan pelayanan yang optimal, untuk memberikan hasil yang terbaik,” ujarnya.</p> <p>Ia juga berharap agar Bappeda menjadi Konseptor Smart Planing, membuat system perencanaan yang inklusif, dimana semua ikut terlibat, dan saling bersinergi dengan kabupaten dan kota.</p> <p>“Di 2021 ini akan dilakukan revisi RPJMD untuk mensinergikan antara Renstra Perangkat Daerah dan target kinerja Lampung Berjaya, sehingga bisa memenuhi 33 Janji Gubernur dan Wakil Gubernur. Tentunya saya ingin memberikan yang terbaik, namun komitmen ini tidak akan cukup, tidak akan bias terwujud jika tanpa dukungan semua Aparatur Bappeda. Saya berharap kita saling bersinergi dan saling mendukung,” ujar Kepala Bappeda saat menyampaikan arahannya.</p>
5		<p>Ketua DWP Bappeda Ajak Anggota Lebih Aktif dalam Mendukung Program Siger</p>	 <p>Kamis 17 Februari 2021 - 11:00:02, Dibaca 165</p> <p>Ketua DWP Bappeda Ajak Anggota Lebih Aktif dalam Mendukung Program Siger</p> <p>Bandar Lampung: Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bappeda Provinsi Lampung telah melaksanakan pertemuan rutin di Ruang Rapat lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (17/02/2021).</p> <p>Kegiatan rutin yang diselenggarakan 2 bulan sekali ini sebagai wadah salurahmi antar anggota Dharma Wanita Persatuan Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p>Ketua Dharma Wanita Persatuan Bappeda Provinsi Lampung Vera Mulyadi, sapaan akrabnya, mengajak seluruh anggota Persatuan Bappeda Provinsi Lampung untuk mendukung dan ikut berperan aktif dalam Gerakan Saatnya Ikut Bergerak (Siger) sebagai program inovasi untuk Masyarakat Lampung yang diinisiasi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Ketua DWP Bappeda Ajak Anggota Lebih Aktif dalam Mendukung Program Siger	<p>"Ayo kita sama-sama, ikut serta dan kompak dalam mendukung program Siger, yang diinisiasi oleh Ibu Riana Sari Arinal dalam menghadapi Dampak Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat. Siger sebagai kegiatan membantu sesama atau masyarakat di lingkungan sekitar kita seperti memberikan bahan-bahan makanan, dll. Sesuai dengan kemampuan kita. Memberi sebagai bentuk keikhlasan kita," ujarnya.</p> <p>Ketua Dharma Wanita Persatuan Bappeda Provinsi Lampung juga mengajak seluruh anggota DWP Bappeda kompak, kuat, dan saling menjaga silaturrahi untuk DWP Bappeda yang lebih baik lagi.</p>
6	18 Februari 2021	Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Lampung 2022	 <p>Kamis 18 Februari 2021 - 15:51:28, Dibaca 528</p> <h3>Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan RKPDP Provinsi Lampung 2022</h3> <p>Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2022 di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Kamis (18/2/2021).</p> <p>Dalam sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini telah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung untuk Tahun 2022 mendatang, yang merupakan penjabaran tahun ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.</p> <p>"Dengan melaksanakan forum ini, diharapkan dapat menjadi wahana sekaligus upaya pemerintah daerah untuk menjangkau aspirasi pemangku kepentingan pembangunan yang dimulai sejak tahap awal perencanaan, baik dalam perspektif pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif. Dengan demikian, produk perencanaan yang dihasilkan telah memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan good governance, untuk mewujudkan tujuan pembangunan Provinsi Lampung, yaitu Masyarakat Lampung Berjaya," ujar Fahrizal Darminto.</p> <p>Fahrizal juga menyampaikan, Covid-19 menjadi permasalahan besar yang telah menyebabkan banyak target-target dan indikator pembangunan yang tidak tercapai. Sementara sumber daya anggaran semakin terbatas, untuk itu Fahrizal berharap kepada seluruh kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar dalam menyusun perencanaan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sehingga target-target yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat tercapai, serta mampu memberi jalan keluar atas penyelesaian dampak Covid-19.</p> <p>Kegiatan yang diselenggarakan secara online ini, dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Inspektoriat Provinsi Lampung, DPRD Provinsi Lampung, Kepala Instansi Vertikal di Provinsi Lampung, Para Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota seProvinsi Lampung, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, Akademisi dan Kalangan Dunia Usaha.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
7	23 Februari 2021	Kepala Bappeda Ajak Pemerintah Tanggamus Lebih Bersinergi Dengan Pemerintah Provinsi	 <p data-bbox="692 901 963 921">Jumat 23 Februari 2021 - 16:43:10, Dibaca 142</p> <h3 data-bbox="692 968 1410 1024">Kepala Bappeda Ajak Pemerintah Tanggamus Lebih Bersinergi Dengan Pemerintah Provinsi</h3> <p data-bbox="692 1054 1493 1187">Bandar Lampung - Dalam paparan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menyampaikan, beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah Tanggamus agar lebih bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tidak terlepas dari semua sektor teknis di masing-masing OPD untuk bisa bersinergi. Apa yang menjadi kebutuhan isu di Tanggamus. Sehingga sinergitas, kolaborasi, dan koordinasi program, bisa lebih dioptimalkan.</p> <p data-bbox="692 1242 1493 1293">Selanjutnya, terkait dengan capaian target indikator makro agar disesuaikan dengan kondisi saat ini, terkait pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, isu kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.</p> <p data-bbox="692 1318 1493 1367">Terakhir yang harus menjadi perhatian adalah kebijakan pemulihan dampak Covid-19 agar lebih dioptimalkan dan bersinergi dengan provinsi.</p> <p data-bbox="692 1391 1493 1498">"Mungkin ini yang menjadi perhatian dalam rangka Forum Konsultasi Publik Tahun 2022 Kabupaten Tanggamus. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Salam hormat dari Bapak Gubernur untuk Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati serta segenap Masyarakat Kabupaten Tanggamus yang kami cintai," Ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p data-bbox="692 1522 1493 1629">Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Tanggamus ini dilaksanakan secara virtual dan dihadiri oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tanggamus, DPRD Kabupaten Tanggamus, Forkopinda Kabupaten Tanggamus Sekda Kabupaten Tanggamus, Asisten Sekretariat Kabupaten Tanggamus, dan Kepala Organisasi yang ada di Kabupaten Tanggamus.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
8		Gubernur Lampung Sampaikan Proyek Prioritas Provinsi Lampung Dalam Mendukung Pelaksanaan Major Project dan Prioritas Nasional	 <p data-bbox="687 711 954 725">Jumat 23 Februari 2021 - 16:34:59, Dibaca 279</p> <p data-bbox="687 772 1417 827">Gubernur Lampung Sampaikan Proyek Prioritas Provinsi Lampung Dalam Mendukung Pelaksanaan Major Project dan Prioritas Nasional</p> <p data-bbox="687 854 1471 950">Bandar Lampung - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sampaikan Proyek Prioritas Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan Major Project dan Prioritas Nasional pada Rapat Koordinasi Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Para Gubernur dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, secara virtual di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (23/2/2021).</p> <p data-bbox="687 997 1230 1017">Dalam paparannya, Gubernur Lampung menyampaikan beberapa usulan yaitu:</p> <ul data-bbox="708 1038 1471 1269" style="list-style-type: none"> • Usulan Penanganan Exit Tol (Exit Tol Menggala - Sp Tajab - Negara Ratu - Kota Bumi) • Akses Air Minum Perpipaan (Pembangunan SPAM Regional) • Rumah Susun Perkotaan (Rumah Susun BPSDM Provinsi Lampung di Natar Lampung Selatan dan Rumah Susun SMKN Sekolah Pertanian Lampung) • Peningkatan Jalan Akses Kawasan Industri Prioritas (Jalan Strategis RE Martadinata - Sp. Teluk Kalian dan Jalan Sp.Imam Bonjol - Pringsewu - Sa. Kota Agung) • Revitalisasi Tambak (Tambak Dipasena di Kabupaten Tulang Bawang dan Millenial Shrimp Farm di Tanggamus) • Pengembangan Food Estate Provinsi Lampung di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Way Kanan <p data-bbox="687 1289 1471 1334">Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dan diikuti oleh Gubernur se-Sumatera.</p>
9	25 Februari 2021	Konsultasi Publik Penyusunan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		<p>Konsultasi Publik Penyusunan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024</p>	<p>Jumat 25 Februari 2021 - 17:08:51, Dibaca 199</p> <p>Konsultasi Publik Penyusunan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024</p> <p>Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 secara virtual di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Kamis (25/2/2021).</p> <p>Dalam arahan Gubernur Lampung yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menyampaikan, "adanya Pandemi Covid-19 dapat berdampak pada capaian target pembangunan Provinsi Lampung, tidak terkecuali pada pelaksanaan TPB/SDGs. Namun demikian kita harus tetap optimis dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memaksimalkan hasil akhir sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan".</p> <p>"TPB/SDGs adalah tantangan berat pembangunan, oleh karena itu upaya upaya ekstra keras, inovatif, dan out of the box sangat diperlukan jika kita ingin mencapai target di tahun 2030. Untuk itu dengan adanya dokumen tahun 2020-2024 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pencapaian pembangunan khususnya pada pilar social, ekonomi, lingkungan dan hukum tata kelola pemerintahan. Selanjutnya dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 belum sepenuhnya sempurna, sehingga perlu adanya masukan, kritik dan saran. Serta berkomitmen dan optimis dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran TPB/SDGs sesuai yang tertuang dalam dokumen TPB/SDGs Provinsi Lampung tahun Tahun 2020-2024," tambahnya.</p>

LAPORAN RILIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
MARET 2021

Laporan Rilis Bappeda Provinsi Lampung

Maret 2021

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
1	01 Maret 2021	Gubernur Lampung sampaikan KPB sebagai Inovasi Pembangunan Daerah	 <p>Gubernur Lampung sampaikan KPB sebagai Inovasi Pembangunan Daerah</p> <p>Bandar Lampung - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sampaikan Program Kartu Petani Berjaya (KPB) sebagai Inovasi Pembangunan Daerah pada Penilaian Tahap II Presentasi dan Wawancara Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 Provinsi Lampung secara online di Ruang Command Center Lantai 2 Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (1/3/2021).</p> <p>Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada sektor pertanian serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung menginisiasi program KPB, sebagai program inovatif dibidang pertanian dan salah satu dari 33 agenda utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya. Dan pada misi ke lima membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian di wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan, sebagaimana RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.</p> <p>"Meskipun program KPB sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Program KPB telah <i>dilaunching</i> bersama Menteri Pertanian pada 6 Oktober 2020 di wilayah Kabupaten Lampung Tengah," ujar Gubernur Lampung.</p> <p>Dalam paparannya Gubernur Lampung menyampaikan, Konsep Program Kartu Petani Berjaya ini, menghubungkan semua kepentingan <i>stakeholder</i> di bidang pertanian untuk memberikan akses kemudahan bagi petani terhadap sarana produksi. Akses keuangan terutama kredit usaha rakyat. Pembinaan manajemen usaha dan teknologi untuk meningkatkan produksi. Pendampingan penanganan panen dan pajak panen. Sehingga pemasaran hasil pertanian akan menguntungkan petani.</p> <p>"Saya mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PPN/Bappenas. Saya berharap melalui PPD ini, dapat memberikan motivasi kepada daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang terbaik. Khususnya pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung. Saya juga berharap kepada Kementerian PPN/Bappenas dapat selalu bekerjasama dan memberikan dukungan dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera khususnya di Provinsi Lampung," ujar Gubernur Lampung.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Gubernur Lampung sampaikan KPB sebagai Inovasi Pembangunan Daerah	<p>Pada kegiatan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan juga menyampaikan paparan terkait Pencapaian Pembangunan di Provinsi Lampung, Kualitas dan Proses Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Lampung.</p> <p>Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ini juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Lampung, Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.</p>
2	02 Maret 2021	Rakor Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung	<div data-bbox="710 629 1436 1046" data-label="Image"> </div> <p>Rakor Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung - Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (2/3/2021). Rapat yang juga diselenggarakan secara virtual ini, dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim.</p> <p>"Dalam rangka membangun komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan sinergitas program penanggulangan kemiskinan. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Kita perlu melakukan pertemuan rutin untuk melakukan evaluasi dan monitoring program-program penanggulangan kemiskinan melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah yang sudah ada. Pastikan bahwa DTKS dengan memprioritaskan rumah tangga miskin yang berada di desil 1 sampai desil 2, 10% sampai dengan 20% menjadi prioritas tumpuan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan," ujar Wakil Gubernur Lampung, saat menyampaikan arahannya.</p> <p>Wakil Gubernur Lampung juga menyampaikan perlu adanya pengembangan mekanisme dan validasi secara berkala dengan data yang akurat sehingga lebih tepat sasaran. Selanjutnya, mengevaluasi sejauh mana isu kemiskinan sudah menjadi isu penting dalam perencanaan di kabupaten/kota dan juga seluruh OPD, sehingga semua bergerak bersama untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung.</p>

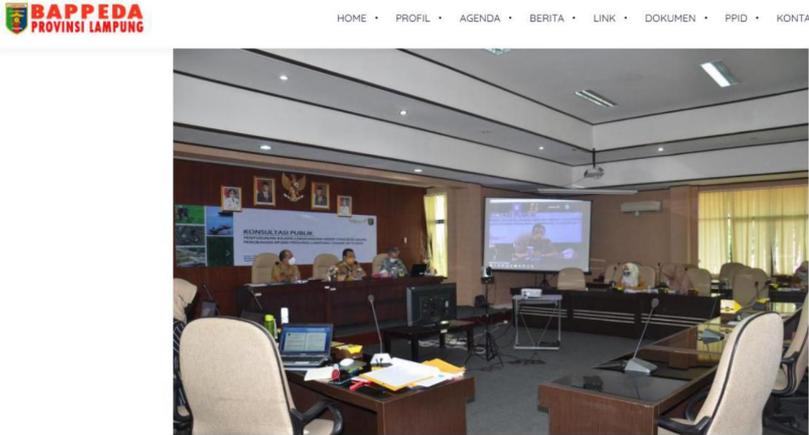
No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Rakor Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung	<p>"Beberapa tahun yang lalu, penanggulangan kemiskinan memang sudah dilakukan oleh Tim dan teman-teman segenap OPD. Namun kita terus mengevaluasi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur, kita akan terus mengevaluasi capaian-capaian kemiskinan. Adapun yang menjadi garis besarnya adalah komitmen. Komitmen kita semua terhadap kemiskinan. Dari komitmen tersebut, kita akan mempunyai suatu pandangan yang sama atau yang disebut sinergitas dalam berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkonvergensi, sehingga angka kemiskinan yang ada di provinsi lampung dapat ditekan semaksimal mungkin," tambah Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan saat menyampaikan paparannya.</p> <p>Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung ini, juga menghadirkan narasumber perwakilan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.</p>
3	03 Maret 2021	Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2021	 <p>Jumat 03 Maret 2021 - 17:23:43, Dibaca 156</p> <p>Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2021</p> <p>Bandar Lampung - Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua Tim Koordinasi Pangan Gizi (TKPG) yang diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung membuka secara virtual acara Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2021 di Ruang Rapat Harris Hasyim Lantai 1 Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (3/3/2021).</p> <p>Dalam sambutannya Ketua Tim Koordinasi Pangan Gizi (TKPG) berharap konsultasi publik ini menjadi salah satu tahapan dalam proses penyusunan RAD-PG untuk membangun kesepakatan multisektor antara pemerintah, swasta, akademisi, tokoh masyarakat serta LSM, sehingga dihasilkan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat sasaran, agar terwujudnya ketahanan pangan dan kualitas masyarakat di Provinsi Lampung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2021	<p>Kegiatan ini terkait penyusunan Rencana Pangan RAD PG selaras dengan tujuan kedua <i>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</i> (SGDs) yaitu menghambat, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong yang berkelanjutan yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030, sedangkan di tahun 2025 dapat tercapai penurunan stunting dan wasting pada balita serta penanganan kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui, maupun lansia.</p>
4		Kepala Bappeda ajak Pemda Way Kanan Kawal Pengembangan Lada	<div data-bbox="699 635 1445 1058"> </div> <p data-bbox="699 1105 940 1126">Jumat 03 Maret 2021 - 17:20:52, Dibaca 105</p> <h3 data-bbox="699 1173 1374 1201">Kepala Bappeda ajak Pemda Way Kanan Kawal Pengembangan Lada</h3> <p data-bbox="699 1228 1461 1310">Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjadi narasumber pada Konsultasi Publik Rancangan Awal RKP Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (03/03/2021). Kegiatan ini, dilaksanakan secara online oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan.</p> <p data-bbox="699 1336 1461 1530">"Dalam agenda kerja Pak Gubernur, kita akan mendesain pengembangan lada di Way Kanan. Way Kanan kita taruh di salah satu core-nya, di samping Lampung Utara dan Lampung Timur. Sedangkan pengembangnya, penunjangnya, adalah Tanggamus dan Lampung Barat. Oleh karena itu saya minta perhatian kita semua untuk mengawal pengembangan lada di Way Kanan, termasuk sektor pertanian berbasis hilirisasi. Masyarakat sudah mampu melakukan hilirisasi artinya masyarakat mampu mengolah sumber daya alamnya. Sehingga nanti nilai tambah dari Way Kanan akan segera terangkat," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung saat menyampaikan paparannya.</p> <p data-bbox="699 1557 1461 1663">Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga menyampaikan, berbagai dukungan dari Pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten Way Kanan terus berjalan. Way Kanan merupakan salah satu kabupaten yang dijadikan sebagai pengembangan Food Estate di Provinsi Lampung. Sektor perkebunan menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan.</p> <p data-bbox="699 1690 1461 1772">"Saya yakin dan percaya sektor perkebunan di way kanan menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi. Way Kanan sebagai bumi "Ramik Ragom," saya yakin masyarakat Way Kanan, Pemerintah Way Kanan, Forkopimda, dan semua stakeholder bersinergi untuk mewujudkan Way Kanan yang unggul dan Berjaya," tambahnya.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
5	04 Maret 2021	Kepala Bappeda Pimpin Diskusi NTP Lampung bersama Pakar	 <p data-bbox="667 758 906 778">Jumat 04 Maret 2021 - 17:26:57, Dibaca 111</p> <h3 data-bbox="667 823 1262 854">Kepala Bappeda Pimpin Diskusi NTP Lampung bersama Pakar</h3> <p data-bbox="667 880 1425 956">Bandar Lampung - Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung selama tahun 2015-2018 selalu menduduki peringkat terbaik se Sumatera, namun mulai tahun 2019 NTP Provinsi Lampung mengalami penurunan, sementara Provinsi lain se-Sumatera melonjak sangat signifikan. Kecenderungan penurunan berlanjut pada tahun 2020.</p> <p data-bbox="667 983 1425 1058">Menyikapi hal tersebut Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, mengundang para pakar untuk melakukan diskusi mendalam terkait NTP Lampung di Ruang Rapat Haris Hasyim Lantai 1 Bappeda Provinsi Lampung, Kamis (4/3/2021).</p> <p data-bbox="667 1085 1425 1136">"Banyak hal yang menjadi saran, masukan ataupun kritik yang semuanya sangat berguna untuk penajaman kebijakan terutama kebijakan pertanian di Provinsi Lampung," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung .</p> <p data-bbox="667 1163 1425 1295">Diskusi yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung ini, dihadiri oleh Perwakilan BPS Provinsi Lampung, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Dekan Fakultas Pertanian Unila, Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung, Para Pakar seperti Dr. Aji Ahadiat, SE, MBA, Dr. Erwanto, MS, Dr. Teguh Endaryanto, SP, M.Si , Asrian Hendi Caya, SE, MSi. Dan beberapa OPD terkait di bidang pertanian juga turut hadir.</p>
6		Kepala Bappeda Pimpin Rakor TKPKD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Kepala Bappeda Pimpin Rakor TKPKD Kabupaten/Kota Provinsi	<p>Kepala Bappeda Pimpin Rakor TKPKD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung - Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, secara online di Ruang Rapat Haris Hasyim Lantai 1 Bappeda Provinsi Lampung, Kamis (4/3/2021).</p> <p>"Saya menghimbau, saya mengharapkan, dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan di daerah ini memiliki kualitas dan harus tajam. Kemarin di beberapa forum konsultasi publik, isu yang didengungkan di masing-masing kabupaten/kota adalah keterbatasan anggaran, apalagi dalam pandemi Covid-19 ini. Saya tahu persis adanya refocusing yang membuat fokus penanganan program di masing-masing daerah ini agak sedikit terganggu. Tapi saya yakin bapak/ibu sekalian dengan kita membangun strategi, membangun kerjasama, dan harmonisasi yang baik. Sehingga perencanaan ini bisa lebih berkualitas, lebih tepat sasaran, terhadap isu kemiskinan. Kita harapkan adanya keselarasan agar semua arah kebijakan pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung saat menyampaikan arahnya.</p> <p>TKPKD ini terdiri dari dua kelompok, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok program bansos dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, dan individu. • Kelompok program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil. <p>Adapun tugas TKPKD yaitu menyusun rencana program dan kegiatan alokasi penganggaran yang diintegrasikan kedalam RPJMD dan RKPd. Serta melakukan koordinasi program kemiskinan, Monev dan juga melaporkan hasil kegiatan ke pada ketua TKPKD.</p>
7	05 Maret 2021	Konsultasi Publik Rancangan Awal Rkpd Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022	

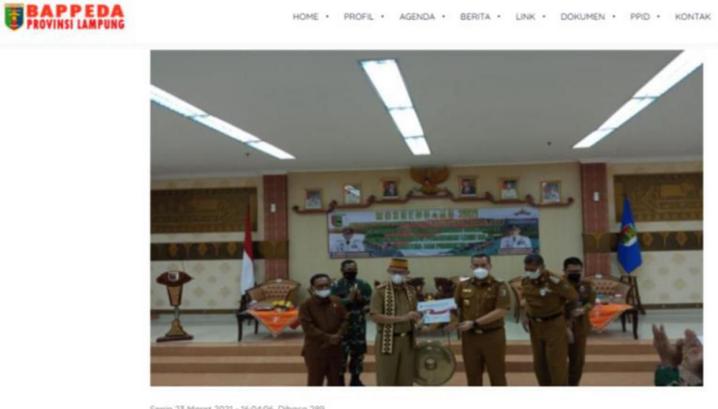
No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Konsultasi Publik Rancangan Awal Rkpd Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022	<p>Konsultasi Publik Rancangan Awal Rkpd Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022</p> <p>Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjadi narasumber pada Konsultasi Publik RKPd Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022, secara virtual di Ruang Rapat Haris Hasyim Lantai 1 Bappeda Provinsi Lampung, Jumat (5/3/2021).</p> <p>Dalam paparannya Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan, terkait isu-isu strategis di Kabupaten Lampung Barat, seperti kesiapan infrastruktur dalam menghadapi ekonomi ekonomi, pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana, target pengelolaan pembangunan berkelanjutan/SDGs, target pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, penyediaan lapangan pekerjaan, pengurangan persentase penduduk miskin, optimalisasi produk unggulan, optimalisasi proses pembangunan melalui kinerja yang inovatif, optimalisasi sektor pariwisata, perampingan struktur organisasi, dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat , untuk menjadi Perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.</p> <p>“Terkait mitigasi bencana, saya yakin dengan adanya program ramah lingkungan, bencana di Lampung Barat akan semakin kecil. Di sektor pariwisata, Lampung Barat memiliki Kebun Raya, Suah, dan Danau Ranau. Silakan Pariwisata di Lampung Barat di propandakan sehingga nantinya Warga Provinsi Lampung tertarik untuk berkunjung ke Lampung Barat,” ujar Kepala Bappeda.</p> <p>Kepala Bappeda juga berharap, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersinergi dengan provinsi, dan dengan kabupaten-kabupaten yang berdekatan dengan Lampung Barat, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya terkait penetapan target indikator makro agar disesuaikan dengan kondisi sekarang seperti; Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Demikian juga dengan kebijakan dalam rangka pemulihan dampak Covid-19, agar dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.</p>
8	09 Maret 2021	Rakortek Evaluasi, Rencana Kegiatan Pelaksanaan, Pelatihan Aplikasi Web Stunting	 <p>The image shows a screenshot of the Bappeda Provinsi Lampung website. At the top left is the Bappeda Provinsi Lampung logo. To the right is a navigation menu with links: HOME, PROFIL, AGENDA, BERITA, LINK, DOKUMEN, PPD, and KONTAK. Below the menu is a photograph of three women wearing face masks and headscarves, seated at a table during a meeting. In front of them are microphones and laptops. Behind them is a banner that reads 'BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG'. Below the photograph, the text reads 'Jumat 09 Maret 2021 - 17:32:13, Dibaca 155'.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Rakortek Evaluasi, Rencana Kegiatan Pelaksanaan, Pelatihan Aplikasi Web Stunting	<p>Rakortek Evaluasi, Rencana Kegiatan Pelaksanaan, Pelatihan Aplikasi Web Stunting</p> <p>Bandar Lampung - Dalam rangka pelaksanaan rencana pendampingan pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan/Penurunan Stunting Tahun 2021 di Provinsi Lampung untuk 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota prioritas penurunan stunting, maka Provinsi Lampung akan melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi dan Rencana Kegiatan Kabupaten/Kota dan Pelatihan Aplikasi Web Stunting yang akan dilaksanakan secara online dan offline, selama 2 hari Selasa-Rabu (9-10/3/2021) di Ruang Rapat Alimudin Umar Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (9/3/2021).</p> <p>Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung ini membahas terkait dokumen pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi yang akan di upload ke web aksi.bangda.kemendagri.go.id atau http://aksikonvergensi.id oleh Kabupaten lokus yang melaksanakan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting untuk dilakukan review dan penilaian oleh Pemerintah Provinsi dan Ditjen Bangda terhadap pelaksanaan aksi tersebut.</p> <p>8 aksi konvergensi penurunan stunting, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Situasi Program Penanganan Stunting (Aksi #1) 2. Penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi #2) 3. Rembuk Stunting (Aksi #3) 4. Penetapan Peraturan Bupati/Walikota (Aksi #4) 5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (Aksi #5) 6. Sistem Manajemen Data (Aksi #6) <p>Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bappenas telah menetapkan 10 Kabupaten/Kota Lokus Prioritas Intervensi Stunting Terintegrasi, yaitu Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Lampung Utara, Pesawaran, Way Kanan, Tulang Bawang, Pringsewu, dan Kota Bandar Lampung.</p> <p>Kegiatan ini juga dihadiri oleh TAP Bangda Kemendagri, Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas PMD dan Transmigrasi Provinsi Lampung, dan Perwakilan 10 Kabupaten/Kota Lokus Prioritas Intervensi Stunting Terintegrasi.</p>
9		Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	

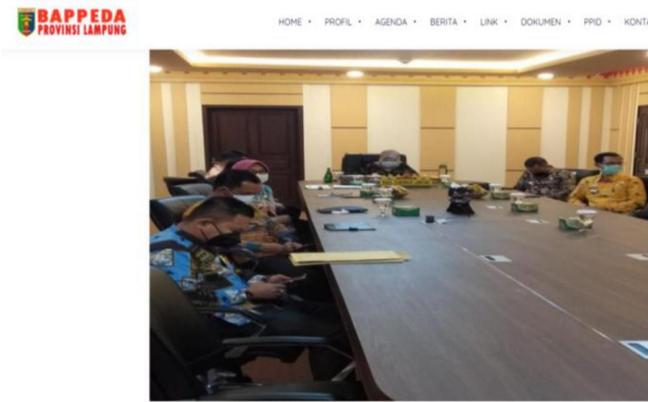
No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	<p data-bbox="708 349 959 369">Jumat 09 Maret 2021 - 17:30:19, Dibaca 148</p> <p data-bbox="708 427 1433 496">Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024</p> <p data-bbox="708 527 1501 619">Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan membuka Diskusi Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 di Ruang Rapat Alimudin Umar Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (9/3/2021).</p> <p data-bbox="708 649 1501 803">"Konsultasi Publik hari ini, menjadi bagian penting dalam upaya untuk menyediakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau Kebijakan Rencana Program (KRP) yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 guna mendukung Visi Rakyat Lampung Berjaya, Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing, dan Sejahtera," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung saat menyampaikan sambutannya.</p> <p data-bbox="708 833 1501 987">Konsultasi Publik yang bertujuan untuk menggali masukan dan tanggapan terkait isu pembangunan berkelanjutan dalam Penyusunan Dokumen Kajian KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ini dilaksanakan secara online dan dihadiri oleh OPD dan Kabupaten/Kota se-Provinsi se-Provinsi, Instansi Vertikal, perwakilan LSM /NGO, Akademisi dan Asosiasi/Profesi. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
10	10 Maret 2021	Musrenbang RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022	 <p data-bbox="746 1569 1267 1606">Musrenbang RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022</p> <p data-bbox="746 1643 1457 1780">Bandar Lampung - Gubernur Lampung diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan bersama Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Lampung Belli Pahlupi menghadiri Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Tulang Bawang di Gedung Musyawarah Mufakat Kabupaten Tulang Bawang, Rabu (10/3/2021).</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Musrenbang RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022	<p>"Sebagai dukungan Provinsi Lampung terhadap pembangunan Kabupaten Tulang Bawang, maka pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan program/kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang antara lain pada sektor Infrastruktur, Perumahan, Kawasan Permukiman, Kesehatan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Peternakan, Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Gubernur Lampung yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p>Dalam sambutannya Gubernur Lampung juga berpesan agar dalam penyusunan RKPD 2022 dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya untuk mempercepat laju pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, Anggota DPRD Provinsi Lampung yang mewakili Dapil Kabupaten Tulang Bawang, Anggota Fokorpimda Plus Kabupaten Tulang Bawang, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Para Asisten/Kepala Badan/Dinas-Instansi/ Camat se- Kabupaten Tulang Bawang, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, Akademisi, Kalangan Dunia Usaha.</p>
11		Musrenbang RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2022	 <p>Musrenbang RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2022</p> <p>Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Saiful Darmawan menghadiri secara online Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Pringsewu Ruang Rapat Lantai 1 Diskominfotik Provinsi Lampung, Rabu (10/3/2021).</p> <p>Dalam sambutan Gubernur Lampung yang disampaikan oleh Saiful Darmawan menyampaikan, Gubernur Lampung berpesan agar dalam penyusunan RKPD tahun 2022 benar-benar memperhatikan data-data makro dan kondisi sosial yang terjadi, sehingga dapat memformulasikan program yang tepat dan memberikan daya ungkit yang kuat bagi pembangunan Kabupaten Pringsewu serta mampu menjadi penopang laju pembangunan bagi Provinsi Lampung.</p> <p>Sebagai wujud sinergi pembangunan pusat dan daerah, terdapat beberapa Project Nasional dan Provinsi yang perlu terus didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, diantaranya adalah :</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Musrenbang RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2022	<p>1. Proyek Irigasi Bendungan Way Sekampung untuk penyediaan air irigasi, air baku, pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan potensi pariwisata.</p> <p>2. Proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi (kewenangan provinsi) di wilayah Pringsewu untuk mendukung ketahanan pangan.</p> <p>"Bebagai program dan kegiatan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, agar dikoordinasikan dengan baik kepada Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan akan dibahas lebih lanjut dalam forum Musrenbang Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada bulan April 2021 mendatang," ujar Saiful Darmawan.</p> <p>Pada kegiatan ini hadir pula Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung Evie Fatmawaty menyampaikan paparan terkait Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2022.</p>
12	15 Maret 2021	Tabiik Pun!!! Ayo Sukseskan Vaksinasi Covid-19	 <p>Senin 15 Maret 2021 - 15:05:27, Dibaca 326</p> <h3>Tabiik Pun!!! Ayo Sukseskan Vaksinasi Covid-19</h3> <p>Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung saat ini sedang melaksanakan pendataan target sasaran Vaksinasi COVID-19 Tahap II, dengan target sasaran Lansia dan Pelayan Publik. Pelayan Publik terdiri dari Tenaga Pendidik, Pedagang Pasar, Tokoh Agama, Wakil Rakyat, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintahan, Keamanan, Transportasi Publik, Wartawan, Atlet, dan Pariwisata.</p> <p>Dengan demikian Pemerintah Provinsi Lampung membuka kembali pendataan melalui tautan dan/atau link URL google chrome http://bappeda.lampungprov.go.id/form_vaksinasi sampai dengan akhir bulan Maret 2021.</p> <p>Berkenaan dengan itu, diminta kepada seluruh Masyarakat Lampung khususnya target sasaran untuk berpartisipasi mendukung dan menyukseskan pendataan Vaksinasi COVID-19.</p>

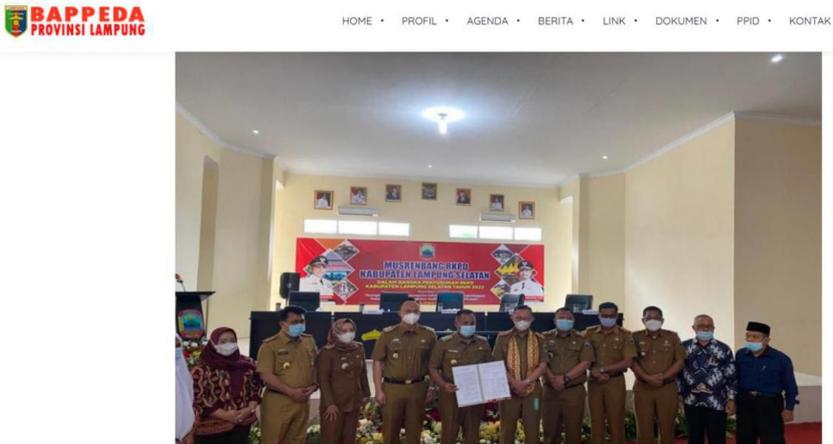
No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
13	23 Maret 2021	Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Pesawaran	 <p data-bbox="699 772 1241 803">Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Pesawaran</p> <p data-bbox="699 840 1493 962">Bandar Lampung - Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, menghadiri Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Pesawaran dengan tema pembangunan "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat untuk Mewujudkan Masyarakat Pesawaran lebih Maju, Sejahtera dan Produktif" di Aula Pemkab Pesawaran, Selasa (23/3/2021).</p> <p data-bbox="699 999 1493 1156">"Sebagai wujud dukungan dan apresiasi terhadap pembangunan Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh forum Musrenbang RKPD tahun 2022 ini, untuk dapat memetakan strategi dan langkah prioritas yang tepat, yang diharapkan akan memberikan daya ungkit yang kuat, sehingga Kabupaten Pesawaran mampu menjadi penopang sekaligus pendorong laju pembangunan di Provinsi Lampung," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.</p> <p data-bbox="699 1214 1493 1438">Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung juga menyampaikan, terdapat beberapa proyek nasional dan provinsi yang ada di Kabupaten Pesawaran yaitu pembangunan Kawasan Industri Tegineneng, peningkatan status dan penanganan ruas Jalan RE Martadinata - Teluk Kiluan, peningkatan status dan penanganan ruas jalan dari Exit Tol Natar - Negeri Katon - Pringsewu, pembangunan Jalan Tol dari Exit Tol Lematang - Pelabuhan Panjang - Padang Cermin, pembangunan Perkereta-apian di Provinsi Lampung yaitu Pembangunan jalur shortcut Tegineneng - Tarahan dan Pembangunan jalur double-track untuk ruas Kotabumi - Tarahan.</p> <p data-bbox="699 1475 1493 1635">Selain Proyek Nasional dan Provinsi tersebut, Kabupaten Pesawaran juga menerima kuota Program Bedah Rumah dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada tahun 2019 sebanyak 410 unit rumah tidak layak huni yang ditangani. Berdasarkan Basis Data Terpadu yang bersumber dari Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial, target Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah 8.654 RTLH, dan pencapaian kinerja sasaran penanganan rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 3.300 RTLH.</p> <p data-bbox="699 1671 1493 1794">"Tugas kita adalah melaksanakan program dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus menyerap dan mengakomodir aspirasi masyarakat, serta menyampaikan informasi secara tepat dan benar tentang pembangunan. Oleh karena itu, apa yang akan kita capai melalui program dan kegiatan yang akan kita susun bersama ini, selanjutnya harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara optimal," tambahnya.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Pesawaran	Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona ini di hadiri oleh Bappeda Provinsi Lampung, DPRD Kabupaten Pesawaran, Anggota Fokorpimda, Akademisi, Tenaga Ahli, Para Asisten/Kepala Badan/Dinas/Instansi/ Camat se-Kabupaten Pesawaran, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, Kalangan Dunia Usaha.
14	25 Maret 2021	Penilaian Tahap III Verifikasi PPD Tahun 2021	 <p data-bbox="738 1058 1142 1095">Penilaian Tahap III Verifikasi PPD Tahun 2021</p> <p data-bbox="738 1130 1469 1304">Bandar Lampung - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh Tim Penilai PPD Tahun 2021, yang telah menjadikan Provinsi Lampung sebagai salah satu dari 10 Besar Provinsi yang dapat mengikuti Penilaian Tahap III. Apresiasi dan ucapan terimakasih ini disampaikan saat Penilaian Tahap III Verifikasi, Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021, secara <i>online</i> di Ruang Command Center Lantai 2 Diskominfo Provinsi Lampung, Rabu (25/3/2021).</p> <p data-bbox="738 1334 1469 1473">"Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penilai dan Kementerian PPN/Bappenas. Kami berharap kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Lampung dalam Penilaian Tahap III dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah, dengan Inovasi sebagai kendaraan untuk mempercepat upaya pencapaian tersebut," ujar Gubernur Lampung.</p> <p data-bbox="738 1539 1490 1637">Fokus Penilaian Tahap III ini bertujuan untuk mengkonfirmasi dan menggali informasi lebih dalam, dari perspektif <i>stakeholders</i> pembangunan terhadap proses penyusunan dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021, pencapaian sasaran pembangunan daerah, dan inovasi daerah Kartu Petani Berjaya.</p> <p data-bbox="738 1667 1490 1794">Sebagai rangkaian Penilaian Tahap III, beberapa waktu yang lalu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung juga telah melakukan <i>verifikasi cepat</i> dalam rangka menghimpun informasi dari <i>stakeholders</i> pembangunan, membuktikan kondisi riil di lapangan, berdialog dengan petani penerima manfaat Kartu Petani Berjaya. Hasil verifikasi tersebut menjadi bahan bagi Tim Penilai PPD untuk melakukan Penilaian Tahap III pada hari ini.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Penilaian Tahap III Verifikasi PPD Tahun 2021	<p>Dalam penilaian Tahap III ini, turut dihadirkan para <i>stakeholder</i> pembangunan yaitu DPRD Provinsi Lampung, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Rektor Universitas Bandar Lampung, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Unsur Perangkat Daerah Provinsi Lampung : Inspektur, Bappeda; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Perikanan dan Kelautan; serta Biro Perekonomian, Unsur Kabupaten/Kota : Kepala Bappeda Kabupaten Pringsewu, Unsur Asosiasi Profesi : Bapak Asrian Hendicaya, SE, M.Si. (Wakil Ketua KADIN Lampung), Unsur Terkait Inovasi KPBB, dan Unsur LSM.</p>
15		Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Pesisir Barat	 <p>Senin 25 Maret 2021 - 15:59:11, Dibaca 108</p> <h3>Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Pesisir Barat</h3> <p>Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mewakili Gubernur Lampung memberikan sambutan secara online Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Pesisir Barat di Ruang Sakai Sambayan, Kamis (25/3/2021).</p> <p>“Tahun ini merupakan tahun pertama RPJMD Kabupaten Pesisir Barat 2021-2026. Untuk itu diperlukan pondasi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat serta keluar dari salah satu daerah tertinggal di Provinsi Lampung,” ujar Wakil Gubernur Lampung dalam sambutannya.</p> <p>Ia juga menambahkan, sebagai dukungan Provinsi Lampung terhadap pembangunan Kabupaten Pesisir Barat, maka pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan Program/Kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat antara lain pada sektor Infrastruktur, Pertanian, dan Pendidikan.</p> <p>“Saya juga berpesan agar dalam penyusunan RKPD 2022 dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya untuk mempercepat laju pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat,” ujarnya.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
16	29 Maret 2021	Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Way Kanan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Dukung Investasi	 <p data-bbox="711 835 951 856">Senin 29 Maret 2021 - 15:57:25, Dibaca 174</p> <h3 data-bbox="711 917 1409 989">Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Way Kanan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Dukung Investasi</h3> <p data-bbox="711 1022 1477 1146">Bandar Lampung - Sejak tahun 2012 sampai 2021 Kabupaten Way Kanan mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang naik turun. Menyikapi hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengajak Kabupaten Way Kanan untuk membangun dan meningkatkan Investasi terhadap penguatan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan.</p> <p data-bbox="711 1193 1477 1353">"Melihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, yang mengalami naik turun. Perlu untuk disikapi Pak Bupati dan Pak Wakil. Bagaimana menyikapinya tentu tidak terlepas dari adanya Investasi yang harus dibangun dan ditingkatkan untuk penguatan pertumbuhan ekonomi di Way Kanan," Ujar Kepala Bappeda saat menjadi narasumber pada Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Hal ini disampaikan secara virtual di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Provinsi Lampung, Senin (29/3/2021).</p> <p data-bbox="711 1400 1477 1457">Selain itu, Kepala Bappeda menyampaikan perlu adanya sinkronisasi dan sinergitas semua program kerja yang ada di Kabupaten Way Kanan, mengacu terhadap pengentasan kemiskinan.</p> <p data-bbox="711 1504 1477 1594">"13% angka capaian kemiskinan di Way Kanan, disarankan agar sinkronisasi dan sinergitas semua program kerja harus mengacu terhadap pengentasan kemiskinan. Sehingga kedepan potret RPJMD Kabupaten Way Kanan, benar-benar bisa membantu terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Way Kanan," tambahnya.</p> <p data-bbox="711 1641 1477 1766">Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappeda juga menyampaikan Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu kabupaten yang didorong oleh Gubernur Lampung dan Pemerintah Provinsi untuk menjadi Kawasan Food Estate sebagai program nasional. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada Rakor Gubernur se-Sumatera yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
17	30 Maret 2021	Konreg PUPR Tahun 2021 Provinsi Lampung	 <p data-bbox="699 762 957 784">Senin 30 Maret 2021 - 15:55:22, Dibaca 204</p> <h3 data-bbox="699 844 1141 880">Konreg PUPR Tahun 2021 Provinsi Lampung</h3> <p data-bbox="699 913 1509 1081">Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung Ahmad Lianurzen menyampaikan usulan infrastruktur prioritas Provinsi Lampung dan usulan baru Provinsi Lampung berdasarkan surat Sekda Provinsi Lampung pada Rakor Gubernur dengan Menteri PPN/Bappenas. Usulan-usulan tersebut disampaikan secara virtual di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (30/3/2021).</p> <p data-bbox="699 1111 1102 1136">Usulan infrastruktur prioritas Provinsi Lampung terdiri dari:</p> <ol data-bbox="759 1169 1249 1408" style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Jalan dari Exit Tol Menggala – Kotabumi 2. Pembangunan Jalan Exit Tol Ke Bandara Radin Intan II 3. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lampung 4. Pembangunan Rumah Susun 5. Ruas Jalan Bandar Lampung (Sp. Re Marthadinata) -Sp. Teluk Kiluan 6. Ruas Jalan Sp. Imam Bonjol Bandar Lampung -Sp. Kota Agung 7. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang <ul data-bbox="699 1473 1035 1498" style="list-style-type: none"> • Pengembangan Food Estate di Provinsi Lampung <p data-bbox="676 1592 1461 1657">Selanjutnya, usulan baru Provinsi Lampung berdasarkan Surat Sekda Provinsi Lampung, terdiri dari 4 bidang, Bidang Perumahan, Bidang Infrastruktur Permukiman dan Keciaptakaryaan, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air.</p> <ul data-bbox="699 1690 844 1714" style="list-style-type: none"> • Bidang Perumahan <ol data-bbox="735 1749 1225 1774" style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Baru Rumah Susun ASN pada BPSDM Provinsi Lampung

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		<p>Konreg PUPR Tahun 2021 Provinsi Lampung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Rumah Susun SMKN-SPP Bidang/Program Keahlian Agribisnis Produksi Pertanian • Bidang Infrastruktur Permukiman dan Keciaptakarya <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lampung untuk mendukung KPBU 2. Penataan Kawasan dan Pembangunan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Kapasitas 60 L/detik dan jaringan perpipaan mendukung Kawasan Bakauheni Harbour City 3. Dukungan DED TPA Regional Provinsi Lampung 4. Dukungan DED IPLT Regional Provinsi Lampung • Bidang Bina Marga <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Exit Toll Menggala - Tajab - Kotabumi sebagai akses menuju Pintu Tol 2. Pembangunan Akses menuju Kawasan Industri Tanggamus 3. Pembangunan Akses menuju Kawasan Industri Tanggamus 4. Peningkatan Akses Jalan Menuju Tol Bakauheni - Terbanggi Besar - Pematang Panggang (Akses Gerbang Tol: Itera (2,5Km), Gunung Batin (0,9Km), Lambu Kibang (5,52Km), Menggala (9,28Km), Way Kenanga (10,5Km)) 5. Pembangunan Exit Toll Bandara Radein Intan 6. Pembangunan Jembatan Way Tulang Bawang/Rawa Pitu 7. Peningkatan Kapasitas Jalan Kota Bandar Lampung-Kota Agung 8. Peningkatan Ruas Jalan Gunung Sugih - Kota Gajah - Seputih Surabaya - Sadewa 9. Pembangunan Jalan Tol dari Exit Toll Lematang - Pelabuhan Panjang - Padang Cermin 10. Pembangunan 2 Jalur Ruas Jalan Nasional (Gunung Sugih - Bandar Jaya) 11. Pembangunan Jalan lingkaran Luar Gisting - Kota Agung 12. Pembangunan Jalan Lingkar Utara dan Pringsewu
18		<p>Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lampung Selatan</p>	 <p>Senin 30 Maret 2021 - 15:50:47, Dibaca 178</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lampung Selatan	<p>Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lampung Selatan</p> <p>Lampung Selatan - Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Farizal Darminto, menghadiri Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lampung Selatan di Aula Rimau Bappeda Lampung Selatan , Selasa (30/3/2021).</p> <p>Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh forum Musrenbang RKPD tahun 2022 Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat memanfaatkan strategi dan langkah prioritas yang tepat, yang diharapkan akan memberikan daya ungkit yang kuat, Kabupaten Lampung Selatan mampu melakukan penopang utama sekaligus pendorong laju pembangunan di Provinsi Lampung.</p> <p>"Dalam dua tahun terakhir pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung telah dicanangkan pembangunan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni dan Kawasan penunjang pariwisata sekitarnya sebagai penggerak titik pertumbuhan ekonomi baru di provinsi lampung," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung .</p> <p>Prioritas lainnya adalah mewujudkan pelayanan Kesehatan bertaraf internasional di Kawasan Aerocity Bandara Raden Intan II yang menjadi arahan oleh Menteri BUMN RI. Khusus Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menganggarkan Program/Kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan antara lain pada sektor Infrastruktur, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kesehatan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Peternakan, Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>"Saya juga berpesan agar dalam penyusunan RKPD 2022 dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada untuk mempercepat laju pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan," tambah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung .</p> <p>Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Bappeda Provinsi Lampung, Anggota Forkopimda Plus Kabupaten Lampung Selatan, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Para Asisten/Kepala Badan/Dinas-Instansi/Camat se- Kabupaten Lampung Selatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, Akademisi, Kalangan Dunia Usaha.</p>
19	31 Maret 2021	Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lampung Timur	 <p>The image shows a screenshot of the BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG website. At the top left is the logo for BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG. To the right of the logo is a navigation menu with links: HOME, PROFIL, AGENDA, BERITA, LINK, DOKUMEN, PPIID, and KONTAK. Below the navigation menu is a photograph of a large meeting room. The room has a long table with several people seated around it. There are microphones and water bottles on the table. The room has a high ceiling with recessed lighting and a banner on the wall in the background.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		<p>Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lampung Timur</p>	<p>Senin 31 Maret 2021 - 09:43:01, Dibaca 148</p> <p>Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lampung Timur</p> <p>Lampung Timur - Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, menghadiri Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lampung Timur di Aula Utama SETDA Kabupaten Lampung Timur, Rabu (31/3/2021).</p> <p>Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung telah menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit (di bawah 10%) pada tahun 2024. Untuk itu perlu komitmen bersama untuk menurunkan angka kemiskinan dengan kebijakan program yang terarah serta memprioritaskan rumah tangga miskin dalam Basis Data Terpadu sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan.</p> <p>"Untuk itu kami menyarankan adanya program penguatan kompetensi terhadap sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Timur untuk mendukung hilirisasi sumber daya alam. Selain itu, diperlukan upaya untuk menekan angka prevalensi gizi buruk (<i>stunting</i>) di Kabupaten Lampung Timur. Terkait dengan pembangunan berkelanjutan di Lampung Timur, diperlukan penanganan dalam hal isu-isu lingkungan dan isu-isu pembangunan sosial," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.</p> <p>Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, Bappeda Provinsi Lampung, Anggota Forkopimda Plus Kabupaten Lampung Timur, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Para Asisten/Kepala Badan/Dinas- Instansi/ Camat se- Kabupaten Lampung Timur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, Akademisi, Kalangan Dunia Usaha.</p>

LAPORAN RILIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
APRIL 2021

Laporan Rilis Bappeda Provinsi Lampung

April 2021

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
1	12 April 2021	Musrenbang RKPD Tahun 2022 Provinsi Lampung	 <p>Kamis 12 April 2021 - 08:46:16, Dibaca 250</p> <h3>Musrenbang RKPD Tahun 2022 Provinsi Lampung</h3> <p>Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2021 secara <i>offline</i> dan <i>online</i> di Ballroom Novotel Hotel Bandar Lampung, Senin (12/4/2021). Musrenbang ini digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan tema "Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan SDM Berkualitas."</p> <p>Musrenbang yang dihadiri secara langsung oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Sekda Prov. Lampung, Ketua DPRD dan DPD-RI Prov.Lampung, Kapolda Lampung, Komandan KOREM 043 GATAM, Komandan LANAL Lampung, Komandan BRIGIF 03 Marinir, Kajati Lampung, Rektor dan Akademisi, serta Bupati/Walikota dari seluruh 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun virtual ini dibuka oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.</p> <p>Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam Musrenbang Provinsi Lampung.</p> <p>"Pertama-tama, saya terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang berpartisipasi pada kegiatan Musrenbang di seluruh wilayah Provinsi Lampung, mulai dari musrenbang desa/kelurahan/pekon/kampung, yang dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan serta musrenbang kabupaten/ kota. Semua rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat Lampung," ujar Gubernur Lampung.</p> <p>Selain itu, Gubernur Lampung mengajak Bupati dan Walikota yang baru dilantik bekerja untuk merealisasikan janji yang disampaikan dalam kampanye Pemiluada yang lalu. Selain itu, Ia juga mengingatkan untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun ke depan.</p> <p>"Dalam merencanakan pembangunan, kita harus fokus. Fokus dalam menyusun rencana-rencana apa yang akan dikerjakan, dan fokus dalam mengerjakan hal-hal yang telah direncanakan. Bilamana terdapat kendala/hambatan, segera lakukan koordinasi, konsultasi, ataupun revisi ; sehingga akan kembali <i>seperti semula</i>," tambahnya .</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Musrenbang RKPD Tahun 2022 Provinsi Lampung	<p>Sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga menyampaikan terkait pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, kualitas SDM, serta pentingnya "sinergi" pembangunan.</p> <p>"Selain pembangunan infrastruktur strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melaksanakan beberapa program inovasi daerah yang juga memerlukan dukungan pemerintah kabupaten/Kota dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi daerah, antara lain Implementasi Program Kartu Petani Berjaya, <i>Smart Village</i>, <i>Smart School</i>," ungkap Gubernur Lampung.</p> <p>Agenda pelaksanaan Musrenbang yang berbeda dari pelaksanaan tahun sebelumnya ini, diawali dengan <i>talkshow</i> "Pemulihan Ekonomi Paska Covid-19 dengan narasumber para ahli di bidangnya yaitu dari Bank Indonesia, Unila, GGF dan HIPMI/HKTI/DPRD. D dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Panitia Penyelenggara sekaligus paparan oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, dan Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay. Serta pengumuman dan penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Sai Bumi Ruwa Jurai (Saburai) Tahun 2021.</p> <p>Sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung atas prestasinya dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan evaluasi komprehensif dan kreatif melalui Penghargaan Pembangunan Daerah Sai Bumi Ruwa Jurai (PPD Saburai) Tahun 2021.</p> <p>"Tim Penilai PPD yang terdiri dari Tim Penilai Teknis, Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen telah melakukan penilaian terhadap Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada tahapan serta aspek dan teknis penilaian dari Bappenas RI. Berdasarkan akumulasi perolehan nilai, telah ditetapkan Peraih PPD Saburai Tahun 2021 yang diumumkan oleh Gubernur Lampung," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan.</p>
2	22 April 2021	Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Lampung Timur 2021-2026	 <p>The image is a screenshot of a website for BAPPEDA Provinsi Lampung. It features a navigation menu at the top with links for HOME, PROFIL, AGENDA, BERITA, LINK, DOKUMEN, PPD, and KONTAK. The main content area shows a photograph of a man wearing a yellow batik shirt and a blue face mask, seated at a table with a microphone, likely participating in a public consultation. The date and time of the screenshot are noted as Jumat 22 April 2021 - 09:10:14, Dibaca 298.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Lampung Timur 2021-2026	<p>Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Lampung Timur 2021-2026</p> <p>Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Bappeda Provinsi Lampung menghadiri secara virtual Forum Konsultasi Rencana Awal Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur 2021-2026, di Ruang Rapat Haris Hasyim Lantai 1 Bappeda Provinsi Lampung, Kamis (22 /4/2021).</p> <p>Dalam Arahnya Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menyampaikan beberapa catatan terhadap penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur, yaitu rekomendasi KLHS, penyajian tabel agar mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017, dan Proyeksi keuangan.</p> <p>"Ada sedikit catatan terhadap penyusunan yang telah dilakukan, kami mencatat bahwa perlunya rekomendasi KLHS yang harus ditambahkan pada Bab 4 dan juga penyajian tabel pada setiap Bab RPJMD agar mengacu kepada Permendagri 86 Tahun 2017. Proyeksi keuangan juga harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan segala aspek," ujar Kepala Bappeda.</p> <p>Selanjutnya, Kepala Bappeda juga menambahkan, "untuk mengukur capaian indikator kinerja utamanya, kami berharap nanti sesuai dengan 9 Misi Kabupaten Lampung Timur, bagaimana nanti mewujudkan BUMD, BUMDES yang ada. Tentunya ini harus, ini menjadi saran kami agar mempertimbangkan kembali Misi-misi yang ada agar lebih bersifat makro terhadap perwujudan Visi yang ada. untuk lebih memudahkan terhadap target capaian di Lampung Timur," ujarnya.</p> <p>Kabupaten Lampung Timur memiliki Visi "Rakyat Lampung Timur Berjaya" dengan 9 Misi yaitu peningkatan Program Petani Berjaya; peningkatan infrastruktur multi sektor berbasis pedesaan; Kualitas Kualitas SDM yang sehat, Peningkatan cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan; peningkatan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal; peningkatan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat; peningkatan good government (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab); menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal; peningkatan penanganan penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam; tata kelola pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.</p> <p>Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Lampung Timur ini, juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lampung Timur, Bappeda Kabupaten Lampung Timur, DPRD Kabupaten Lampung Timur, Asisten II dan III Kabupaten Lampung Timur, Kepala OPD Kabupaten Lampung Timur, Akademisi, Camat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Kabupaten Lampung Timur.</p>
3	27 April 2021	FGD Pembahasan Smart School Lampung Berjaya Provinsi Lampung	 <p>The image is a screenshot of a news article from the Bappeda Provinsi Lampung website. The article title is "FGD Pembahasan Smart School Lampung Berjaya Provinsi Lampung". The photo shows a group of people, including a man in a brown uniform and several women in hijabs, sitting around a table during a meeting. They are all wearing face masks. The man in the uniform is speaking into a microphone. The website header includes the Bappeda logo and navigation links: HOME, PROFIL, AGENDA, BERITA, LINK, DOKUMEN, PPD, KONTAK. The footer of the image shows the date and time: "Kamis 27 April 2021 - 08:50:51, Dibaca 174".</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		FGD Pembahasan Smart School Lampung Berjaya Provinsi Lampung	<p style="text-align: center;">FGD Pembahasan Smart School Lampung Berjaya Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung - Dalam rangka implementasi salah satu Agenda Kerja Gubernur Lampung Tahun 2019-2024 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas, Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan Program <i>Smart School</i> melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut Bappeda provinsi Lampung menyelenggarakan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> pembahasan <i>Smart School</i> Lampung Berjaya Provinsi Lampung tahun 2020-2024, di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (27/4/2021).</p> <p>Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung Eka Yuslita Dewi ini, dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Praktisi dibidang pendidikan, Akademisi, dan OPD Terkait.</p> <p>Dalam arahnya Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menyampaikan terimakasih dan apresiasi terhadap masukan-masukan terhadap Program <i>Smart School</i> yang disampaikan oleh para peserta yang hadir.</p> <p>"Sesuai amanah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bahwa sektor pendidikan merupakan urusan wajib dasar. Sehingga betapa pentingnya bicara tentang pendidikan. Seluruh pemangku sudah hadir di <i>FGD Smart School</i> ini. Saya berterimakasih dan mengapresiasi karena sudah memberikan masukan guna merumuskan dan menentukan kemana arahan kebijakannya," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p>Kepala Bappeda berharap <i>Smart School</i> sebagai suatu metode system yang berinovasi, berbeda, yang dibangun dengan adanya pembaharuan-pembaharuan oleh Provinsi Lampung dengan model yang jelas.</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung juga berharap, usulan-usulan yang disampaikan benar-benar dapat memberikan manfaat dan dapat memperbaiki Program <i>Smart School</i> agar lebih baik lagi.</p>

LAPORAN RILIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
MEI 2021

Laporan Rilis Bappeda Provinsi Lampung

Mei 2021

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
1	17 Mei 2021	Kepala Bappeda Pimpin Rapat Pembahasan Usulan Melalui Program SP3D PT. Bukit Asam Tahun 2021	 <p data-bbox="683 445 1428 470">BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG</p> <p data-bbox="911 455 1428 470">HOME • PROFIL • AGENDA • BERITA • LINK • DOKUMEN • PPIID • KONTAK •</p> <p data-bbox="715 854 916 866">Selasa 17 Mei 2021 - 10:47:28, Dibaca 108</p> <h3 data-bbox="683 880 1469 948">Kepala Bappeda Pimpin Rapat Pembahasan Usulan Melalui Program SP3D PT. Bukit Asam Tahun 2021</h3> <p data-bbox="683 983 1493 1144">Bandar Lampung - Dalam rangka menindaklanjuti arahan Gubernur Lampung terkait bantuan peran serta PT. Bukit Asam (Persero) Tbk kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebagai wujud pelaksanaan CSR PT. Bukit Asam melalui program Sumbangan Pihak Ketiga Daerah (SP3D), Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan rapat pembahasan bentuk bantuan yang akan diusulkan melalui Program SP3D PT. Bukit Asam Tahun 2021, serta evaluasi bantuan Tahun 2020, di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Provinsi Lampung, Senin (17/5/2021).</p> <p data-bbox="683 1175 1493 1267">"Kita bicara terkait usulan-usulan skala prioritas. Kita dorong usulan-usulan yang memang mempunyai peran terhadap kinerja lapangan. Dan Perlu diperhatikan juga setiap alokasi itu fokusnya apa, sehingga kita tahu dan manfaatnya jelas," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan saat menyampaikan arahannya.</p> <p data-bbox="683 1297 1493 1459">Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga menyampaikan perlu adanya skema usulan dan evaluasi ditahun sebelumnya. "Nanti kita coba buat skema usulan, Plan A seperti apa, Plan B seperti apa. Kemudian, apakah ditahun 2020 perlu adanya evaluasi kembali terhadap peruntukannya dan di 2021 ini akan ke mana arahnya. Hal ini menjadi penguatan terhadap CSR daripada PT Bukit Asam. Pemerintah daerah dapat memberikan <i>input</i> bagi PT Bukit Asam sehingga PT merasa nyaman bahwa CSR yang diberikan itu memiliki nilai manfaatnya," ujarnya.</p> <p data-bbox="683 1490 1493 1610">Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung ini, dihadiri oleh Plt. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Lampung, Kepala Biro Perencanaan Setda Provinsi Lampung, dan Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
2	18 Mei 2021	Percepat Pembangunan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Ajak Pemkab Lampung Utara Saling Bersinergi	 <p data-bbox="826 676 979 690">Rabu 18 Mei 2021 - 11:31:38, Dibaca 468</p> <p data-bbox="770 697 1382 752">Percepat Pembangunan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Ajak Pemkab Lampung Utara Saling Bersinergi</p> <p data-bbox="770 782 1437 860">Lampung Utara - Kepala Bappeda Provinsi Lampung menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi antara Bappeda Provinsi Lampung dan Bappeda Kabupaten Lampung Utara. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Bappeda Kabupaten Lampung Utara, Selasa (18/5/2021).</p> <p data-bbox="770 885 1437 932">Rapat yang dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Lampung Utara Azwar Yazid ini bertujuan untuk membahas terkait percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.</p> <p data-bbox="770 956 1437 1034">Dalam arahnya, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengajak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar saling bersinergi, berkolaborasi, dan menyamakan persepsi, guna mendorong percepatan pembangunan.</p> <p data-bbox="770 1058 1437 1105">"Ayo kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, dan menyamakan persepsi, untuk mendorong percepatan pembangunan," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p data-bbox="770 1130 1437 1269">Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga menyampaikan, untuk mempercepat pembangunan perlu adanya keselarasan antara visi-misi kabupaten/kota dengan provinsi dan pusat. Kemudian perlu adanya penguatan sosial budaya, penguatan SDM dan SDA, pemerataan ruang, inovasi dan kreatifitas, penguatan kompetensi, penguatan capaian RPJMD berbasis SDGs dan Renstra OPD, Strategi pengentasan kemiskinan melalui sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta memperkuat kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> yang ada.</p>
3	24 Mei 2021	Desk Pembahasan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022	 <p data-bbox="794 1770 979 1784">Kamis 24 Mei 2021 - 12:09:23, Dibaca 167</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Desk Pembahasan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022	<p>Desk Pembahasan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022</p> <p>Bandar Lampung - Dalam rangka penyusunan penetapan Pagu prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Lampung TA 2022, Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan Pembahasan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 di Command Center Bappeda Provinsi Lampung, selama Empat Hari 24 sampai 28 Mei 2021.</p> <p>Kegiatan ini membahas terkait Renja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta dukungan terhadap agenda kerja utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada Provinsi Lampung.</p> <p>Peserta pada Desk tersebut terdiri dari Bappeda Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung, Pakar dibidang Ekonomi dari Unila, dan 19 Perangkat Daerah yaitu Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, Dinas PKPCP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas PMD dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Ketahanan Pangan dan TPH, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Pengelolaan SDA.</p>
4	26 Mei 2021	Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting	 <p>Rabu 26 Mei 2021 - 03:32:50, Dibaca 92</p> <p>Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting, Wagub Lampung Beri Apresiasi ke Kabupaten Lokus</p> <p>Bandar Lampung - Upaya penanganan dan penurunan stunting merupakan program prioritas di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah dengan indikator yang telah tertuang dalam dokumen RPJMN maupun RPJMD Tahun 2020-2024. Di tingkat Provinsi, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi serta percepatan penurunan stunting.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		<p>Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting</p>	<p>Mengingat target penurunan angka stunting di Provinsi Lampung dalam RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 14%. Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan penilaian kinerja aksi konvergensi stunting kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2021 selama 2 hari sejak 24 - 25 Mei 2021 di Hotel Novotel Bandar Lampung, dengan objek kabupaten yang dinilai sebanyak 6 (enam) kabupaten lokus prioritas, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Utara, serta Pesawaran.</p> <p>"Kegiatan penilaian ini dilakukan sebagai aksi evaluasi untuk memberikan informasi dan intervensi spesifik maupun sensitif yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan dan pencegahan stunting secara lintas sektor. Adapun hasil evaluasi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten yang menjadi lokus sebagai perbaikan kinerja di tahun berikutnya dalam upaya penurunan stunting, serta bagi kabupaten non lokus dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan daya ungkit untuk diterapkan di wilayahnya masing-masing," ujar Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim saat menyampaikan arahannya.</p> <p>Wakil Gubernur Lampung berharap pelaksanaan kegiatan penilaian ini mampu meningkatkan motivasi dan semangat Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting di wilayahnya masing-masing sehingga dapat menurunkan angka stunting di Provinsi Lampung sesuai dengan target yang telah ditetapkan.</p> <p>"Kita berharap kedepan tidak ada lagi anak-anak kita yang terkena stunting dan kami mengapresiasi secara khusus kepada kepala daerah yang sudah memberikan perhatiannya. Karena ini memang bukan termasuk isu-isu seksi, mungkin termasuk isu yang tidak populer, tidak semua warga tahu dan peduli, namun ditengah itu semua kepala daerah mau memberikan perhatiannya secara konkret. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim yang terlibat atas perhatiannya terhadap penurunan angka stunting di provinsi lampung," tambahnya.</p> <p>Mewakil Kepala Bappeda Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia Pelaksana Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2021, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Mousia Bappeda Provinsi Lampung Eka Yuslita Dewi juga menyampaikan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu mengukur tingkat kinerja, memastikan akuntabilitas kinerja, mengevaluasi serta mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Provinsi Lampung.</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan secara online dan offline ini, dihadiri oleh Tim Tenaga Ahli LGCB-ASR (Local Government Capacity Building for Acceleration of Stunting Reduction) Direktorat Jenderal Bina Bangsa; Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; Kepala Bappeda Kabupaten se-Provinsi Lampung; Tim Penilai Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Provinsi Lampung.</p>

LAPORAN RILIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
JUNI 2021

Laporan Rilis Bappeda Provinsi Lampung

Juni 2021

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
1	2 Juni 2021	Ranwal RPJMD Kota Metro 2021-2026	 <h3 data-bbox="647 895 1046 923">Ranwal RPJMD Kota Metro 2021-2026</h3> <p data-bbox="647 948 1490 1103">Bandar Lampung - Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung Marlina Emidianti memimpin Rapat Konsultasi Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro 2021-2026 di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (2/6/2021). Peserta pada kegiatan ini yaitu Bappeda dan OPD Kota Metro, serta Tim Konsultasi RPJMD Kabupaten/Kota terdiri dari Bappeda Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung, BPKAD Provinsi Lampung, Bapenda Provinsi Lampung, Balitbangda Provinsi Lampung, dan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.</p> <p data-bbox="647 1124 1490 1226">Kegiatan yang bertujuan untuk menjabarkan dan untuk memperoleh masukan-masukan terkait visi dan misi serta program Kepala Daerah Kota Metro sebagai pedoman arah pembangunan jangka waktu Lima Tahun ke depan. Visi dan misi serta program Kepala Daerah Kota Metro dijabarkan oleh Kepala Bappeda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo.</p> <p data-bbox="647 1246 1490 1377">"Dokumen RPJMD Kota Metro 2021-2026 disusun bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis, serta merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk Lima Tahun ke depan. Menjadi instrumen dalam pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Menjadi instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Lima Tahun ke depan. Serta menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan lainnya," jelas Kepala Bappeda Kota Metro.</p> <p data-bbox="647 1398 1490 1582">Dalam Dokumen RPJMD Kota Metro 2021-2026, Visi Pemerintah Daerah Kota Metro yaitu "Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya, dengan Lima Misi yaitu Mewujudkan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan yang Berdaya Saing, Mewujudkan Masyarakat Sehat Jasmani, Rohani, dan Sehat Secara Sosial, Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik Secara Efektif, Efisien, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, Meningkatkan Masyarakat Produktif Berdaya Saing dalam Bidang Teknologi, Inovasi, dan Ekonomi Kreatif, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Terhormat dan Bermartabat.</p> <p data-bbox="647 1602 1490 1704">Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung Marlina Emidianti dalam arahannya juga menyampaikan, bahwa tahapan Konsultasi Ranwal RPJMD Kota Metro 2021-2026 ini, bukan sebagai pertemuan akhir terkait pembahasan Konsultasi Ranwal RPJMD Kota Metro, akan tetapi akan ada pertemuan lanjutan, yaitu evaluasi hasil pertemuan Konsultasi Ranwal RPJMD.</p> <p data-bbox="647 1725 1490 1806">Selain itu, Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung juga berharap konsultasi ini, bisa dipergunakan semaksimal mungkin, dalam rangka untuk mencapai visi-misi yang tertuang di dalam RPJMD.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
2	11 Juni 2021	Pembahasan Integrasi /Penambahan Menu Evaluasi Pembangunan Daerah Dalam Aplikasi SIPPKD Provinsi Lampung	 <p>Pembahasan Integrasi /Penambahan Menu Evaluasi Pembangunan Daerah Dalam Aplikasi SIPPKD Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung - Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Pembangunan Marlina Emidianti memimpin Rapat Pembahasan Integrasi /Penambahan Menu Evaluasi Pembangunan Daerah dalam Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan (SIPPKD) Provinsi Lampung di Ruang Rapat Haris Hasyim Lantai 1 Bappeda Provinsi Lampung, Jumat (11/6/2021).</p> <p>Rapat dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan/sub kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, serta untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi kinerja dan anggaran perangkat daerah ini, dihadiri oleh Bappeda Provinsi Lampung, BPKAD Provinsi Lampung, dan Tim pengembang SIPPKD.</p> <p>"Sistem aplikasi ini terdiri dari dua institusi yaitu Bappeda dan SIPPKD, kemudian ada penambahan menu monev, artinya nanti menu kami Bappeda ada perencanaan dan monev, kedepan diperlukan kecepatan dalam mengakses atau memperoleh data dari aplikasi ini," ujar Marlina.</p> <p>Selain itu ia juga berharap agar Bappeda diberikan Tim dari SIPPKD yang berfokus di Bappeda, untuk mempermudah dalam berkoordinasi dan berdiskusi terkait pengembangan aplikasi, sehingga kedepan menjadi lebih baik lagi.</p>
3	11 Juni 2021	Verifikasi Dan Kesepakatan Usulan DAK Bidang Jalan TA. 2022 Lingkup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		<p>Verifikasi Dan Kesepakatan Usulan DAK Bidang Jalan TA. 2022 Lingkup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung</p>	<p>Verifikasi Dan Kesepakatan Usulan DAK Bidang Jalan TA. 2022 Lingkup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan verifikasi dan kesepakatan usulan DAK bidang jalan TA. 2022 lingkup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung ini dihadiri oleh Dinas BMBK Provinsi Lampung Bappeda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dan Dinas PU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.</p> <p>Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung Ahmad Lianurzen ini, bertujuan untuk membahas prioritas usulan sekaligus penandatanganan Berita Acara Kesepakatan hasil verifikasi usulan DAK bidang jalan TA. 2022 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.</p> <p>Dalam sambutannya Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung Ahmad Lianurzen menyampaikan, Arah kebijakan DAK jalan tahun 2022 yaitu DAK Reguler terdiri dari meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi dan kab/kota, meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah. Kemudian DAK Penugasan (Tematik), terdiri dari penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan sentra industri kecil menengah, pengembangan 5 Food Estate dan Sentra Produksi Pangan, serta peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.</p>
4	14 Juni 2021	<p>Ranwal RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026</p>	 <p>Ranwal RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026</p> <p>Bandar Lampung - Konsultasi Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran 2021-2026 di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Senin (14/6/2021).</p> <p>Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomia Bappeda Provinsi Lampung Bobby Irawan ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung, Bapenda Provinsi Lampung, dan Bappeda Kabupaten Pesawaran.</p> <p>"Tujuan kita hari ini tidak terlepas, sebagai forum komunikasi untuk menyamakan frekuensi, agar menjadi bahan masukan terhadap penyajian konsep Ranwal RPJMD Kabupaten Pesawaran," Ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan saat menyampaikan arahnya.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Ranwal RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026	<p>Selain itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga menegaskan agar sistematika penyusunan Dokumen RPJMD harus sesuai dan mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 dan memperhatikan dan mempertimbangkan terkait isu-isu KLHS dan Isu Pembangunan Berkelanjutan/SDGs.</p> <p>"Sistematika penyajian Dokumen RPJMD Kabupaten Pesawaran diwajibkan sudah mengacu pada format Permendagri 86 Tahun 2017. Jangan sampai nanti antar kabupaten/kota berbeda," Ujarnya.</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus mendorong hal-hal yang menjadi isu utama ke arah yang lebih baik lagi. Visi Pemerintah Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026 yaitu "Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif" dengan 5 misi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berkinerja tinggi. 2. Menyediakan sarana dan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkualitas yang berkeadilan dan merata. 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing. 4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah. 5. Mewujudkan Desa Mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasayarakatan dan potensi lokal yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika.
5	15 Juni 2021	Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022	 <p>Rabu 15 Juni 2021 - 15:56:52, Dibaca 100</p> <h3>Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022</h3> <p>Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2022 di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (15/6/2021). Rapat yang dilaksanakan secara online dan offline ini dibuka oleh Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Nyoto Suwignyo.</p> <p>Dalam arahnya Nyoto Suwignyo menyampaikan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan 4 tujuan yaitu 1) melihat konsistensi dan target program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun pelaksanaan; 2) melihat karakteristik perencanaan dari rekapitulasi jumlah program/kegiatan/subkegiatan dan pagu RKPD tahun 2022; 3) melihat dukungan output kegiatan dan outcome program terhadap pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; serta 4) melihat dukungan program dan kegiatan RKPD 2022 terhadap prioritas nasional atau program prioritas nasional 2022.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		<p>Fasilitasi Rancangan Akhir RKPDP Provinsi Lampung Tahun 2022</p>	<p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mewakili Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan proses penyusunan Dokumen RKPDP Provinsi Lampung bersifat inklusif yaitu melibatkan masyarakat, akademisi, LSM, dan juga korporat se-Provinsi Lampung dalam rangka memberikan yang terbaik terhadap kualitas Dokumen RKPDP Provinsi Lampung Tahun 2022.</p> <p>Adapun Tema RKPDP Provinsi Lampung Tahun 2022 yaitu "Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan SDM Berkualitas," dengan 6 prioritas pembangunan.</p> <p>"Apa yang menjadi tema RKPDP Provinsi Lampung Tahun 2022 selaras dengan RKP 2022 yaitu "Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan SDM Berkualitas." Dari tema yang ada Provinsi Lampung memiliki 6 prioritas pembangunan di tahun 2022, yang pertama dalam rangka menjabarkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden dan transformasi ekonomi yaitu meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan. Demikian juga terkait kualitas SDM menjadi prioritas kami Tahun 2022. Terkait pembangunan infrastruktur, ini sesuai dengan arahan presiden dan juga prioritas nasional. Selanjutnya terkait reformasi birokrasi, sudah sejalan dan selaras dengan arahan presiden maupun dalam prioritas nasional. Kemudian berkenaan dengan kehidupan masyarakat yang religius, aman, dan berbudaya, ini menjadi pakem kami terhadap misi ke satu Bapak Gubernur dan juga menjadi prioritas tahun 2022. Yang terakhir yaitu isu lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana. Kami berharap bahwa pembangunan di Provinsi Lampung harus tetap memperhatikan isu-isu lingkungan agar pembangunan juga diatur secara berkelanjutan," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan.</p> <p>Selanjutnya, Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga menyampaikan sasaran makro pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 disepakati dengan mempertimbangkan arahan dari berbagai pihak, seperti Bank Indonesia Perwakilan Lampung, BPS Provinsi Lampung, dan para akademisi yang ada di Provinsi Lampung. "Sasaran Makro untuk pertumbuhan ekonomi berkisar 4,3-5,3. Inflasi berkisar 3,0 ± 1%. PDRB per Kapita diharapkan meningkat 45-58. Tingkat pengangguran terbuka diharapkan mengecil 4-4,5. Tingkat kemiskinan menurun 11,7-12,2. IPM kami optimis mencapai 71,49. Indeks Gini kami coba pada kisaran 0,320-0,330. Sektor pertanian atau nilai tukar petani kami mencoba untuk mencapai 105. Di bidang infrastruktur terkait tingkat kemandirian jalan, meskipun dengan keterbatasan kami tetap optimis mencapai 72,34," ujarnya.</p> <p>Rapat yang difasilitasi oleh Mendagri ini, diikuti oleh 48 Perangkat Daerah di Provinsi Lampung. 16 Perangkat Daerah mengikuti secara offline, dan 32 secara online.</p>
6	16 Juni 2021	RKPDP Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022	 <p>Sabtu 16 Juni 2021 - 12:57:43, Dibaca 110</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022	<p>RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022</p> <p>Bandar Lampung – Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung Belli Pahlupi memimpin Rapat Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung Lantai 3, Rabu (16/6/2021).</p> <p>Rapat ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tulang Bawang bersama OPD Terkait, Bidang Teknis dan UPTD Pusdatin Bangda, serta Fungsional Bappeda Provinsi Lampung, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Bapenda Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.</p> <p>Dalam arahnya Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang diwakili oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Sisilia Novitasirie menyampaikan terkait Tema, Sasaran Makro, Isu Strategis, dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang 2022.</p> <p>Tema Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang 2022 <i>“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan Kualitas SDM menuju Tulang Bawang Aman, Mandiri dan Sejahtera.”</i> Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang 2022 yaitu Pertumbuhan Ekonomi 5,2 -5, 93 %, Inflasi 2,0-4,0 %, Tingkat Kemiskinan 8,59-8,16 %, Indeks Pembangunan Manusia 68,79, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,02.</p> <p>Selanjutnya, Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang 2022, terdiri dari 25 Program Unggulan Bergerak Melayani Warga (BMW) Kabupaten Tulang Bawang, Pemulihan Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia.</p> <p>25 Program Unggulan Bergerak Melayani Warga (BMW) Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Pemberian Dana Alokasi Kampung BMW, Rata-Rata 500 Jt Per Kampung, Pembangunan Irigasi Pertanian, Air Bersih, Infrstruktur Lainnya serta Pembangunan Pertanian Bantuan Bibit dan Sarana Pendukung Pertanian, Tulang Bawang Terang / Fasilitasi Kelistrikan, Peningkatan Pendapatan Aparatur Kampung, Bantuan Operasional Motor Kepala Dusun, Peningkatan Pelayanan Publik (Pembuatan Ktp, Kk, Akte Melalui E-Ktp Bmw Mobile/Layanan Kependudukan Keliling), Ambulance Gratis serta Sarana Prasarana Kesehatan Lainnya, Penurunan Tingkat Kematian Ibu dan Bayi (Gasibu), Tunjangan Khusus Bidan Desa dan Kader Posyandu, Bantuan Stimulan untuk 3 Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, Beasiswa Berprestasi untuk Keluarga Tidak Mampu, Peningkatan Mutu Tenaga Pengajar Melalui Bantuan Laptop, Peningkatan Kesejahteraan untuk Tenaga Honorer Kesehatan dan Pendidikan, Penyesuaian Ijazah Bagi PNS, Santunan Kematian, Bantuan Sarana Peribadatan, Insentif Pemuka Agama/Guru Ngaji, Pengurus Makam, Penyandang Disabilitas, dan Babinsa/Babinkamtibmas, Bantuan untuk Madrasah, Pondok Pesantren, Honor Guru Paud dan TPQ, Dukungan Kepada Universitas Megow Pak, Fasilitasi Ketersediaan Sarana GSG untuk Balai Musyawarah Kampung, Kegiatan Agama, Dll, Keringanan PBB Bagi Keluarga Tidak Mampu, Bedah Rumah Bagi Masyarakat Miskin.</p>
7	17 Juni 2021	Fasilitasi RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022	 <p>The screenshot shows the Bappeda Provinsi Lampung website with a navigation menu (HOME, PROFIL, AGENDA, BERITA, LINK, DOKUMEN, PPID, KONTAK) and a news article titled 'Fasilitasi RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022'. The article features a photograph of two individuals, a man and a woman, seated at a long table during a meeting. The man is wearing a patterned batik shirt and glasses, while the woman is wearing a blue hijab and a light blue face mask. They are both looking towards the camera. The table in front of them has microphones, water bottles, and some documents. The background is a dark wood-paneled wall.</p> <p>Sobtu 17 Juni 2021 - 13:12:08, Dibaca 91</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Fasilitasi RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022	<p>Fasilitasi RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022</p> <p>Bandar Lampung - Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung Eka Yuslita Dewi memimpin Rapat Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung Lantai 3, Kamis (17/6/2021).</p> <p>Rapat yang dihadiri oleh Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran bersama jajarannya, Bidang Teknis dan UPTD Pusdatin Bangda, serta Fungsional Bappeda Provinsi Lampung, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Bapenda Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.</p> <p>Dalam arahannya Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran Fisky Firdous menyampaikan terkait Isu Strategis, Tema, Prioritas Pembangunan, Target Sasaran Kinerja Ekonomi, Target Pembangunan, Kapasitas Fiskal, dan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran.</p> <p>Tema Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 "Mempercepat Pemulihan Ekonomi Berkualitas dan Kehidupan Masyarakat untuk Mewujudkan Masyarakat Pesawaran Lebih Maju, Sejahtera dan Produktif."</p> <p>Selanjutnya terkait, Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran terdiri dari Pengembangan Perkotaan Gedong Tataan; Pembangunan KI Tegineneng; Pembangunan Kek Pariwisata Teluk Pandan; Pembangunan Andan Jejama Horti Park Desa Negeri Sakti; Pengembangan Kampung Kakao Desa Sungai Langka Dan Desa Wlyono.</p>
8	17 Juni 2021	Fasilitasi RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022	 <p>Fasilitasi RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022</p> <p>Bandar Lampung - Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung Lantai 3, Kamis (17/6/2021).</p> <p>Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung Marlina Emidianti ini membahas terkait Tema, Program Prioritas Pembangunan, Sasaran Pembangunan dan</p> <p>Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022. Pokok-pokok pembahasan tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan Wahidin Amin.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Fasilitasi RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022	<p>Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022, yaitu "Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Potensi Wilayah dan Peningkatan Kualitas SDM," dengan 5 prioritas pembangunan yaitu Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur kabupaten dan desa; Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; Penurunan kemiskinan melalui efektivitas bantuan sosial dan peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan dan UMKM; Peningkatan investasi melalui pengederhanaan regulasi dan pemanfaatan potensi sumber daya alam wilayah dan lingkungan yang berkelanjutan; Peningkatan profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.</p> <p>Selanjutnya, Sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,2 - 5,6; PDRB ADHB (Milyar Rupiah) 47.500 - 48.500; Laju Inflasi (%)3,0 + 1; PDRB ADHB per Kapita (Rupiah/Jiwa) 2022 → 47.500.000 - 48.500.000; Tingkat Kemiskinan (%)12,5 - 13; Indeks Pembangunan Manusia 69,36; Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,50.</p> <p>Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari Kebun Edukasi Lampung Selatan yaitu Pemanfaatan lahan kosong di Areal Rumah Dinas Bupati sebagai Sarana Edukasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekitar dan Menjaga Imunitas di Era Covid-19; Program swasembada gizi dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sampai tercapainya target desa bebas stunting terlaksana sampai Tahun 2024; Terapi Sentuh Stimulasi Somatosentrik (Tersentuh Sentrik) yang dilaksanakan di RSUD Bab Bazar merupakan satusatunya di Provinsi Lampung yang melakukan terapi tumbuh kembang anak; Aplikasi Sanitasi Layak dan Aman (SALAMAN) merupakan aplikasi untuk Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT); Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa (Paikde) dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (Paikde Oli), selanjutnya akan membentuk UPT Disdukcapil di Kecamatan; SIPD dan e-Pengendalian (Si Perindu) dalam upaya integrasi perencanaan pembangunan (ePlanning), penganggaran (e-Budgeting) dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan daerah; Mobil pelayanan perizinan keliling dan Online Single Submission (OSS) untuk memudahkan perizinan dan investasi bagi masyarakat dan badan usaha untuk berinvestasi.</p> <p>Rapat ini dihadiri oleh Bappeda Kabupaten Lampung Selatan beserta OPD Terkait, Bidang Teknis dan UPTD Pusdatin Bangda, ungsional Bappeda Provinsi Lampung, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Bapenda Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.</p>
9	17 Juni 2021	Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020 dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021	 <p>The image shows a screenshot of the BAPPEDA Provinsi Lampung website. At the top, there is a navigation menu with links: HOME, PROFIL, AGENDA, BERITA, LINK, DOKUMEN, PPD, and KONTAK. Below the menu is a large photograph of a meeting in progress. Several people are seated around a long table, some wearing face masks. The meeting appears to be a formal discussion or evaluation session. Below the photo, there is a small caption: "Sabtu 17 Juni 2021 - 13:00-46, Dibaca 98".</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020 dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021	<p>Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020 dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021</p> <p>Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020 dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Lampung Timur, di Ruang Rapat <i>Command Center</i> Bappeda Provinsi Lampung Lantai I, Kamis (17/6/2021).</p> <p>Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan ini, membahas terkait <i>Kick Off</i> Aplikasi SIMNANGKIS (Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan) dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan oleh 4 Kabupaten (agar dapat membawa data rekap progress penyerapan dan pemanfaatan/pencairan Bansos/Sembako).</p> <p>Kegiatan yang juga dimoderatori oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung Eka Yuslita Dewi Kegiatan ini, dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Lampung Faizal, Bappeda dan Dinas Sosial dari 4 Kabupaten terkait.</p>
10	18 Juni 2021	Fasilitasi RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2022	 <p>Minggu 18 Juni 2021 - 14:54:36, Dibaca 42</p> <p>Fasilitasi RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2022</p> <p>Bandar Lampung - Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung Lantai 3, Jumat (18/6/2021).</p> <p>Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung Ahmad Lianurzen ini membahas terkait Tema, Sasaran Makro Pembangunan, dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2022. Pokok-pokok pembahasan tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Pringsewu Akhmad Fadoli.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Fasilitasi RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2022	<p>Tema Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 "Optimalisasi Pertumbuhan yang Berkualitas dan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Infrastruktur dan SDM yang Berkarakter" dengan 5 Prioritas Pembangunan yaitu Peningkatan Ketahanan Perekonomian Daerah; Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis; Peningkatan SDM yang Unggul; Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup; Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kehidupan yang Harmonis.</p> <p>Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten Pringsewu, Bidang Teknis dan Fungsional Bappeda Provinsi Lampung, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Bapenda Provinsi Lampung, Balitbangda Provinsi Lampung.</p>
11	21 Juni 2021	Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Fasilitasi RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2022	 <p>Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2022</p> <p>Bandar Lampung - Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung Lantai 3, Senin (21/6/2021).</p> <p>Kegiatan yang membahas terkait Dokumen RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 ini, dimoderatori oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung Evie Fatmawaty, dan dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, Kepala Bappeda Kabupaten Tanggamus Hendra Wijaya, dan OPD terkait.</p> <p>Dalam paparannya Kepala Bappeda Kabupaten Tanggamus menyampaikan terkait Tema, Sasaran Makro, dan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.</p> <p>Tema RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 "Pemulihan Ekonomi Dan Peningkatan Daya Saing Daerah," dengan Sasaran Makro yaitu Pertumbuhan Ekonomi : 4,0 - 4,5%, Tingkat Kemiskinan : 10,94 - 11,25%, Tingkat Pengangguran Terbuka : 2,90 - 3,50, Indeks Pembangunan Manusia : 66,57 - 66,65, Rasio Gini : 0,336 - 0,339.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
			<p>Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 terdiri dari Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas Kewilayahan; Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; Meningkatkan nilai tambah ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan; Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana; Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan Memperkuat stabilitas kamtibmas.</p>
12	22 Juni 2021	Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022	 <p>Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022</p> <p>Bandar Lampung - Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung Lantai 3, Selasa (22/6/2021).</p> <p>Kegiatan ini membahas terkait Pokok-Pokok Dokumen RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022, terdiri dari Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan.</p> <p>Tema RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 "Peningkatan Kualitas SDM dan Pemulihan Ekonomi Untuk Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing" dengan Prioritas Pembangunan Daerah yaitu Pemulihan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat; Jaring Pengaman Sosial dan Pengembangan Ekonomi Rakyat Kreatif; Pembangunan SDM Berkarakter dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar; Pengembangan Ekowisata dan Pelestarian Budaya; Pengembangan Infrastruktur; Reformasi Birokrasi.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
13	23 Juni 2021	Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2022	 <p data-bbox="730 737 940 752">Minggu 23 Juni 2021 - 15:07:22, Dibaca 54</p> <h3 data-bbox="660 762 1318 793">Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2022</h3> <p data-bbox="660 827 1501 921">Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan memimpin Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mesuji Tahun 2022 di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung Lantai 3, Rabu (23/6/2021).</p> <p data-bbox="660 966 1501 1160">Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 yaitu Penguatan pemerataan infrastruktur daerah; Pembangunan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada peningkatan produksi dan pengolahan pertanian, kewirausahaan, pariwisata serta Jaring pengaman sosial; Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan; Peningkatan sumber daya manusia berbasis keterampilan dan vokasi; Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Mesuji Abu Rosid Istomi.</p> <p data-bbox="660 1191 1501 1285">Dalam Kegiatan tersebut hadir oleh Bappeda Kabupaten Mesuji dan OPD terkait, Bidang Teknis dan Fungsional Bappeda Provinsi Lampung, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Bapenda Provinsi Lampung, Balitbangda Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.</p>
14	25 Juni 2021	Kepala Bappeda Melantik 10 Pejabat Fungsional Perencana di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung	 <p data-bbox="772 1810 959 1825">Minggu 25 Juni 2021 - 15:10:05, Dibaca 69</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Kepala Bappeda Melantik 10 Pejabat Fungsional Perencana di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung	<p>Kepala Bappeda Melantik 10 Pejabat Fungsional Perencana di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 10 Pejabat Fungsional Perencana di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung, Jumat (25/6/2021). Kegiatan yang dihadiri oleh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana Bappeda Provinsi Lampung ini, dilaksanakan di Ruang Rapat Almuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung Lantai 3.</p> <p>10 Pejabat Fungsional Perencana yang dilantik oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan ini, terdiri dari 7 Perencana Madya, 2 Perencana Muda, dan 1 Perencana Pertama. Dari 10 Pejabat Fungsional yang dilantik, 9 hadir secara offline, dan 1 hadir secara online melalui zoom meeting, dikarenakan sedang mengikuti Diklat Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Palembang, Sumatera Selatan.</p> <p>Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menyampaikan ucapan selamat kepada Pejabat Fungsional Perencana yang baru saja dilantik, dan berpesan agar seluruh Pejabat Fungsional Perencana di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung selalu berupaya meningkatkan kompetensi dan keahlian terutama di bidang perencanaan serta meningkatkan produktivitas dan profesionalisme kerja demi terwujudnya Lampung Berjaya.</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga berharap ke depan seluruh tugas yang menjadi kewenangan Pejabat Fungsional Perencana di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung dapat dituntaskan sebaik-baiknya melalui kerja cerdas, kerja keras, serta jujur dalam tindakan dan ikhlas dalam pengabdian.</p> <p>"kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik, saya yakin saudara saudara telah memiliki pengalaman kerja yang cukup. Sehingga diharapkan ke depan seluruh tugas yang menjadi kewenangan saudara dapat dituntaskan sebaik-baiknya melalui kerja cerdas, kerja keras, serta jujur dalam tindakan dan ikhlas dalam Pengabdian," tutur Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p>
15	28 Juni 2021	Kepala Bappeda Provinsi Lampung Menghadiri Pembukaan Musrenbang RPJMD Lampung Selatan 2021-2026	

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		Kepala Bappeda Provinsi Lampung Menghadiri Pembukaan Musrenbang RPJMD Lampung Selatan 2021-2026	<p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung Menghadiri Pembukaan Musrenbang RPJMD Lampung Selatan 2021-2026</p> <p>Lampung Selatan - Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 di Aula Rimau Bappeda Lampung Selatan, Senin (28/6/2021).</p> <p>Dalam arahannya Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menyampaikan perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik juga daya saing daerah.</p> <p>Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermato ini, dihadiri oleh Forkapimda Lampung Selatan, DPRD Lampung Selatan, OPD, Camat, Ormas, dan Akademisi.</p>
16	30 Juni 2021	Pra-Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	 <p>Pra-Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024</p> <p>Bandar Lampung - Rapat Pra-Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 di Ruang Rapat Command Center Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (30/6/2021).</p> <p>Rapat yang bertujuan untuk melaksanakan Pra-Validasi terkait penyusunan dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ini, dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Bidang Teknis Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Lampung, Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dan Pemerhati Lingkungan Hidup.</p> <p>Dalam paparannya Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menyampaikan, tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen KLHS yaitu dengan melakukan analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk mendapatkan "TPB Prioritas". Untuk mendapatkan TPB Prioritas, dilakukan 3 analisis yaitu : Uji silang isu 6 kajian muatan lingkungan hidup terhadap 17 Goals SDGs/TPB, Gap antara capaian TPB Provinsi Lampung tahun 2019 terhadap target TPB Nasional di tahun 2024 , Uji silang isu yang terdapat di dalam dokumen perencanaan (RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Visi-Misi Gubernur) terhadap TPB.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		<p>Pra-Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024</p>	<p>Selanjutnya, Dari hasil Konsultasi Publik didapatkan 37 isu pembangunan, kemudian dilakukan <i>overlay</i> dengan 6 kajian muatan lingkungan hidup, sehingga didapatkan 7 isu muatan lingkungan hidup. 7 isu muatan tersebut di uji silang dengan 17 Goals SDGs/TPB dan dilakukan pemeringkatan/ranking. Analisis selanjutnya melakukan penilaian rentang gap indikator SDGs/TPB Provinsi Lampung Tahun 2019 yang tidak tercapai terhadap target SDGs Nasional di Tahun 2024 serta dilakukan pemeringkatan/ranking.</p> <p>Analisis selanjutnya adalah merumuskan isu yang terdapat di dalam Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Visi-Misi Gubernur sehingga disintesisikan menjadi 8 isu berdasarkan dokumen perencanaan. Langkah selanjutnya melakukan uji silang 8 isu dokumen perencanaan terhadap 17 Goals SDGs/TPB dan pemeringkatan/ranking.</p> <p>"Dari 3 analisis tersebut, dilakukan pemeringkatan isu TPB untuk mendapatkan isu prioritas dan berdasarkan ranking didapatkan 5 isu TPB Prioritas yaitu : TPB 1 Tanpa Kemiskinan; TPB 2 Tanpa Kelaparan; TPB 9 industri, inovasi dan infrastruktur; TPB 11 Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan; TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p>

LAPORAN RILIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
JULI-DESEMBER 2021

LAPORAN RILIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
JULI 2021

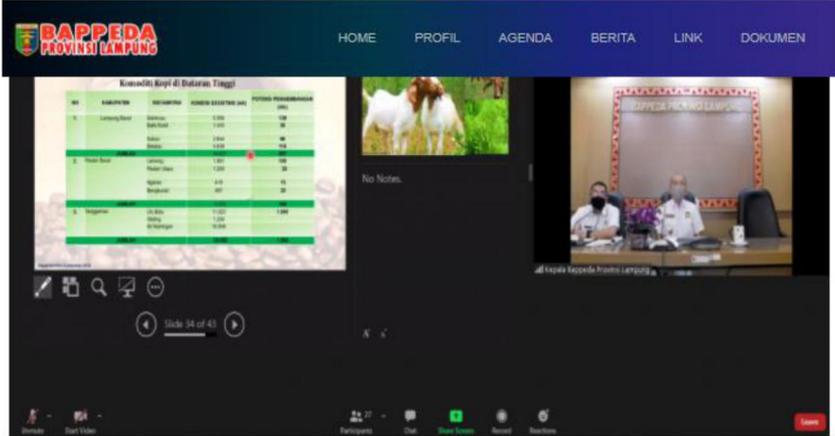
Laporan Rilis Bappeda Provinsi Lampung

Juli 2021

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
1	02 Juli 2021	<p>Tindak Lanjut Pengembangan Aerocity Bandara Radin Inten II</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-tindak-lanjut-pengembangan-aerocity-bandara-radin-inten-ii.html#ixzz7IrLXRNM6</p>	 <p>Tindak Lanjut Pengembangan Aerocity Bandara Radin Inten II</p> <p>Bandar Lampung – Dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pengembangan Kawasan Aerocity dan Kawasan Kesehatan Internasional di Kawasan Bandara Radin Inten II Lampung, Bappeda provinsi Lampung bersama OPD dan Stakeholder terkait melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rencana Pengembangan Aerocity di Kawasan Bandara Radin Inten II Lampung, Jumat (2/7/2021).</p> <p>Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung Ahmad Lianurzen ini, dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Bappeda Provinsi Lampung dan dihadiri oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Dinas BMBK Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah II, dan General Manager Bandara Radin Inten II PT. Angkasa Pura II (Persero).</p> <p>Dalam arahnya Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung Ahmad Lianurzen menyampaikan, Menindaklanjuti Kunjungan Kerja Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Koperasi dan UMKM di Bandara Internasional Radin Inten II, telah dilakukan pembahasan teknis antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Angkasa Pura II (persero) tentang konsep Desain Awal (preliminary) Pusat Kesehatan Internasional di Kawasan Bandara Radin Inten II dan Rencana Kesepakatan Bersama (MoU).</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung juga menyampaikan usulan Aerocity Pengembangan Bandara Radin Inten II oleh Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Lahan Eksisting 80,1 Ha, Perjanjian KSP 30 Tahun, Konsep Kemitraan terdiri dari Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
2	06 Juli 2021	<p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung Membuka Acara Regional Coordination Meeting (RCM) IV ISAI IPDMIP Regional 3</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-kepala-bappeda-provinsi-lampung-membuka-acara-regional-coordination-meeting-rcm-iv-isai-ipdmip-regional-3.html#ixzz7IrOQMHDJ</p>	 <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung Membuka Acara Regional Coordination Meeting (RCM) IV ISAI IPDMIP Regional 3</p> <p>Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan membuka acara Regional Coordination Meeting (RCM) IV Institutional Strengthening For Agricultural Irrigation (ISAI) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) Regional 3 Lampung, Jawa Barat dan Banten di Swiss Bell Hotel Lampung, Selasa (6/7/2021).</p> <p>“Pelaksanaan IPDMIP merupakan salah satu wujud fasilitasi pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi di daerah sebagai bagian dari amanat pelaksanaan urusan wajib daerah bidang pekerjaan umum. Selain itu juga sebagai amanat dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pertanian yang membutuhkan <i>input</i> penyediaan air dalam proses peningkatan produktivitas hasil pertanian. Pelaksanaan IPDMIP Sub Regional Lampung dengan basis Daerah Irigasi (DI) dilaksanakan di 2 Di Kewenangan Pusat, 5 Di Kewenangan Provinsi dan 37 Di Kewenangan Kabupaten sehingga total ada 44 DI,” ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung dalam sambutannya.</p>

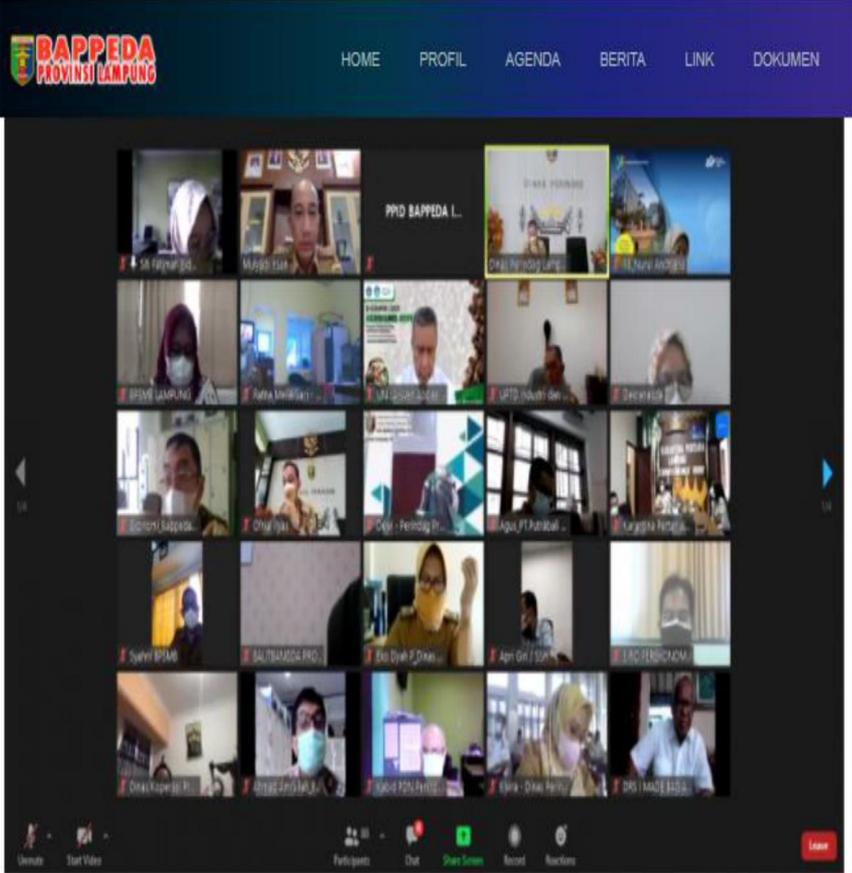
No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
			<p>Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan salah satunya adalah untuk menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air serta menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air, pendayagunaan Sumber Daya Air dan mengendalikan Daya Rusak Air.</p> <p>Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga berharap dengan terselenggaranya acara tersebut dapat diperoleh masukan untuk pembangunan sektor sumber daya air, terutama terkait pasca program IPDMIP yang akan berakhir di tahun 2022.</p> <p>RCM IV yang dilaksanakan secara offline dan online guna membahas progress pelaksanaan IPDMIP ini, dihadiri oleh NPIU Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri; Kepala Balai Besar Wilayah Sungai MesujiSekampung; Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum; Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy; Kepala Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisanggarung; Para pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten Peserta Program IPDMIP se-Provinsi Lampung; Para pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten Peserta Program IPDMIP di Regional 3 (Lampung, Jawa Barat, dan Banten); Para Konsultan Pusat dan Daerah di Regional 3.</p>
3	13 Juli 2021	<p>Musrenbang RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026</p> <p>Sumber Berita: Musrenbang RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 (lampungprov.go.id)</p>	 <p>Musrenbang RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026</p> <p>Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menghadiri secara online Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, di Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (13/7/2021). Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Kabupaten Lampung Timur Dawam Rahardjo.</p>

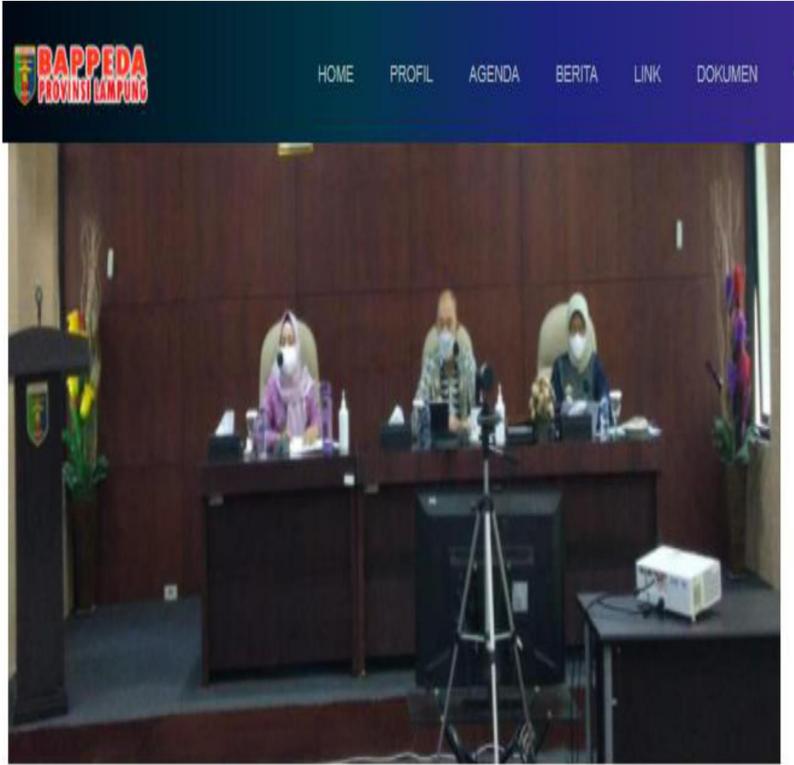
No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
			<p>Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 mengusung visi “Rakyat Lampung Timur Berjaya” dengan 9 misi yaitu Meningkatkan Program Petani Berjaya; Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis pedesaan; Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan; Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal; Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat; Meningkatkan good government (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab); Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal; Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam; Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.</p> <p>“Dalam Upaya mewujudkan Rakyat Lampung Timur Berjaya, diperlukan upaya percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur melalui kebijakan yang inklusif dengan meninjau Lapangan Usaha yang berperan signifikan dalam struktur ekonomi Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya perumusan kebijakan dan program dalam upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terutama pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja, yaitu peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja (Tenaga Kerja Lampung Timur terbesar pada sektor informal), kebijakan jangka pendek melalui pelaksanaan pembangunan project tertentu melalui Padat Karya, dan pengembangan wirausaha mandiri,” ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan.</p> <p>Selain itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga menyampaikan dalam mendukung pencapaian misi 3 RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026, perlu upaya percepatan peningkatan seluruh Komposit IPM dan menjadi isu strategis pembangunan yang didukung program prioritas, melalui peningkatan akses dan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas dan pemerataan guru, program kejar paket untuk penduduk usia 25 tahun ke atas.</p> <p>“Untuk mewujudkan Visi Rakyat Lampung Timur Berjaya agar menjadi fokus utama RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 dalam pengentasan kemiskinan dengan mengefektifkan pemanfaatan SIMNANGKIS. Serta diperlukan upaya terintegrasi untuk percepatan penurunan persentase penduduk miskin selama periode 2021-2026, program/kegiatan/sub Kegiatan lintas perangkat daerah agar mengarah pada penduduk miskin pada desil 1 dan desil 2 sebagaimana DTKS. Dan mengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan bagi penduduk miskin sesuai desil,” tambahnya.</p>
4	14 Juli 2021	Rakornis Pembahasan Usulan Pengembangan Kawasan Holtikultura, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi Lampung	 <p>Rakornis Pembahasan Usulan Pengembangan Kawasan Holtikultura, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi Lampung</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		<p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-rakornis-pembahasan-usulan-pengembangan-kawasan-hortikultura-perkebunan-dan-peternakan-provinsi-lampung.html#ixzz7IrrvOnpx</p>	<p>Bandar Lampung - Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan bersama Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung Bobby Irawan menghadiri secara online Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembahasan Usulan Pengembangan Kawasan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi Lampung di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (14/7/2021). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan (PLK) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemkenko Marves).</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung dalam paparannya menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan identifikasi lokasi calon pengembangan pertanian dan perkebunan pada wilayah dengan topografi berada pada ketinggian 800-1200 Meter diatas permukaan laut (Mdpl).</p> <p>Sasaran pengembangan kawasan ini, yaitu pengembangan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan di dataran tinggi 800-1.200 Mdpl dengan mengembangkan komoditas yang masuk dalam target program swasembada atau komoditas unggulan daerah di 3 (Tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat.</p> <p>Tujuan pengembangan kawasan ini, untuk Meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur lahan dan air, sistem pertanian modern, serta penanganan pasca panen; Menjaga ketersediaan pangan nasional dan menekan ketergantungan impor serta menjaga stabilitas inflasi; Pemanfaatan tenaga kerja secara tepat guna dengan membuka peluang kerja dan berusaha dari perluasan kegiatan usaha non pertanian dan pembangunan infrastruktur pembangunan; Mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah antara kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pedesaan sebagai pusat kegiatan pertanian tertinggal; Merangkai wilayah pedesaan (agropolitan) dalam jaringan regional dengan peningkatan aksesibilitas wilayah.</p>
5	22 Juli 2021	<p>Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-forum-konsultasi-publik-perubahan-rpjmd-provinsi-lampung-tahun-20192024.html#ixzz7Is3aA467</p>	 <p>Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
			<p>Bandar Lampung – Sejak bulan Maret Tahun 2020, masyarakat dalam skala global, nasional dan regional menghadapi pandemi Covid19, yang berimbas pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi Covid-19 telah meluas pada masalah ekonomi, masalah sosial, bahkan ke sektor fiskal/keuangan pemerintah. Sehingga, diperlukan reformulasi terhadap kebijakan dan strategi pembangunan, penyesuaian terhadap kerangka pendanaan, termasuk pencermatan pada indikator kinerja beserta target-targetnya. Sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian/revisi terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024.</p> <p>Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka “Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024”. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Kamis (22/7/2021).</p> <p>“Forum Konsultasi Publik yang kita laksanakan pada hari ini memiliki peranan yang sangat strategis serta menjadi bagian dari rangkaian dalam merumuskan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ke depan. Beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan Agenda Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur perlu terus dilanjutkan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.</p> <p>Beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Lampung, antara lain:</p> <p>Bidang Pertanian, pemerintah akan melanjutkan upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui Program Kartu Petani Berjaya, peningkatan daya saing komoditas unggulan (kopi, kakao, jagung, singkong dan udang), Revitalisasi Lada, memfungsikan BUMD untuk pengembangan produk pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.</p> <p>Sektor Pariwisata, akan didorong pengembangan destinasi wisata baru di wilayah Bakauheni. Kawasan dirancang dengan konsep Integrated Tourism Complex, dimana beberapa specific-magnet yang dibangun akan menjadi destinasi dan daya tarik pariwisata pada kawasan dimaksud, sekaligus menjadi Hub dalam sistem jaringan pariwisata yang menghubungkan Destinasi Pariwisata Prioritas di Provinsi Lampung.</p> <p>Infrastruktur juga menjadi prioritas untuk menjamin konektivitas antar wilayah dalam rangka mengurangi ketimpangan dan meningkatkan efisiensi produksi serta dalam upaya peningkatan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Lampung, melalui Infrastruktur Lampung Berjaya, Unit Reaksi Cepat dan Lampung terang Berjaya.</p> <p>Peningkatan Kualitas SDM dalam peningkatan Daya Saing melalui upaya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, prevalensi gizi serta pengentasan kemiskinan dan Reformasi Birokrasi. Penguatan sistem dan kualitas layanan kesehatan masyarakat akan dilanjutkan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana kesehatan serta pemenuhan sumber daya kesehatan. Selanjutnya, pembangunan SDM juga diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun dimasa Covid-19.</p> <p>Kegiatan yang dimoderatori oleh Akademisi dari Universitas Lampung Teguh Endaryanto ini, menghadirkan beberapa narasumber dan penanggap yaitu Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nyoto Suwignyo, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, Kepala BPS Provinsi Lampung Faizal Anwar, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung Budi Harto Setiawan, Rektor UBL Muhammad Yusuf Sulfarano Barusman, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Nairobi. Selanjutnya peserta pada kegiatan ini yaitu Anggota Forkopimda Plus Provinsi Lampung, Para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kepala Instansi Vertikal, Para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung, Pimpinan BUMN, BUMD dan Dunia Usaha, Pimpinan Parpol, Asosiasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa, serta seluruh Pemangku Kepentingan Pembangunan.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
6	24 Juli 2021	<p>Selamat Bertugas Pak Busyairi Afton</p> <p>Sumber Berita: Selamat Bertugas Pak Busyairi Afton (lampungprov.go.id)</p>	 <p>Selamat Bertugas Pak Busyairi Afton</p> <p>Bandar Lampung - Pelepasan Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Busyairi Afton yang akan berpindah tugas sebagai Kepala UPTD Labkesda Provinsi Lampung.</p> <p>Bandar Lampung - Pelepasan Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Busyairi Afton yang akan berpindah tugas sebagai Kepala UPTD Labkesda Provinsi Lampung.</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan didampingi oleh Ketua DWP Bappeda Provinsi Lampung Vera Mulyadi Irsan dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas pengabdian Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Busyairi Afton di Bappeda Provinsi Lampung selama ini.</p> <p>"Saya mewakili keluarga besar Bappeda Provinsi Lampung mengucapkan selamat atas dilantiknya Pak Busyairi, dan terimakasih atas pengabdianya di Bappeda selama ini, mohon maaf jika ada salah dan khilaf kata, tolong dimaafkan," ujar Kepala Bappeda.</p> <p>Kepala Bappeda juga berharap kedepan Busyairi Afton semakin sukses, dapat membangun perubahan khususnya dibidang kesehatan, dan tetap membangun koordinasi dengan Bappeda.</p> <p>Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian cinderamata oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Kepada Busyairi Afton, dan dilanjutkan dengan pemberian cinderamata oleh Ketua DWP Bappeda Provinsi Lampung kepada Ny. Ella Busyairi.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
7	26 Juli 2021	<p>FGD Revisi Renstra Implementasi Permendagri No.90 Tahun 2019</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-fgd-revisi-renstra-implementasi-permendagri-no90-tahun-2019.html#ixzz7Is64LwPi</p>	 <p>The image shows a screenshot of a Zoom meeting. At the top, there is a dark blue header with the BAPPEDA logo on the left and navigation links: HOME, PROFIL, AGENDA, BERITA, LINK, and DOKUMEN. Below the header is a grid of 20 video thumbnails, each representing a participant in the meeting. The thumbnails show various individuals, some with their names visible below them. At the bottom of the screen, there is a Zoom control bar with icons for Mute, Turn Video Off, Participants, Chat, Share Screen, Record, and Reactions, along with a 'Leave' button on the far right.</p> <p>FGD Revisi Renstra Implementasi Permendagri No.90 Tahun 2019</p> <p>Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjadi narasumber pada FGD Revisi Renstra Implementasi Permendagri No.90 Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Senin (26/7/2021). Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual di Ruang Kerja masing-masing. Pada kesempatan ini Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan terkait Arahan Kebijakan dan Target Kinerja Revisi RPJMD 2019-2024 Sektor Industri dan Perdagangan Provinsi Lampung.</p> <p>“Arahan Kebijakan Sektor Industri dan Perdagangan Provinsi Lampung yaitu Mengembangkan Industri Pengolahan; Mengembangkan Kawasan Industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru; Mengembangkan industri berbasis teknologi; Meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri; Menyediakan pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p>Selanjutnya, Kepala Bappeda juga memberikan masukan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, perlu adanya dukungan dengan meningkatkan laju industri pengolahan dan Mengembangkan industri pengolahan dalam rangka pertumbuhan ekonomi baru.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
8	29 Juli 2021	<p>Rapat Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-rapat-penyusunan-rancangan-perubahan-rpjmd-provinsi-lampung-tahun-20192024.html#ixzz7Is6qvgt5</p>	 <p>Rapat Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024</p> <p>Bandar Lampung - Dalam rangka percepatan penyempurnaan Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan memimpin Rapat Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 di Ruang Rapat Alimudin Umar Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Kamis (29/7/2021).</p> <p>Kegiatan yang juga dilaksanakan secara online ini bertujuan untuk menginventarisasi hambatan atau kendala dalam penyusunan substansi antar bab dalam Rancangan Perubahan RPJMD 2019-2024. Serta untuk memperkuat koordinasi dan tindak lanjut secara lintas bidang dalam rangka penyelesaian Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD 2019-2024.</p> <p>Peserta pada rapat ini yaitu Pejabat Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional Perencana serta Tim Perumus Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
9	30 Juli 2021	<p>Fasilitasi Perubahan RKPDP Provinsi Lampung Tahun 2021</p> <p>Sumber Berita: Fasilitasi Perubahan RKPDP Provinsi Lampung Tahun 2021 (lampungprov.go.id)</p>	 <p>Fasilitasi Perubahan RKPDP Provinsi Lampung Tahun 2021</p> <p>Bandar Lampung – Fasilitasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) Provinsi Lampung Tahun 2021 di Ruang Rapat Allimudin Umar Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Jumat (30/7/2021). Kegiatan yang dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni ini dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting.</p> <p>Dalam arahnya Hari Nur Cahya Murni menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan dokumen untuk Fasilitasi Perubahan RKPDP 2021 yang meliputi surat permohonan dari daerah, rancangan Akhir perubahan RKPDP Tahun 2021, hasil pengendalian dan evaluasi triwulan II, reviu APIP atas rancangan akhir perubahan RKPDP Tahun 2021, dan format fasilitasi perubahan RKPDP 2021, Sudah diterima dan lengkap sehingga dilakukan fasilitasi Perubahan RKPDP Provinsi Lampung Tahun 2021.</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan dalam paparannya menyampaikan beberapa kebijakan dalam perubahan RKPDP Provinsi Lampung Tahun 2021, yaitu terkait Penanganan Covid-19, Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah.</p> <p>Kebijakan dalam Penanganan Covid-19 pada Perubahan Tahun 2021, yaitu Meningkatkan dan memperluas sosialisasi dan edukasi terkait pelaksanaan protokol COVID-19 secara ketat untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi; Kebijakan subsidi fiskal guna membantu pelaku ekonomi di daerah untuk bertahan menghadapi dampak COVID-19, khususnya UMKM; Mendorong efisiensi penyerapan anggaran belanja dan refocusing belanja untuk mendukung percepatan dan kelancaran vaksinasi guna penanganan COVID-19.</p> <p>Selanjutnya, Kebijakan Pendapatan Daerah Pada Perubahan Tahun 2021 yaitu Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah untuk mendorong tingkat kepatuhan membayar pajak; Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melalui kegiatan pendataan potensi pajak kendaraan bermotor (<i>door to door</i>); Mengembangkan dan mengoptimalkan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang semakin mudah, cepat dan akuntabel serta memperbanyak tempat pelayanan agar pelayanan semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat; Peningkatan pelayanan di sektor pajak daerah dan Retribusi daerah melalui peningkatan sarana, prasarana dan pemeliharaan rutin bagi peningkatan pelayanan; Meningkatkan pendapatan daerah melalui proses pemutihan pajak kendaraan bermotor.</p>

			<p>Kebijakan Belanja Daerah Pada Perubahan Tahun 2021 yaitu Memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan yaitu belanja operasi antara lain didalamnya belanja pegawai, belanja bunga serta belanja barang dan jasa yang terkait langsung dengan pelaksanaan Program/ Kegiatan dan Subkegiatan serta belanja bantuan sosial digunakan dalam rangka meningkatkan stimulus kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat diantaranya yang terdampak pandemi Covid-19, Belanja modal diarahkan untuk belanja infrastruktur dan belanja modal lainnya yang dimanfaatkan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung, Alokasi belanja perubahan sebagian berasal dari Refocusing Anggaran pada Tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan vaksin untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung.</p> <p>Kegiatan yang di fasilitasi oleh Kemendagri melalui Dirjend Bina Pembangunan Daerah ini diikuti oleh Bidang Teknis dan UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung, DPRD Provinsi Lampung, dan OPD terkait. Kegiatan ini juga ditutup oleh Direktur Perencanaan Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Dirjend Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nyoto Suwignyo.</p>
--	--	--	--

LAPORAN RILIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
AGUSTUS 2021

Laporan Rilis Bappeda Provinsi Lampung

Agustus 2021

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
1	3 Agustus 2021	<p>Koordinasi Satu Data Provinsi Lampung</p> <p>Sumber Berita: Koordinasi Satu Data Provinsi Lampung (lampungprov.go.id)</p>	 <p>Koordinasi Satu Data Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung – Sebagai upaya implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan Diskusi Aplikasi Satu Data Provinsi Lampung dan Data Prioritas untuk Satu Data di Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung, Jumat (3/8/2021).</p> <p>Satu Data Provinsi Lampung, adalah kebijakan tata kelola Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk pengelolaan, keterbukaan dan kemudahan akses data bagi masyarakat dan berbagi pakai data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Lampung.</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan dalam arahannya menyampaikan, "Data sebagai kebutuhan pembangunan, Kemajuan suatu daerah bisa dilihat dari data oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antar pihak terkait. Koordinasi dan diskusi terkait Aplikasi Satu Data Provinsi Lampung dan Data Prioritas untuk Satu Data ini, menjadi sangat penting, untuk melihat bagaimana pembagian tugas dan hubungan kerja antar pihak terkait. Kedepan saya berharap diskusi ini diikuti oleh berbagai pihak seperti akademisi, Balitbang, dan Stakeholder lainnya," ujarnya.</p> <p>Kepala BPS Provinsi Lampung Faisal Anwar yang juga turut hadir pada kegiatan tersebut juga berharap, dengan adanya Aplikasi Satu Data Provinsi Lampung, kedepan kita bisa dengan mudah mengakses data dan data yang disajikan adalah data-data yang berkualitas.</p> <p>"Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung pasal 12 Pembina Data Statistik dilaksanakan oleh BPS dan Pembina Data Geospasial dilaksanakan oleh Bappeda. Selanjutnya pada pasal 13, Walidata dilaksanakan oleh Bappeda dalam hal ini UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung dan Diskominfo sebagai Walidata Pendukung," ujar Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung, Evie Fatmawaty saat menyampaikan paparannya.</p> <p>Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung, Belli Pahlupi berharap kedepan Bappeda, BPS, dan Diskominfo bisa saling berkoordinasi dan bersinergi dalam mewujudkan Forum Satu Data dan Aplikasi Satu Data Lampung yang direncanakan akan di launching pada akhir tahun 2021.</p> <p>*PPID/PKL Unila Fahmi</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
2	19 Agustus 2021	Rapat Penetapan Satu Data Smart Village	 <p>Rapat Koordinasi Daerah Pengembangan Kawasan Industri Pesawaran</p> <p>Rapat Koordinasi Daerah Pengembangan Kawasan Industri Pesawaran</p> <p>Bandar Lampung - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Daerah Pengembangan Kawasan Industri Pesawaran di Emersia Hotel dan Resort Bandar Lampung, Kamis (19/8/2021).</p> <p>Rapat yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Investasi/BKPM, dalam rangka penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan pada kawasan industri pesawaran tahun anggaran 2021 ini dihadiri oleh Direktur Kementerian Investasi/BKPM beserta jajarannya, Kepala Dinas Perindag dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala BPS Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Pesawaran, Kepala BPS Kabupaten Pesawaran, Team Leader, Tenaga ahli dan PIC Sektro Kawasan, PT Sucofindo (Persero).</p> <p>Dalam sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan, Salah satu strategi kebijakan pembangunan Provinsi Lampung yang dikembangkan adalah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan Kawasan Industri.</p> <p>Ada 4 (empat) kawasan Industri Lampung yang masuk dalam RPJMN 2020-2024 yaitu: Kawasan Industri Way Tegineneng di Kabupaten Pesawaran, Kawasan Industri Tanggamus, Kawasan Industri Katibung, Kawasan Industri Way Pisang di Kabupaten Lampung Selatan. Ke-4 (empat) Rencana Kawasan Industri ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024.</p> <p>"Lokasi Kawasan Industri Tegineneng di Kabupaten Pesawaran berada di 5 wilayah administrasi desa yaitu : Desa Kota Agung, Desa Gunung Sugih, Desa Bumi Agung, Desa Rejo Agung, Desa Batang Hari Ogan. Rencana pengembangan Kawasan Industri Pesawaran seluas 855 ha dari 1.200 ha. Core industri yang akan dikembangkan adalah di industri berbasis agro (pertanian) dimana kondisi eksisting lahan di kawasan tersebut memang berada di lahan pertanian kering. Selain itu, Infrastruktur juga sangat mendukung dimana dekat dengan Jalan Lintas Sumatera dan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar, Pelabuhan Bakauheni, Bandara Raden Intan II, Stasiun KA Teginneng, dan lainnya. Sehingga perlu adanya upaya dan dorongan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk percepatan pengembangan Kawasan industri tersebut," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
			<p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga menjelaskan bahwa rencana pembangunan Kawasan Industri Pesawaran sudah berprogres. Namun demikian akibat dampak Pandemi Covid-19, nampaknya perkembangannya cukup lambat. Oleh karena itu perlunya dukungan dari pemerintah pusat, stakeholder terkait, untuk mempercepat progress pembangunan tersebut.</p> <p>"Sangat diperlukan kerja keras dari semua pemangku kepentingan serta mendorong investasi dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Industri. Untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi pihak terkait, terutama Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Mari bersama-sama menyatukan Langkah dengan tujuan Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Pesawaran ini," tambahnya.</p>
3	24 Agustus 2021	<p>Kepala Bappeda Pimpin Pembahasan Persiapan Revitalisasi SMK UT Sulusuban Lampung Tengah</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-kepala-bappeda-pimpin-pembahasan-persiapan-revitalisasi-smk-ut-sulusuban-lampung-tengah.html#ixzz7IsGf6mdQ</p>	 <p>Kepala Bappeda Pimpin Pembahasan Persiapan Revitalisasi SMK UT Sulusuban Lampung Tengah</p> <p>Bandar Lampung- Bappeda Provinsi Lampung gelar Rapat Persiapan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Unggul Terpadu (SMK UT) Sulusuban Lampung Tengah di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (24/8/2021).</p> <p>Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan ini, sebagai upaya percepatan pelaksanaan agenda kerja utama Gubernur Lampung No. 16 Revitalisasi SMK meningkatkan SMK ke Dunia Kerja.</p> <p>Dalam Arahannya Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan bahwa yang menjadi fokus pembahasan pada rapat ini, yaitu terkait konsep manajemen sekolah yang sesuai dengan SMKUT Sulusuban Lampung Tengah agar dapat menjadi SMKUT yang benar benar unggul.</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga menginginkan kurikulum SMKUT Sulusuban Lampung Tengah dapat seperti SMTI Bandar Lampung, dimana terdapat kurikulum yang fleksibel dan juga selalu berinovasi, berkearifitas, menyesuaikan dengan kebutuhan industri.</p> <p>Kedepan, Kepala Bappeda Provinsi Lampung meminta untuk membentuk tim, guna membuat konsep manajemen sekolah bagi SMKUT Sulusuban Lampung Tengah yang nantinya akan ditunjukkan kepa Gubernur Provinsi Lampung.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
			<p>Kegiatan yang juga dimoderatori oleh Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung Eka Yuslita Dewi ini dilaksanakan secara online dan Offline, dan dihadiri oleh Balitbangda Provinsi Lampung, Kepala SMKUT Sulusuban Lampung Tengah, Kepala SMTI Bandar Lampung, dan OPD terkait.</p> <p>*PPID Bappeda/PKL Unita Riski</p>
4	25 Agustus 2021	<p>Rakor Internal Forum dan Sekertariat Satu Data Provinsi Lampung</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-rakor-internal-forum-dan-sekertariat-satu-data-provinsi-lampung.html#ixzz7IsHKDP1Q</p>	 <p>Rakor Internal Forum dan Sekertariat Satu Data Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung – Dalam rangka percepatan dan penyempurnaan Forum Satu Data Provinsi Lampung, Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung Belli Pahlupi memimpin Rapat Koordinasi Penyempurnaan Forum dan Sekertariat Satu Data Provinsi Lampung bersama BPS Provinsi Lampung di Ruang Rapat Command Center Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (25/8/2021).</p> <p>Rapat yang dilaksanakan secara tatap muka ini bertujuan untuk mengetahui progress persiapan keseluruhan Forum dan Sekertariat Satu Data Provinsi Lampung. Serta untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam rangka pembentukan Forum Satu Data Provinsi Lampung.</p> <p>Pembentukan Forum dan Sekertariat Satu Data Provinsi Lampung ini, Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Lampung dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.</p> <p>"Saya meminta tolong kita bersama-sama bisa saling bersinergi, berkomunikasi, dan berkontribusi tentang persiapan Forum dan Sekertariat Satu Data ini," ujar Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
5	25 Agustus 2021	<p>Modal Sosial dan Budaya Menjadi Kekuatan Nasional dalam Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-modal-sosial-dan-budaya-menjadi-kekuatan-nasional-dalam-pemulihan-ekonomi-di-tengah-pandemi-covid19.html#ixz77IsIORSFc</p>	 <p>Modal Sosial dan Budaya Menjadi Kekuatan Nasional dalam Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19</p> <p>Bandar Lampung – Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung Evie Fatmawaty bersama Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung Belli Pahlupi dan staf, mengikuti secara virtual seminar nasional dengan tema “Modal Sosial dan Budaya Menjadi Kekuatan Nasional dalam Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19” di Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (25/8/2021).</p> <p>Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), dibuka secara resmi oleh Gubernur Lemhannas RI Agus Widjojo. Dalam sambutannya Gubernur Lemhannas RI menyampaikan, seminar ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pada kesempatan ini hadir juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan sebagai keynote speaker. “Pemulihan ekonomi sangat bergantung pada penanganan dan pengendalian pandemi covid-19. Meski perkembangan kasus covid-19 di Indonesia telah menunjukkan perbaikan yang signifikan, tetapi kita tetap perlu berhati-hati. Butuh langkah intervensi kebijakan yang lebih agresif untuk memitigasi peningkatan mobilitas melalui strategi pengendalian pandemi, seperti peningkatan kepatuhan menggunakan masker, penguatan 3T, dan akselerasi vaksinasi. Modal sosial masyarakat dan kualitas tata laksana pemerintahan berperan besar dalam keberhasilan pengendalian pandemi. Keberhasilan penanganan pandemi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi dengan melibatkan berbagai elemen bangsa,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI.</p> <p>“Ke depan, kita harus melakukan perbaikan pada modal sosial dan kualitas tata laksana pemerintahan menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Lemhanas memiliki peran penting dalam menyiapkan kader bangsa yang professional, berkarakter, dan memiliki wawasan kebangsaan. Lemhanas juga berperan dalam melakukan pengkajian yang strategis terkait perbaikan tata laksana pemerintahan ke depan,” tambahnya. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno; Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda; Guru Besar Ekonomi SDA dan Lingkungan IPB Akhmad Fauzi; Duta Besar RI untuk Belanda Mayerfas; Ketua Umum HIPPI/Wakil Ketua Umum KADIN Suryani Motik; Finalis Putri Indonesia 2019 Offie Dwi Natalia; dan Presenter dan pegiat politik Virgie Baker.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
6	29 Agustus 2021	<p>Kepala Bappeda Dampingi Gubernur Lampung Melepas Pelayaran Perdana Produk GGP dengan Layanan Meratus Line</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-kepala-bappeda-dampingi-gubernur-lampung-melepas-pelayaran-perdana-produk-ggp-dengan-layanan-meratus-line.html#ixzz7IsKJt1q2</p>	 <p>Kepala Bappeda Dampingi Gubernur Lampung Melepas Pelayaran Perdana Produk GGP dengan Layanan Meratus Line</p> <p>Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mendampingi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melepas Pelayaran Perdana Produk Great Giant Pineapple (GGP) dengan Layanan Meratus Line di Pelabuhan Peti Kemas Panjang, Minggu (29/8/2021).</p> <p>Pelepasan Pelayaran Perdana Produk Great Giant Pineapple (GGP) dengan Layanan Meratus Line, rute Panjang – Lampung ke Singapura ini juga dihadiri oleh Corporate Affair Director PT GGP Welly Soegiono, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwiyono Moegiarso, CEO Meratus Line Farid Belbouab, dan Direktur Operasional & Komersional Peti Kemas David Sirait.</p> <p>Dilansir dari Pemprov.Lampung, dalam sambutannya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan apresiasi yang tinggi atas terlaksananya kerjasama antara PT. GGP dengan Meratus Line di tengah kondisi dan tantangan ekonomi yang tidak ringan akibat pandemi Covid yang masih melanda saat ini. Gubernur berharap, pelayaran perdana ini merupakan titik baik dari pemulihan ekonomi baik regional maupun nasional. Terlebih, kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas ekspor produk olahan pertanian yang memang menjadi unggulan serta sektor prioritas ekonomi Lampung.</p> <p>Di akhir sambutannya, Gubernur juga mengucapkan terimakasih atas terlaksananya kerjasama ini dan berharap kegiatan ekspor Provinsi Lampung semakin lancar guna mendorong kebangkitan dan mempercepat pemulihan ekonomi, baik ekonomi daerah, regional sumatera, maupun nasional.</p> <p>Kegiatan ini diakhiri dengan melakukan penekanan sirine dan pemecahan kendi ke badan kapal menandai pelepasan pelayaran perdana produk Great Giant Pineapple dengan Layanan Meratus Line.</p>

LAPORAN RILIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
SEPTEMBER 2021

Laporan Rilis Bappeda Provinsi Lampung

September 2021

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
1	15 September 2021	<p>Pembukaan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-pembukaan-musrenbang-perubahan-rpjmd-provinsi-lampung-tahun-20192024.html#ixzz7IsVR5wlS</p>	 <p>Pembukaan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024</p> <p>Bandar Lampung – Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan Musyawaran Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 secara online dan offline di Hotel Sheraton, Rabu (15/09/2021). Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.</p> <p>"Secara khusus Saya tegaskan kembali. Bahwa Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang saat ini masih berproses dan akan dirumuskan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD bukanlah untuk mengubah Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Visi "Rakyat Lampung Berjaya" yang mengusung 6 (enam) Misi dan 33 Agenda Kerja Utama akan tetap menjadi arah dan acuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan," tegas Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
			<p>Dalam sambutannya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjelaskan, Berdasarkan catatan statistik ekonomi dan sosial baik nasional maupun daerah, terjadinya pandemi Covid 19 sejak awal tahun 2020 telah menekan target-target pembangunan di bidang ekonomi dan sosial secara cukup tajam. Akan tetapi di tengah kondisi pemulihan ekonomi saat ini, dinamika perkembangan sosial ekonomi Provinsi Lampung sudah menunjukkan perbaikan. Laju pertumbuhan ekonomi Lampung sampai dengan Triwulan II-2021 tumbuh dan berhasil keluar dari fase kontraksi. Begitu pula dengan inflasi di Provinsi Lampung masih dalam rentang batas yang terkendali. Data statistik menunjukkan bahwa, hingga pertengahan tahun 2021 inflasi gabungan Provinsi Lampung tercatat berada pada rentang kendali 2 ± 1, keadaan tersebut sangat mendukung stabilitas makro ekonomi daerah.</p> <p>"Tinjauan makro sosial dan ekonomi tersebut tentunya akan menjadi momentum untuk mengingatkan kita kembali, bahwa masih banyak tugas pemerintah daerah yang belum selesai. Sejalan dengan Visi "Rakyat Lampung Berjaya" yang telah dicanangkan, masyarakat Lampung harus terus bergerak dan mengerahkan seluruh potensinya. Meskipun terdapat banyak tantangan lingkungan global dan nasional yang harus dihadapi, Lampung harus bangkit untuk lebih maju dan lebih berdaya saing. Kita juga perlu terus-menerus memperkuat harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah. Terdapat sejumlah Proyek Startegis Nasional yang berlokasi di Provinsi Lampung yang perlu didukung melalui perumusan kebijakan daerah," ujar Gubernur Lampung.</p> <p>Selanjutnya, Gubernur Lampung juga menjelaskan Implementasi Agenda Kerja Utama dan prioritas pembangunan daerah akan terus dilanjutkan. Pada bidang ekonomi, Pemerintah akan melanjutkan upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui Program Kartu Petani Berjaya; Pembentukan 5 BUMD baru yang menangani sektor strategis pertanian, infrastruktur, energi, perhubungan dan transportasi, serta pariwisata; Pengembangan industri pengolahan dalam upaya hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing daerah melalui Pengembangan Kawasan Industri.</p> <p>Dibidang Infrastruktur tetap menjadi prioritas untuk menjamin konektivitas, efisiensi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan melakukan peningkatan dan pemeliharaan jalan Provinsi dengan skema pembiayaan SMI. Juga upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sanitasi, air bersih dan rumah tidak layak huni.</p> <p>Pada Bidang Sosial, pembangunan Sumber Daya Manusia tetap menjadi fokus utama. Pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan upaya perluasan perlindungan sosial, serta peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan pelatihan angkatan kerja berbasis kompetensi. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun dimasa Covid-19. Selain itu juga pemberdayaan masyarakat desa melalui salah satu Agenda Kerja Utama yaitu Smart Village dan pemberdayaan BumDES.101:59</p> <p>==</p> <p>"Semua prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut akan berhasil nyata jika Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi dengan masyarakat, pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat, serta soliditas bersama DPRD," ujar Gubernur Lampung.</p> <p>Kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ini, dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Anggota Forkorpinda Provinsi Lampung, Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bina Bangda, Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kepala Bappeda Provinsi Lampung dan Kepala OPD terkait, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Kepala BPS Lampung, Kepala Kanwil Kementerian/ Lembaga, dan Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Pimpinan BUMN/ BUMD di Provinsi Lampung, Pimpinan Parpol, Organisasi Profesi dan Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan Media Massa, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
2	16 September 2021	<p>Musrenbang Perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-musrenbang-perubahan-rpjmd-kabupaten-lampung-utara-tahun-20192024.html#ixzz7IsWkEN2f</p>	 <p>Musrenbang Perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024</p> <p>Bandar Lampung – Dalam rangka percepatan penyempurnaan rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan Tahun 2019-2024 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Tahun 2019-2024 secara virtual , Kamis (16/9/2021).</p> <p>Gubernur Lampung dalam hal ini diwakili oleh Pit. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnadi menyampaikan, Musrenbang Perubahan RPJMD Lampung Utara merupakan forum yang sangat strategis dalam mempertajam 3 perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Utara pada sisa masa 3 tahun kedepan, menyesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi terkini salah satunya mengantisipasi dampak dan upaya pemulihan akibat pandemi covid-19, perkembangan regulasi termasuk implementasi Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri 90 Tahun 2019 serta sinkronisasi dan sinergi dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Lampung. Seperti halnya dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, penetapan RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 dilakukan sebelum RPJMN 2020-2024 ditetapkan. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan Nasional.</p> <p>Selanjutnya Pit Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung menjelaskan, RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019- 2024 merupakan tahapan ke empat atau tahap paripurna implementasi RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025 dalam pencapaian Visi "Lampung Utara Mandiri, Maju, dan Sejahtera 2025". Oleh karena itu, sebagaimana amanat yang disampaikan pada Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 kemarin, dalam perumusan kebijakan pembangunan agar fokus pada upaya mengoptimalkan karakteristik dan potensi daerah. Setiap Kabupaten/Kota memiliki karakteristik dan potensi wilayah yang tidak sama dengan Kabupaten/Kota lainnya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur Ekonomi Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 36,90 % dan berpotensi pada 6 komoditas perkebunan seperti Kopi, Lada, Singkong, juga Perikanan Air Tawar. Oleh karena itu dalam pengembangan sektor pertanian agar fokus pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah. Selain itu juga, agar hilirisasi hasil pertanian guna meningkatkan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang dirasakan petani guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
			<p>"Saya berpesan agar dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 mengoptimalkan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan hak dasar masyarakat dan kewajiban Pemerintah untuk memenuhinya. Dalam dokumen Perubahan RPJMD agar dirumsukan secara tersirat baik Capaian, Kerangka Pendanaan, Program Pengampu dan IKU/IKD yang terkait pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal," tambahnya.</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan yang juga menjadi narasumber secara virtual pada acara tersebut menyampaikan terkait Sinkronisasi Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>"Diharapkan dalam perubahan ini (RPJMD) ada suatu kebijakan baru yang berisi terobosan-terobosan selama 3 tahun kedepan. Baik terobosan pada konsep inovasi yang bisa mewujudkan pencapaian terhadap visi dan misi Kabupaten Lampung Utara. Kami dari Provinsi Lampung ingin penyusunan RPJMD Lampung Utara ini tidak terlepas dari SDG's yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jadi RPJMD Lampung Utara sudah selaras dengan konsep SDG'S itu sendiri." Ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga menekankan terkait keunggulan potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Utara. "Tidak semua kabupaten menghasilkan lada, walaupun ada beberapa kabupaten yang menghasilkan lada tetapi Lampung Utara punya konsep hulu hilirnya secara komprehensif untuk mengawal lada. Menjadikan Lampung Utara sebagai Kabupaten lada" ujarnya.</p> <p>Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dan Perangkat Daerah Terkait, DPRD Provinsi Lampung Lampung Utara, Forkopimda Kabupaten Lampung Utara, Tenaga Ahli, serta Para Akademisi dan Tokoh-tokoh masyarakat.</p> <p>*PPID Bappeda/PKL Unila Kafitan</p>
3	22 September 2021	<p>Musrenbang RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026</p> <p>Sumber Berita: Musrenbang RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 (lampungprov.go.id)</p>	

Musrenbang RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Pesisir Barat – Kepala Bappeda Provinsi Lampung diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung, Bobby Irawan menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 di Aula Lamban Apung Labuhan Jukung Kecamatan Pesisir Tengah, Krui, Rabu (22/09/2021).

Dalam kegiatan ini, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung, Bobby Irawan menyampaikan terkait Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026.

“Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 agar memperhatikan dan mensinergikan dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 untuk dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan Agenda Kerja Utama Provinsi Lampung 2019- 2024,” ujar Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung.

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
			<p>Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung menjelaskan, “Berdasarkan Data Rilis BPS, Kabupaten Pesisir Barat menjadi salah satu daerah penghasil komoditas pertanian strategis di Provinsi Lampung Tahun 2020 terdiri dari Kopi (peringkat 5 dengan produksi 3.384 ton, sentra di Kecamatan Lemong, Bengkunt, Pesisir Utara, Karya Penggawa dan Ngambur); Kelapa Sawit (peringkat 5 dengan produksi 15.162 ton); Kelapa (peringkat 5 dengan produksi 7.952 ton); Getah Damar Mata Kucing (peringkat 1); Manggis (peringkat 4 dengan produksi 1.823 ton); dan Perikanan Tangkap. Namun pada Tahun 2020, Sektor Industri Pengolahan mengalami kontraksi yang cukup dalam menjadi -12,56%, sehingga diperlukan kebijakan hillrisasi produk pertanian (memanfaatkan potensi 50,26% dari Struktur Ekonomi) guna meningkatkan nilai tambah dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” ujarnya.</p> <p>Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Kabupaten Pesisir Barat Agus Istiqlal dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat, OPD terkait, Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat.</p> <p>Visi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Pesisir Barat Yang Amanah, Maju Dan Sejahtera” dengan 5 misi yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing; Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan; Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan; Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan daerah yang berpijak pada kearifan lokal; Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan produktif serta penguatan sinergitas antar lembaga.</p>

4	23 September 2021	<p>Rapat Besar Komisi Irigasi Provinsi Lampung Tahun 2021</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-rapat-besar-komisi-irigasi-provinsi-lampung-tahun-2021.html#ixzz7IsYBVUDk Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives</p>	 <p>Rapat Besar Komisi Irigasi Provinsi Lampung Tahun 2021</p> <p>Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan selaku Ketua Komisi Irigasi Provinsi Lampung membuka acara Rapat Besar Komisi Irigasi Provinsi Lampung 2021 yang dilaksanakan di Hotel Horison Bandar Lampung, Kamis (23/09/2021)</p>
No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis

			<p>Dalam sambutannya Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan, Komisi Irigasi merupakan forum multi pihak dan unsur pemerintah, unsur petani, dan unsur pengguna jaringan irigasi dalam rangka mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi yang ada di tingkat pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan di tingkat antar provinsi. Sehingga keberadaan dari Komisi Irigasi dapat membantu gubernur/bupati/walikota dalam merumuskan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.</p> <p>"Karenanya rapat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kita semua tentang bagaimana menjalankan fungsi kelembagaan irigasi sehingga tujuan peningkatan ketahanan pangan bisa tercapai," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga menyampaikan, "Saat ini, pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif tidak cukup mudah untuk dilaksanakan, namun bukan berarti hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan. Semoga melalui pelaksanaan Rapat Besar hari ini, dapat terwujud keterpaduan dan keberlangsungan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien serta menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi petani. Selain itu, tidak lupa saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian agar terus memberikan perhatian yang mendalam kepada penguatan fungsi Komisi Irigasi, serta koordinasi dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk Lampung Berjaya," tutupnya.</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan secara offline dengan mematuhi protokol Kesehatan Covid-19 ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung; Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Provinsi Lampung; Kepala UPTD PSDA I/II/III; dan Para Ketua IP3A/GP3A/P3A se-Provinsi Lampung.</p>
5	23 September 2021	<p>Kepala Bappeda Menjadi Narasumber Webinar Mendorong Sektor Unggulan Dalam Menyuksesan Lampung Berjaya Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-kepala-bappeda-menjadi-narasumber-webinar-mendorong-sektor-unggulan-dalam-menyuksesan-lampung-berjaya.html#ixzz7IsZYUlhQ</p>	 <p>Kepala Bappeda Menjadi Narasumber Webinar Mendorong Sektor Unggulan Dalam Menyuksesan Lampung Berjaya</p>
No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis

			<p>Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjadi salah satu narasumber pada webinar dengan tema Mendorong Sektor Unggulan Dalam Menyukseskan Lampung Berjaya. Kegiatan ini dilaksanakan secara online di Ruang Rapat masing-masing, Kamis (23/09/2021).</p> <p>Pada kesempatan ini Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan terkait Pemanfaatan Tabel Input Output (I-O) dan Interregional Input Output (IRIO) dalam perencanaan pembangunan untuk Lampung Berjaya.</p> <p>“Manfaat tabel I-O dan IRIO dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai salah satu alat analisis yang penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah karena bisa melihat permasalahan secara komprehensif. Saat ini, aspek keruangan menjadi sangat penting untuk menggambarkan struktur antara keterkaitan ekonomi dan keterkaitan wilayah. Dan salah satu jawaban atas tantangan tersebut adalah Penyusunan Tabel Input Output (I-O) dan Interregional Input Output (IRIO),” ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p>Dalam paparannya Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga menyampaikan terkait tindak lanjut pemanfaatan IO-IRIO 2016, yaitu IRIO Sebagai salah satu tools yang dapat membantu dalam proses penajaman penentuan arah kebijakan pengembangan tiap sektor dan industri di Provinsi Lampung, IRIO perlu masuk dalam penentuan rencana kerja pembangunan daerah sebagai salah satu alat analisis, Agenda kerja berupa koordinasi secara rutin antara BPS dan Pemprov Lampung perlu dilaksanakan demi keberhasilan capaian kinerja selanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong Hillirisasi komoditi unggulan Sumber Daya Alam di Provinsi Lampung untuk meningkatkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Lampung ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, dan menghadirkan 4 pemateri sekaligus, terdiri dari Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Dekan FEB Universitas Lampung, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, dan Tim Penyusun Tabel IO-IRIO Nasional.</p>
6	28 September 2021	<p>Rapat Pembahasan Perubahan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUDAM</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-rapat-pembahasan-perubahan-rencana-strategis-bisnis-rsb-rsudam.html#ixzz7IsaNtL6q</p>	 <p>Rapat Pembahasan Perubahan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUDAM</p> <p>Bandar Lampung – Dalam rangka peningkatan kerjasama institusi dan diferensiasi layanan unggulan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) guna mendukung daya saing Provinsi Lampung menuju terciptanya Masyarakat Lampung Berjaya. Bappeda Provinsi Lampung bersama Tim RSUDAM, Akademisi Dokter Unila, Pakar Ekonomi Provinsi Lampung, dan BPKP Provinsi Lampung, telah melaksanakan Rapat Pembahasan Perubahan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUDAM di Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (28/9/2021).</p>
No	Tanggal/	Judul	Rilis

	Bulan		
			<p>Bandar Lampung - Dalam rangka peningkatan kerjasama institusi dan diferensiasi layanan unggulan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) guna mendukung daya saing Provinsi Lampung menuju terciptanya Masyarakat Lampung Berjaya. Bappeda Provinsi Lampung bersama Tim RSUDAM, Akademisi Dokter Unila, Pakar Ekonomi Provinsi Lampung, dan BPKP Provinsi Lampung, telah melaksanakan Rapat Pembahasan Perubahan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUDAM di Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (28/9/2021).</p> <p>Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan ini, membahas terkait rencana konsep pengembangan RSUDAM. Dalam arahnya Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan, "Terkait rencana konsep pengembangan RSUDAM Bappeda Provinsi Lampung akan masuk kedalam perencanaan makronya, akan kita susun baiknya kedepan harus seperti apa, kita analisis, dan kita uraikan permasalahannya apa saja," ujarnya.</p> <p>"Pelayanan Kesehatan sangat penting sebagai pelayanan dasar dalam membangun image pemerintah daerah terhadap masyarakat. Kita berharap kedepan rencana konsep pengembangan RSUDAM ini bersinergi dengan pihak-pihak terkait, bisa merubah paradigma, menjadi RS yang menjanjikan dengan memberikan pelayanan optimal, sehingga menjadi kebanggaan Masyarakat Lampung," tambahnya.</p> <p>Direktur RSUDAM Provinsi Lampung, Lukman Pura menjelaskan tiga rencana pengembangan RSUDAM Provinsi Lampung, yaitu hospital meta-leadership (kemitraan) sebagai upaya untuk menggerakkan pelayanan, dinamisasi penampilan serta penyelesaian permasalahan yang komprehensif. Contoh kerjasama dengan budi medika. Rumah Sakit Pintar sebagai salah satu upaya mendekatkan dan memudahkan akses pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan teknologi dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan. Pandemic preparedness, salah satu upaya untuk memghadapi berbagai situasi darurat.</p> <p>"Saya berharap dukungan untuk fleksibility Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mudah-mudahan kedepan kita bisa mewujudkan secara bertahap terkait konsep pengembangan RSUDAM, mohon dukungan dan arahnya," Ujarnya.</p>

**LAPORAN RILIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
OKTOBER 2021**

Laporan Rilis Bappeda Provinsi Lampung

Oktober 2021

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
1	1 Oktober 2021	<p>Konsultasi Publik Hasil Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2021</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-konsultasi-publik-hasil-neraca-penatagunaan-tanah-kabupatenkota-provinsi-lampung-tahun-2021.html#ixzz7Iwa6s000</p>	 <p>The image shows a public consultation event. A large blue banner in the background reads "KONSULTASI PUBLIK HASIL NERACA PENATAGUNAAN TANAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021" with the slogan "Melayan, Profesional, Terpercaya". Three men are seated on a stage in front of the banner. The BAPPEDA Provinsi Lampung logo is visible in the top left corner of the screenshot, along with navigation links: HOME, PROFIL, AGENDA, BERITA, LINK, and DOKUMEN. A date stamp at the bottom of the screenshot indicates "Grand Ely Krakatoa, 01 - 02 Oktober 2021".</p> <p>Konsultasi Publik Hasil Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2021</p> <p>Lampung Selatan – Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Lampung Ahmad Uanurzen menjadi narasumber pada Konsultasi Publik Hasil Neraca Penatagunaan Tanah Kota Metro, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Grand Ely Krakatoa Resort, Lampung selatan, Jumat (1/10/2021).</p> <p>Pada kesempatan ini Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan terkait Rencana Pengembangan Wilayah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Pengembangan Bandara Radin Inten II dan Pusat Kesehatan Internasional, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lampung, Pembangunan Jalan Tol dari Exit Tol Lematang menuju Pelabuhan Panjang, Pengembangan Kawasan Pertanian Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan di Kawasan Dataran Tinggi, Pengembangan Kawasan Pertanian Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan di Kawasan Dataran Tinggi, Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang, Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang, Pengembangan Jalur Wisata Teluk Lampung sampai dengan Kawasan Industri Tanggamus (Kota Agung – Sp. Kuripan – Cukuh Balak – Teluk Kiluan), dan Revitalisasi Tambak Udang (Shrimp Farm) dari Tradisional Menjadi Semi Intensif dan Intensif di Kabupaten Lampung Selatan.</p> <p>Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dan Tim Teknis – Bidang Penataan dan Pemberdayaan.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
2	8 Oktober 2021	<p>Pertemuan antara jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung guna membahas terkait rencana Kerja Sama Daerah</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-pertemuan-antara-jajaran-pemerintah-provinsi-lampung-dengan-pemerintah-kepulauan-bangka-belitung-guna-membahas-terkait-rencana-kerja-sama-daerah.html#ixzz7IwazFVNG</p>	 <p>Pertemuan antara jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung guna membahas terkait rencana Kerja Sama Daerah</p> <p>Bandar Lampung – Dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat tanggal 4 Oktober 2021 terkait rencana Kerja Sama Daerah antara Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung telah mengadakan Pertemuan di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Kamis (8/10/2021).</p> <p>Pertemuan antara jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dengan jajaran Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung ini, membahas terkait potensi kerjasama daerah Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibidang perdagangan, pariwisata, dan jasa.</p> <p>"Agenda kita hari ini adalah untuk membangun kerja sama antara Pemprov Lampung dan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya kerjasama ini kita bangun berdasarkan potensi ekonomi yang ada. Apa saja potensi di Lampung yang bisa dimanfaatkan oleh Bangka Belitung, begitupun sebaliknya. Artinya setelah kita mengenal potensi masing-masing, maka kita akan saling melengkapi. Inilah esensi dari kerjasama, sama-sama ingin memberikan manfaat. Kita juga harus memikirkan terkait regulasi, sinergi regulasinya harus kita mantapkan sehingga nanti para pelaku usaha memiliki ruang yang cukup untuk mereka mengambil peluang-peluang," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.</p> <p>Pada kesempatan ini Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menyampaikan terkait rencana kerja sama perdagangan antar daerah provinsi lampung dan provinsi kepulauan bangka belitung.</p> <p>" Berdasarkan dari analisis Kebutuhan dan Surplus antara Lampung dan Bangka Belitung maka ada potensi besar SURPLUS sejumlah komoditas pertanian di Lampung untuk memenuhi kebutuhan pangan strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komoditas pertanian tersebut, antara lain: Beras, Jagung, Bawang putih, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur, Gula dan Minyak Goreng," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p>Dalam paparannya Ia juga menyampaikan terkait rencana aksesibilitas jalur perdagangan Pelabuhan Mesuji/Sungai Sidang dan Dermaga Logistik Tanah Merah sebagai salah satu jalur transportasi antara Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung.</p> <p>Mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap kerjasama antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Lampung bisa segera terwujud, serta memberikan kepastian bagi para pelaku usaha, dan juga memberikan kemudahan khususnya masalah akses jalur distribusi, sehingga memberikan keuntungan kepada masyarakat.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
3	21 Oktober 2021	<p>Sosialisasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rpjmd Provinsi Lampung Tahun 2019-2024</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-sosialisasi-dokumen-kajian-lingkungan-hidup-strategis-klhs-perubahan-rpjmd-provinsi-lampung-tahun-20192024.html#ixzz7Iwf0SLpU</p>	 <p>Sosialisasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rpjmd Provinsi Lampung Tahun 2019-2024</p> <p>Bandar Lampung - Sehubungan telah divalidasinya Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tanggal 15 September 2021, maka Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Bappeda Provinsi Lampung bersama OPD terkait sedang melaksanakan Sosialisasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.</p> <p>Kegiatan yang juga dilaksanakan secara virtual di Ruang Rapat Alimudin Umar Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Kamis (21/10/2021) ini, dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan.</p> <p>Dalam arahnya Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan, Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 akan memberikan manfaat dalam mewarnai substansi rencana pembangunan yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengarahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Analisis pencapaian TPB yang terdapat di dalam dokumen KLHS Perubahan RPJMD menghasilkan 5 TPB Prioritas dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung, yang meliputi penanggulangan masalah kemiskinan, kelaparan, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, kota dan permukiman yang berkelanjutan, serta berkurangnya kesenjangan. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan surat Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.</p> <p>Kepala Bappeda juga berharap dengan adanya Sosialisasi ini, menjadi bagian penting dalam upaya menyampaikan informasi terkait pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 guna mendukung pencapaian Visi Rakyat Lampung Berjaya, Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing, Sejahtera.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
4	26 Oktober 2021	<p>Webinar Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Provinsi Lampung Tahun 2021</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-webinar-sistem-layanan-dan-rujukan-terpadu-slrt-provinsi-lampung-tahun-2021.html#ixzz7Iwc6yzDZ</p>	 <p>Webinar Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Provinsi Lampung Tahun 2021</p> <p>Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim membuka acara Webinar Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Provinsi Lampung Tahun 2021 secara online, Selasa (26/10/2021). Dalam paparannya Wakil Gubernur Lampung menyampaikan terkait Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Menjadi Jembatan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Provinsi Lampung.</p> <p>"Penguatan Pendampingan dan Layanan Terpadu sebagai Kunci Keberhasilan, maka perlu dilakukan Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan, Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, Pendampingan dan Layanan Terpadu, Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk. Saat ini progress SLRT dan Puskesmas di Provinsi Lampung sudah terbentuk di 3 Kabupaten yaitu Mesuji, Tanggamus, dan Pringsewu. Di Tahun ini, terdapat 4 Kabupaten yang sudah di setujui Kementerian Sosial untuk pembentukannya yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran. Selebihnya masih dalam tahap proses usulan," ujar Wakil Gubernur Lampung.</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan juga menyampaikan terkait Kebijakan Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2021.</p> <p>"Salah satu kebijakan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan adalah melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Tujuan dari SLRT adalah untuk meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan miskin terhadap multi-program/layanan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; mendukung "pemutakhiran" Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di daerah; memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; mengkoordinasikan semua jenis program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan," Ujar Kepala Bappeda.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
5	28 Oktober 2021	<p>Sekda Provinsi Lampung Membuka Acara Workshop Satu Data Provinsi Lampung Tahun 2021</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-sekda-provinsi-lampung-membuka-acara-workshop-satu-data-provinsi-lampung-tahun-2021.html#ixzz7Iy3Oy1fj</p>	 <p>Sekda Provinsi Lampung Membuka Acara Workshop Satu Data Provinsi Lampung Tahun 2021</p> <p>Bandar Lampung – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka acara Workshop Satu Data Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan tema “Menuju Satu Data Untuk Lampung Berjaya di Hotel Horison Lampung, Kamis (28/10/2021).</p> <p>Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Lampung menyampaikan, Melalui Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung, pemerintah provinsi Lampung berupaya untuk mewujudkan tata kelola data dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Provinsi Lampung.</p> <p>“Kualitas perencanaan yang efektif ditentukan dari kualitas data. Data statistik, geospasial, dan keuangan daerah yang akan dikelola didalam satu BIG DATA beserta data kependudukan dan data pembangunan lainnya dimaksudkan untuk menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar target pembangunan dapat dicapai. Pembangunan selayaknya harus tepat guna dan tepat sasaran, sehingga secara efektif dan efisien bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan optimal. Manfaat yang dirasakan warga itulah yang menjadi ukuran mendasar dari kegiatan pembangunan yang direncanakan dengan penuh perhitungan dan pengamatan dari data yang akurat dan berkualitas,” ujarnya.</p> <p>Sekda Provinsi Lampung juga berharap, melalui Satu Data Provinsi Lampung ini, dapat menyelaraskan program antar-sektor, merumuskan prioritas program dan kegiatan, untuk menghasilkan kegiatan pembangunan yang lebih efektif bagi masyarakat, dan mampu menjawab tantangan lingkungan yang dinamis.</p> <p>Kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung ini dihadiri oleh Sekretariat Satu Data Indonesia; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG); Kepala BPS Wilayah Lampung; Kepala Bappeda Provinsi Lampung; Anggota forum Satu Data se-Provinsi Lampung; Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan Akademisi. Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan berita acara.</p> <p>Kegiatan ini menghadirkan 3 narasumber sekaligus yaitu Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kepala BPS Provinsi Lampung, dan Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebar Luasan Informasi Geospasial (IG), dan dimoderatori oleh Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi BPS Provinsi Lampung.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
6	28 Oktober 2021	<p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung memimpin Rakor Kepala Bappeda se-Provinsi Lampung Tahun 2021</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-kepala-bappeda-provinsi-lampung-memimpin-rakor-kepala-bappeda-seprovinsi-lampung-tahun-2021.html#ixzz7Iy47UnM8</p>	 <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung memimpin Rakor Kepala Bappeda se-Provinsi Lampung Tahun 2021</p> <p>Bandar Lampung – Sebagai upaya mewujudkan koordinasi perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung yang sinergis dan berkelanjutan untuk mewujudkan target pembangunan daerah dan nasional jangka panjang dan menengah, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bappeda Provinsi telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Bappeda se-Provinsi Lampung Tahun 2021.</p> <p>Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan dan dimoderatori oleh Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung Belli Pahlupi ini, dihadiri oleh Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Horison Lampung, Kamis (28/10/2021).</p> <p>Dalam arahnya Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan terkait penguatan sinergi dan kolaborasi perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung, yang terdiri dari Peran dan Kapasitas Bappeda, Isu Strategis Kewilayahan, Peningkatan Daya Saing Melalui Pemanfaatan Peluang dan Potensi Daerah, Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022.</p>

**LAPORAN RILIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
NOVEMBER 2021**

Laporan Rilis Bappeda Provinsi Lampung

Mei 2021

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
1	3 November 2021	<p>Bimtek Penulisan dan Publikasi Makalah Perencanaan Pembangunan</p> <p>Sumber Berita: Bimtek Penulisan dan Publikasi Makalah Perencanaan Pembangunan (lampungprov.go.id)</p>	 <p>Bimtek Penulisan dan Publikasi Makalah Perencanaan Pembangunan</p> <p>Bandar Lampung- Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penulisan Dan Publikasi Makalah Perencanaan Pembangunan. Bimtek ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (3/11/2021). Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi literasi bagi ASN, khususnya bagi para Pejabat Fungsional Perencana di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung ini, menghadirkan dua narasumber yaitu Statistisi Badan Pusat Statistik Kota Malang, Tasmilah, dan Pemimpin Redaksi wartalampung.id, Adian Saputra.</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung, Evie Fatmawaty, menyampaikan, "Bappeda Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Bimtek Penulisan dan Publikasi Makalah Perencanaan Pembangunan, sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi bagi para ASN, khususnya bagi para Pejabat Fungsional Perencana di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung agar dihasilkan pemikiran dalam bentuk kerangka tulisan.</p> <p>"Besarnya harapan saya agar para peserta Bimtek sekalian dapat menghiasi ruang-ruang publik kita dengan berbagai pemikiran konstruktif dari para ASN dalam menghadapi tantangan pembangunan. Selain itu, ASN juga diharapkan dapat menuangkan pemikiran dan data yang berlandaskan teori dalam bentuk makalah perencanaan pembangunan yang akan menarik dan mudah difahami oleh masyarakat," tambahnya.</p>

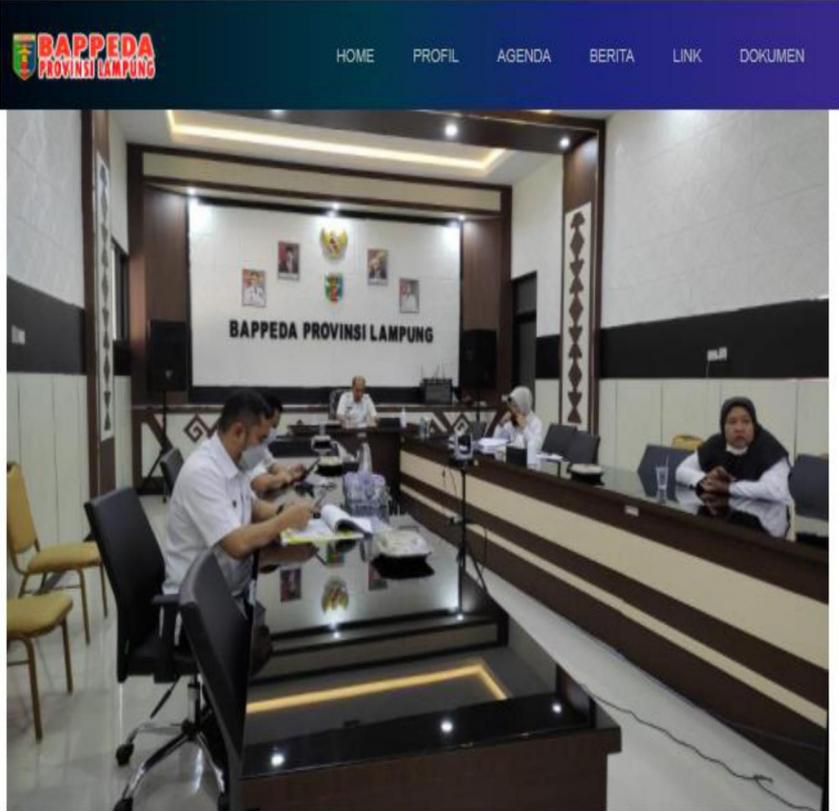
No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
2	4 November 2021	Rakor JIG Daerah Provinsi Lampung Sumber Berita: Rakor JIG Daerah Provinsi Lampung (lampungprov.go.id)	 <p>Rakor JIG Daerah Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Jaringan Informasi Geospasial (JIG) Daerah Provinsi Lampung dengan tema "Penguatan Simpul Jaringan Daerah Dalam Mendukung Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia" secara daring dan luring di Hotel Horison Lampung, Kamis (4/11/2021).</p> <p>Kegiatan yang bertujuan untuk mendorong Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan data spasial pada pelaksanaan pembangunan serta memanfaatkan Geoportal sebagai akses berbagi pakai data spasial ini, menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Lampung sebagai <i>keynote Speaker</i>, Kemenko Bidang Perekonomian RI, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Moderator dari Unit Pengembangan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial (UP2IG) Universitas Lampung, Istuminingsih Halengkara.</p> <p>Dalam sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Penyelenggaraan Satu Data yang akurat dan berintegritas berdasarkan sistem informasi geospasial adalah salah satu prinsip umum yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Lampung menuju era integrasi satu data (One Map One data), sesuai pasal 4A Perpres 23 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, "Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Satu Data Indonesia.</p> <p>"Pembangunan infrastruktur prioritas membutuhkan dukungan produk rencana tata ruang yang terintegrasi lebih mudah diakses dan dijadikan acuan, oleh karenanya, kebijakan Satu Peta menjadi krusial. Kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal sangat diperlukan untuk mendorong penggunaan Informasi geospasial dan keterbukaan pemerintah (open government), karena itu, tata kelola data yang baik tidak lepas dari komitmen pembenahan kelembagaan sebagai pintu utama pelaksana dan penanggung jawab berbagi pakai data untuk kebutuhan pembangunan," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p>Ia juga berharap, agar Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi untuk segera melakukan inventarisasi terhadap kepemilikan data data spasial yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah serta kepada Pemerintah Kabupaten Kota agar dapat segera melakukan akselerasi pelaksanaan kebijakan one map one data di masing-masing kabupaten/kota dengan menjadi simpul jaringan geospasial mandiri yang terhubung dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).</p> <p>Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung, Belli Pahlupi selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan juga menyampaikan, Provinsi Lampung telah memiliki Geoportal sebagai Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah geoportal.lampungprov.go.id yang terhubung dengan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN tanahair.indonesia.go.id) sebagai gerbang akses dan berbagi data dan informasi geospasial, dan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan daerah berbasis spasial dengan ketersediaan data dan informasi dalam bentuk <i>Dashboard</i>.</p> <p>Selanjutnya, "Kinerja Data Geospasial Provinsi Lampung, meliputi ketersediaan data geospasial berupa Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) mencapai 400 Peta digital (dalam Format SHP dan JPEG, serta Data Raster (citra satelit) dan kinerja Kabupaten/Kota meliputi: 2 Kabupaten (Lampung Barat dan Pesisir Barat) yang sudah terhubung dengan sistem Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan 11 Kabupaten atau Kota yang belum terhubung dengan Sistem Jaringan Informasi Geospasial Nasional," Ujarnya.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
3	11 November 2021	<p>FGD I Rencana Pengembangan Aglomerasi Perkotaan/Metropolitan Bandar Lampung Raya</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-fgd-i-rencana-pengembangan-aglomerasi-perkotaanmetropolitan-bandar-lampung-raja.html#ixzz7Iy8VbVCa</p>	 <p>FGD I Rencana Pengembangan Aglomerasi Perkotaan/Metropolitan Bandar Lampung Raya</p> <p>Bandar Lampung: FGD I Rencana Pengembangan Aglomerasi Perkotaan/Metropolitan Bandar Lampung Raya dan dalam upaya identifikasi awal isu, permasalahan, tahapan dan kebutuhan penanganan Pengembangan Aglomerasi Perkotaan/Metropolitan Bandar Lampung Raya di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Kamis (11/11/2021).</p> <p>FGD yang dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan ini, dihadiri oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Lampung, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Lampung, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Bapenda Provinsi Lampung, Balitbangda Provinsi Lampung, Ikatan Ahli Perencana (IAP) Lampung, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Lampung, Akademisi, dan OPD terkait.</p> <p>"Kegiatan FGD I yang kita lakukan hari ini merupakan upaya pengarusutamaan konsep "Pengembangan Aglomerasi Perkotaan/Metropolitan Bandar Lampung Raya" dan sekaligus pondasi pelaksanaan Pengembangan Kawasan Aglomerasi Perkotaan/Metropolitan Bandar Lampung Raya. Kedepan kami berharap kiranya Metropolitan Bandar Lampung Raya dapat menjadi salah satu Metropolitan baru di Indonesia dan mohon kiranya Pemerintah Pusat dapat memberikan arahan hal-hal apa yang harus kami siapkan dalam merealisasikan rencana ini. Kepada peserta diskusi, saya berharap dapat fokus memberikan sharing pemikiran baik berkaitan dengan proses perencanaan, kerjasama antar daerah dan keterpaduan program/kegiatan demi terwujudnya Metropolitan Bandar Lampung Raya," ujar Kepala Bappeda dalam sambutannya.</p> <p>Narasumber pada kegiatan ini yaitu Kepala Bappeda Provinsi Lampung, menyampaikan terkait Peluang dan Potensi Pengembangan Bappeda Kawasan Aglomerasi Perkotaan Provinsi/Metropolitan Bandar Lampung dan Lampung Sekitarnya. Selanjutnya, Perwakilan dari Bappenas, menyampaikan terkait Peluang Aglomerasi Perkotaan/Metropolitan Bandar Lampung Raya Pengembangan Metropolitan Baru di Indonesia. Kemudian, Perwakilan dari BPIW Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Aglomerasi Perkotaan Metropolitan Bandar Lampung Raya, dan Perwakilan dari ITERA menyampaikan Konsep Pengembangan Aglomerasi Perkotaan/Metropolitan Bandar Lampung Raya dan integrasi dengan Kawasan sekitar.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
4	12 November 2021	<p>Evaluasi Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-evaluasi-ranperda-tentang-perubahan-atas-perda-provinsi-lampung-no-13-tahun-2019-.html#ixzz7IyItQ7f1</p>	 <p>Evaluasi Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019</p> <p>Bandar Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kemendagri Republik Indonesia Direktorat Jendral (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah melaksanakan Evaluasi Ranperda Tentang Perubahan atas Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 secara virtual di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Jumat (12/11/2021).</p> <p>Kegiatan ini dibuka oleh Plt.Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah, dan dipimpin oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung, dan Kepala Dinas terkait.</p> <p>Plt.Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah, Sugeng Haryono dalam sambutannya menyampaikan, berdasarkan evaluasi, Kemendagri akan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda tentang RPJMD Tahun 2019-024 sebagai dasar tindakan lanjut untuk mendapatkan Noreg. Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan penyempurnaan Ranperda sesuai lampiran Kemendagri hasil pelaksanaan evaluasi. Kemudian, Provinsi Lampung harus membuat langkah-langkah percepatan penetapan Perda RPJMD dan menyampaikan Perda tentang perubahan perda RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pengkajian.</p> <p>"Revisi RPJMD ini merupakan suatu kebutuhan bagi Provinsi Lampung. Pada saat penyusunan di tahun 2019 kami telah secara seksama memperhitungkan indikator-indikator dan resiko-resiko yang berjalan selama lima tahun, namun pada saat itu kita tidak menghitung adanya resiko Covid-19. Sehingga pada saat terjadi Covid-19 yang saat ini belum selesai, tentunya hal ini sangat mempengaruhi indikator-indikator yang akan dicapai, seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, dan lain-lain. Oleh karena itu berdasarkan hasil diskusi dari eksekutif dan legislatif, maka disepakati, kita untuk sama-sama melakukan pemutakhiran, konten dari RPJMD ini, jika nanti pada akhir masa jabatan Gubernur Lampung, target-target yang ingin dicapai itu, dapat lebih realistis. Oleh karena sudah disesuaikan dengan kondisi terkini," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
			<p>Sekretaris Daerah Provinsi Lampung juga menjelaskan, Ranperda Tentang Perubahan atas Perda Provinsi Lampung No.13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, sudah melalui proses panjang.</p> <p>"Sudah di diskusikan dengan para akademisi, dan mendapatkan masukan dari organisasi kemasyarakatan, dengan kabupaten/kota. Sudah dibahas secara intensif dengan organisasi vertikal, Bank Indonesia, BPS, dll. Dan Sudah dibahas secara mendalam oleh Pansus Perda Revisi RPJMD di lembaga legislatif, juga sudah disesuaikan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, seperti RTRW, RAD, SDGs, dan juga sudah didukung oleh analisis KLHS. Oleh karena itu, maka kami berkeyakinan bahwa, secara proses maupun prosedur, ini <i>isyaallah</i> sudah memenuhi seluruh ketentuan, dan ini juga berkat dukungan dan bimbingan dari Ditjen Bina Bangsa," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.</p> <p>"Untuk itu sekali lagi atas nama Gubernur Lampung, saya mengucapkan apresiasi dan terimakasih atas Bimbingan Ditjen Bina Bangsa. Dan mohon dukungannya untuk pembangunan di Provinsi Lampung kedepan," tambahnya.</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan, "Maksud dari perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah memperbarui kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung 3 (tiga) tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berlandaskan inovasi, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi RPJMD serta dalam rangka upaya percepatan penanggulangan dan penanganan dampak pandemi COVID-19," ujarnya.</p>
5	17 November 2021	<p>Webinar Tematik Kemiskinan: Ekonomi Kerakyatan Sebagai Solusi Penanggulangan Kemiskinan Pada Masa Pandemi</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-webinar-tematik-kemiskinan-ekonomi-kerakyatan-sebagai-solusi-penanggulangan-kemiskinan-pada-masa-pandemi.html#ixzz7IyJSX29C</p>	 <p>Webinar Tematik Kemiskinan: Ekonomi Kerakyatan Sebagai Solusi Penanggulangan Kemiskinan Pada Masa Pandemi</p> <p>Bandar Lampung- Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan Webinar Tematik Kemiskinan, dengan tema "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Solusi Penanggulangan Kemiskinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Lampung Webinar Tematik Kemiskinan: Ekonomi Kerakyatan Sebagai Solusi Penanggulangan Kemiskinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Lampung."</p> <p>Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung, Eka Yuslita Dewi ini, dilaksanakan secara daring di Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (17/11/2021).</p> <p>"Tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai wadah peningkatan pemahaman terkait e-commerce dalam rangka menekan angka kemiskinan bagi pelaku UMKM yang ada di Provinsi Lampung," ujar Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p>Narasumber pada kegiatan ini, yaitu Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM, Kemenkopukm RI, Anggota Komisi XI DPR-RI, City Manager RGX Tokopedia, Founder Aplikasi Pasar Berjaya Lampung, dan Ketua ILUNI UI 4.0.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
6	17 November 2021	<p>FGD Percepatan Pembangunan Pertanian Dalam Menyongsong Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-fgd-percepatan-pembangunan-pertanian-dalam-menyongsong-kebangkitan-ekonomi-pasca-pandemi-covid19.html#ixzz7IyKCH9HO</p>	 <p>FGD Percepatan Pembangunan Pertanian Dalam Menyongsong Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19</p> <p>Bandar Lampung – Dalam rangka mewujudkan janji kerja Gubernur Lampung dan misi ke 5 (lima) pembangunan daerah Provinsi Lampung yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian serta keseimbangan wilayah pedesaan dengan perkotaan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui penyelesaian masalah secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi, bersinergi dengan program-program penanggulangan kemiskinan juga dilakukan pada kegiatan di wilayah pedesaan dan wilayah tertinggal, terutama pada sektor-sektor produksi yang dekat dengan pelaku dan kultur pedesaan.</p> <p>Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pembangunan Pertanian Dalam Menyongsong Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan di Swiss Belhotel, Rabu (17/11/2021).</p> <p>Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan ini, menghadirkan 4 narasumber sekaligus, yaitu Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Kusnardi menyampaikan terkait Percepatan Pembangunan Pertanian dalam Menyongsong Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Di Provinsi Lampung. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan menyampaikan terkait Dukungan Kebijakan Sektor Keuangan dalam Menyongsong Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. Dosen FEB Universitas Lampung, Marselina Djayasinga menyampaikan terkait Ekonomi Kreatif Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Dan Kajar Agribisnis FP Unila, Teguh Endaryanto menyampaikan terkait Percepatan Pembangunan Pertanian Dalam Menyongsong Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, Implementasi Hasil Kajian Pertanian Dalam Percepatan Pembangunan.</p>

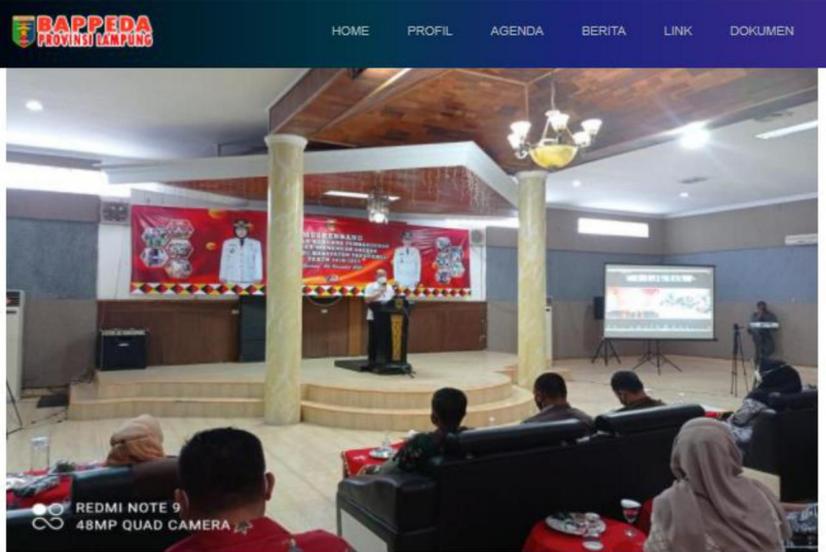
No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
7	18 November 2021	<p>Temu Konsultasi Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2021</p> <p>Sumber Berita: Temu Konsultasi Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2021 (lampungprov.go.id)</p>	 <p>Temu Konsultasi Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2021</p> <p>Bandar Lampung – Dalam rangka memperkuat sinergi perencanaan pemerintah pusat dan daerah, Bappenas bersama Bappeda Seluruh Indonesia melaksanakan Temu Konsultasi Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2021. Pelaksanaan Temu Konsultasi Bappenas-Bappeda dilakukan secara daring dan luring (hybrid).</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan bersama bidang teknis Bappeda Provinsi Lampung menghadiri kegiatan tersebut secara daring di Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung, Kamis (18/11/2021).</p> <p>Dalam kegiatan tersebut Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan 3 poin pembahasan utama, yaitu Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022, Dukungan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022 terhadap Major Project, Potensi Masalah dan Hambatan Pelaksanaan Major Project 2022 di Lampung serta usulan rekomendasi solusi.</p> <p>Tema RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022 yaitu "Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan SDM Berkualitas" dengan 6 prioritas pembangunan, yaitu Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Reformasi Birokrasi, Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya, Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
8	18 November 2021	<p>Pembukaan Bimtek Penyusunan Dupak Fungsional Perencana Provinsi Lampung</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-pembukaan-bimtek-penyusunan-dupak-fungsional-perencana-provinsi-lampung.html#ixzz7J8sQ1xBx</p>	 <p>Pembukaan Bimtek Penyusunan Dupak Fungsional Perencana Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Fungsional Perencana Provinsi Lampung. Pelaksanaan Bimtek ini dilakukan secara daring dan luring (hybrid) di Hotel Emersia, Kamis (18/11/2021).</p> <p>Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan, Birokrasi yang efisien dan efektif adalah sebuah keniscayaan. Fungsional perencana sebagai bagian dari birokrasi harus dapat menjawab tantangan dimaksud. Perencana harus adaptif dan responsif terhadap perubahan yang cepat menggunakan kemampuan analisis yang komprehensif dalam membuat rekomendasi kebijakan yang akan diimplementasikan dalam proses penyusunan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>Untuk itu seorang Perencana harus terus berupaya meningkatkan kompetensinya. Jabatan Fungsional Perencana yang merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian, haruslah memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial serta kompetensi sosiokultural. Peningkatan kompetensi dilakukan dengan pelatihan teknis dan pelatihan penjurangan untuk setiap kenaikan jabatan.</p> <p>"Bimtek ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pusbindiklatren Bappenas dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusdiklatren Bappenas RI yang telah berkenan hadir di Bumi Lampung, untuk memberikan arahan lebih lanjut," ujar Kepala Bappeda.</p> <p>"Sebagai penutup dari sambutan singkat ini, saya mengharapkan Kerjasama yang berkesinambungan dengan Pusbindiklatren Bappenas RI selaku Pembina Jabatan Fungsional Perencana dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme jabatan fungsional perencana di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, yang perlu segera diwujudkan dalam mendukung tugas dan peran lembaga perencana kedepannya. Demikian sambutan dan arahan yang dapat saya sampaikan, semoga segala upaya kita untuk mewujudkan ASN BER-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) di Provinsi Lampung mendapat Ridho Allah SWT dan menjadi amal ibadah bagi kita semua." tambahnya.</p> <p>Kegiatan ini menghadirkan 4 narasumber yaitu Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, Kapusdiklatren Bappenas Guspika, Fungsional Ahli Madya Kemenkes Andrayanto, Fungsional Ahli Utama Bappenas Randy R Wrihatnolo.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
9	21 November 2021	<p>Rakor dan Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan SK Pola Tanam Tahun 2021-2022</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-rakor-dan-pembentukan-tim-monitoring-pelaksanaan-sk-pola-tanam-tahun-20212022.html#ixzz7J8tz8lik</p>	 <p>Rakor dan Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan SK Pola Tanam Tahun 2021-2022</p> <p>Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan selaku Ketua Komisi Irigasi Provinsi Lampung membuka Rapat Koordinasi dan Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan SK Pola Tanam Tahun 2021-2022 di Grand Ballroom Hotel Horison, Senin (21/11/2021).</p> <p>"Dalam rangka upaya percepatan pematapan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 di Lampung, implementasi program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung di bidang pertanian telah memberikan dampak terhadap peningkatan harga gabah di Tingkat Petani yaitu pada Juni 2021 naik menjadi 13,72% dan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung pada Juni 2021 naik 0,92 % menjadi 100,80. Saat ini posisi produksi padi Provinsi Lampung berada pada posisi 2,7 juta ton GKG dan produksi padi ini akan digunakan untuk pasok nasional, terutama pasokan ke DKI Jakarta," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung dalam sambutannya.</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung Juga menyampaikan, Provinsi Lampung telah memiliki bendungan Way Sekampung yang diharapkan dapat menambah pembangunan daerah irigasi baru maupun peningkatan indeks pertanaman yang lebih baik, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan air untuk pelaksanaan pola tanam. "Hal ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa peran serta bersama dalam wadah koordinasi Komisi Irigasi," ujarnya.</p> <p>Rakor dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Besar Komisi Irigasi pada bulan September yang lalu ini, bertujuan agar diperolehnya satu laporan yang disepakati oleh seluruh anggota Komisi Irigasi Provinsi Lampung guna Sinergisitas dan Efektifitas implementasi SK Pola Tanam dalam rangka Rakyat Lampung Berjaya.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
10	22 November 2021	<p>Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-jabatan-pejabat-fungsional-di-lingkungan-bappeda-provinsi-lampung.html#ixzz7J8uqdvPi</p>	 <p>Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan melantik 8 Pejabat Fungsional Perencana di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung. Kegiatan yang dihadiri oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Perencana di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung ini, dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Senin (22/11/2021).</p> <p>Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional Perencana di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi dan kualitas kerja ASN, juga sekaligus mengisi kekosongan jabatan fungsional perencana sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.</p> <p>Pada kesempatan ini, Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang dilantik. Ia juga berharap kedepan seluruh tugas yang menjadi kewenangan Pejabat Fungsional Perencana di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung dapat dituntaskan sebaik-baiknya. Serta amanah jabatan yang dipercayakan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, penuh rasa tanggung jawab serta tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.</p> <p>"Jadilah pemimpin yang cerdas dan bekerja keras, jujur dalam tindakan dan ikhlas dalam pengabdian, sehingga akan mampu menunjukan dharma bhaktinya pada daerah, dan selalu siap menerima tugas dan tanggungjawab dari pemimpin," tambahnya.</p> <p>"Sebelum mengakhiri sambutan ini, ijinkan saya menyampaikan 2 pantun."</p> <p>"Kereta Raja Kereta Kencana, Dikawal Prajurit Gagah Perkasa, Selamat Kepada Pejabat Fungsional Perencana, Semoga Kinerja Semakin Luar Biasa."</p> <p>"Main Musik Pakai Irama, Putar Lagu sambil bergaya, Mari Sinergi Kerja Bersama, Demi Terwujud Lampung Berjaya."</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
11	22 November 2021	<p>Konsultasi Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus 2018-2023</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-konsultasi-rancangan-awal-perubahan-rpjud-kabupaten-tanggamus-20182023.html#ixzz7J8vezXu</p>	 <p>Konsultasi Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus 2018-2023</p> <p>Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan memimpin Konsultasi Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus 2018-2023 di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Senin (22/11/2021).</p> <p>Dalam paparannya, Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan, berdasarkan Surat Bupati Kabupaten Tanggamus nomor 050/5391/41/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Permohonan Konsultasi Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus 2018-2023 yang telah disertai kelengkapan dokumen yaitu Surat Permohonan Konsultasi dari Bupati Kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi; Rancangan awal RPJMD Kabupaten; Nota Kesepakatan Hasil Rancangan Awal RPJMD dengan DPRD; Formulir Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditandatangani Bupati; RPJMD Periode Sebelumnya atau yang akan direvisi; Form A, E, dan F. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan maka Konsultasi Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus 2018-2023 dapat dilaksanakan.</p> <p>“Melalui konsultasi ini diharapkan bisa mendapatkan masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus 2018-2023. Sehingga nantinya apa yang menjadi visi dan misi Kabupaten Tanggamus bisa terwujud,” ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p>Kepala Bappeda Kabupaten Tanggamus Hendra Wijaya, menyampaikan dasar pertimbangan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus 2018-2023 yaitu Pendekatan berdasarkan komposit pembentuk indikator utama; Restrukturisasi sasaran pembangunan dalam rangka efektivitas pencapaian Misi; Penyesuaian IKU sehingga indikator tersebut menjadi parameter yang lebih mewakili; IKU lebih komprehensif merepresentasikan Kinerja Kepala Daerah; IKU lebih representatif menjawab perkembangan kondisi saat ini.</p> <p>Kegiatan ini dihadiri oleh TIM Konsultasi RPJMD Kabupaten/Kota terdiri dari Bappeda Provinsi Lampung, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Inspektorat Bappeda Provinsi Lampung, Balitbang Provinsi Lampung.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
12	26 November 2021	<p>Musrenbang Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus 2018- 2023</p> <p>Sumber Berita: Musrenbang Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus 2018- 2023 (lampungprov.go.id)</p>	 <p>Musrenbang Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus 2018-2023</p> <p>Tanggamus – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menghadiri Musrenbang Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tanggamus 2018-2023 di Aula Utama Hotel 21 Kecamatan Gisting Tanggamus, Kamis (26/11/2021).</p> <p>Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Tanggamus Dewi Handajani ini bertujuan untuk menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan, sebagai pedoman untuk penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan penyusunan Rancangan APBD sampai dengan akhir periode RPJMD.</p> <p>Dalam paparannya Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menyampaikan, "Sektor Pertanian terbukti mampu bertahan pada masa Pandemi Covid-19 khususnya di Provinsi Lampung. Di tengah kontraksi ekonomi pada sebagian besar lapangan usaha, sektor pertanian mampu tetap tumbuh positif. Upaya yang kita lakukan selama ini mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat berupa Penghargaan Abdi Bakti Tani Tahun 2021 yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI untuk Lampung sebagai Peringkat 1 Nasional Kategori Provinsi dengan Peningkatan Produksi Padi Tahun 2019-2020," ujarnya.</p> <p>Struktur Ekonomi Kabupaten Tanggamus didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 42,51 %. Oleh karena itu Kepala Bappeda Provinsi Lampung berharap Kabupaten Tanggamus dalam pengembangan sektor pertanian agar fokus pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah. Selain itu juga, agar hillirisasi hasil pertanian guna meningkatkan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang dirasakan petani guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Terkait dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus 2018-2023, Kepala Bappeda Provinsi Lampung merekomendasikan Agar Struktur, Nomenklatur, Komponen serta Format Tabel dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus 2018-2023, disesuaikan dengan Permendagri 86/2017, Rumusan Bab I Latar Belakang, agar fokus pada Perubahan Yang Mendasar sebagai alasan dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus 2018-2023. Penyajian Tujuan dan Sasaran serta Target Indikator RPJMD lama dengan Perubahan RPJMD. Selaras dengan RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung, agar menambahkan pembahasan, kebijakan dan Indikaor kinerja terkait Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Keselarasan Target Indikator Pembangunan baik IKU maupun IKD dengan Provinsi Lampung dan Nasional, seperti penyesuaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indikator dan Target Kinerja Persampahan dll. Agar menambahkan Tabel Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Tanggamus terhadap Prioritas Nasional dan 33 Agenda Kerja Utama Provinsi Lampung. Penambahan Kebijakan One Data dan One Map Policy (Kebijakan Satu Data dan Kebijakan Satu Peta (KSP) sebagaimana UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan turunannya.</p> <p>"Mengingat nilai strategis Perubahan RPJMD dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Tanggamus hingga Tahun 2023, agar masukan/saran/rekomendasi Tim Konsultasi tersebut dapat ditindaklanjuti untuk kesempurnaan Dokumen RPJMD," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Bappelitbang Tanggamus, Para Asisten, OPD, Sekretaris Dewan Kabupaten Tanggamus, Forkopimda, Ketua TP PKK Tanggamus, Ketua Dekranasda, Camat se-Tanggamus dan Para Kakan melalui Virtual Meeting Se kabupaten Tanggamus.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
13	29 November 2021	<p>FGD Analisis Capaian Indikator Makro Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-fgd-analisis-capaian-indikator-makro-pembangunan-perekonomian-provinsi-lampung.html#ixzz7KAUAa356</p>	 <p>FGD Analisis Capaian Indikator Makro Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung – Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Analisis Capaian Indikator Makro Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Nilai Tukar Petani. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Rapat Alimudin Umar Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Senin (29/11/2021).</p> <p>FGD yang menghadirkan 4 narasumber sekaligus yaitu Kepala BPS Provinsi Lampung, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Endang Retno S; Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu; Akademisi Fakultas Pertanian Unila, Teguh Endaryanto; Akademisi FEB Unila, Ambya. Dimoderatori oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Provinsi Lampung, Bobby Irawan dan dihadiri oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, serta OPD terkait.</p> <p>Kegiatan ini membahas terkait Analisis Capaian Indikator Makro Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Nilai Tukar Petani. Strategi Penurunan Pengangguran di Provinsi Lampung. Strategi Peningkatan Capaian Indikator Makro Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung. Dan Analisis dan Strategi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.</p>

**LAPORAN RILIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
DESEMBER 2021**

Laporan Rilis Bappeda Provinsi Lampung

Desember 2021

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
1	2 Desember 2021	<p>Kepala Bappeda Sebagai Narasumber Pada Seminar Nasional Pemulihan Pasca Bencana</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-kepala-bappeda-sebagai-narasumber-pada-seminar-nasional-pemulihan-pasca-bencana.html#ixzz7KAVkhFa6</p>	 <p>Kepala Bappeda Sebagai Narasumber Pada Seminar Nasional Pemulihan Pasca Bencana</p> <p>Bandar Lampung- Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan sebagai narasumber pada Seminar Nasional Pemulihan Pasca Bencana dengan tema "Sinergi Pentahelix untuk Mewujudkan Ketangguhan Bencana" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung di Novotel Hotel, Kamis (2/12/2021).</p> <p>Kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yaitu Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB RI Andi Eviana, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB RI.</p> <p>Dalam paparannya Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan terkait "Dukungan Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Optimalisasi Sinergi Pentahelix Guna Mewujudkan Ketangguhan Bencana," terdiri dari Gambaran Umum Kebencanaan Provinsi Lampung; Integrasi, Sinergi, dan Sinkronisasi Kebijakan; Optimalisasi Sinergi Pentahelix dalam Mewujudkan Ketangguhan bencana.</p> <p>"Di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Penanggulangan Bencana masuk ke dalam Prioritas Nasional No. 6 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yang kemudian menjadi acuan dalam Perda Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Dengan Visi "Rakyat Lampung Berjaya", Penanggulangan Bencana masuk ke dalam Misi ke-6 yaitu Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama. Adapun indikator RPJMD adalah Indeks Resiko Bencana dengan sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p>Mengingat terdapatnya perkembangan kebijakan nasional (termasuk kebijakan pembangunan rendah karbon) dan sejumlah Proyek Prioritas Strategis Nasional berlokasi di Provinsi Lampung serta adanya pandemic Covid-19 yang berdampak terhadap indikator makro pembangunan Provinsi Lampung, maka Pemerintah Provinsi Lampung menyusun Rancangan Perda Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan penyesuaian sejumlah Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah.</p> <p>Namun, dengan adanya Perubahan RPJMD Provinsi Lampung, maka terdapat pula perubahan strategi dan arah kebijakan guna mencapai visi Rakyat Lampung Berjaya. Strategi Penanggulangan Bencana yang terdapat di dalam draft Renstra Perubahan BPBD Provinsi Lampung bernuansa inklusif dengan partisipatori masyarakat yaitu Meningkatkan Ketangguhan Daerah Dalam Mengatasi Bencana Alam Berbasis Peran Serta Masyarakat.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
	2 Desember 2021	<p>Kepala Bappeda Sebagai Narasumber Pada Seminar Nasional Pemulihan Pasca Bencana</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-kepala-bappeda-sebagai-narasumber-pada-seminar-nasional-pemulihan-pasca-bencana.html#ixzz7KAVkhFa6</p>	<p>"Terkait Konsep Pentahelix dalam Penanggulangan Bencana dan Strategi Sinergi Pentahelix dalam Pemulihan Pasca Bencana. Sebagaimana arahan Presiden, Pentahelix adalah Pendekatan Kolaboratif dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang memuat Skema pembagian peran dan pelaku multipihak, antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media. Dengan kata lain, Pentahelix adalah kolaborasi aturan, anggaran, jaringan sumber daya manusia, keilmuan, dan data informasi untuk terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. Terlebih dengan peningkatan jenis dan kuantitas ancaman bencana di Dunia dan Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung," jelas Kepala Bappeda.</p> <p>Pendekatan pentahelix memprioritaskan penggunaan konteks lokal, kearifan lokal, sumber daya lokal sesuai semangat gotong royong dengan pendekatan ramah lingkungan berbasis ekosistem, salah satunya dengan melaksanakan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang dilakukan melalui sejumlah strategi yakni pelibatan seluruh lapisan masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, pengurangan kerentanan, peningkatan kapasitas, peningkatan pengetahuan dan kesadaran, pemaduan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan, serta dukungan pemerintah. Perlu adanya sistem informasi digital yang dapat menampilkan peran multipihak dalam penguatan di desa/kelurahan.</p> <p>"Penanganan bencana bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah semata namun menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing berdasarkan kapasitasnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam kerangka pembangunan Nasional atau RPJMN dan sudah tentu dalam kerangka pembangunan daerah (RPJMD dan RTRWP). Sehingga, Perlu adanya Peningkatan peran para pihak termasuk Non-Pemerintah, baik dalam hal pendanaan maupun pembinaan masyarakat. Peran penataan ruang berbasis resiko bencana menjadi sangat penting terutama dalam hal mitigasi bencana. Oleh karena itu diperlukan penataan lokasi pada Kawasan rawan bencana melalui percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau Peraturan Zonasi yang berbasis pengurangan resiko Bencana, serta upaya pemberdayaan ekonomi pada masyarakat terdampak bencana," tambah Kepala Bappeda.</p>
2	6 Desember 2021	<p>FGD Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, UMKM dan Ekonomi Kreatif dalam rangka mendukung pembangunan BHC</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-fgd-pengembangan-pariwisata-berbasis-pemberdayaan-masyarakat-umkm-dan-ekonomi-kreatif-dalam-rangka-mendukung-pembangunan-bhc.html#ixzz7KAWWDSzB</p>	 <p>FGD Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, UMKM dan Ekonomi Kreatif dalam rangka mendukung pembangunan BHC</p> <p>Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan ini diselenggarakan di Novotel Hotel, Senin (6/12/2021), dan dihadiri oleh Pejabat Lingkup Perencana (Bappeda), Lingkup Pariwisata (Perangkat Daerah Lingkup Pariwisata), serta Lingkup UMKM (Perangkat Daerah Lingkup Koperasi dan UMKM).</p> <p>Kegiatan yang juga dimoderatori oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Provinsi Lampung Bobby Irawan ini, menghadirkan Empat Narasumber sekaligus yaitu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, PT. ASDP Indonesia Ferry, Perwakilan Bank Mandiri, dan KadIn Lampung.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
3	7 Desember 2021	<p>Rapat Monitoring dan Evaluasi Smart Village Provinsi Lampung</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-rapat-monitoring-dan-evaluasi-smart-village-provinsi-lampung.html#ixzz7KAXU9NsE</p>	 <p>Rapat Monitoring dan Evaluasi Smart Village Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung – Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Eka Yuslita Dewi memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Smart Village Provinsi Lampung di Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (7/12/2021).</p> <p>Rapat yang bertujuan untuk mengetahui laporan dari Tim Ahli dan Tim Smart Village Provinsi Lampung terkait progress Desa Smart Village Provinsi Lampung ini, diikuti oleh diikuti oleh BPKAD Provinsi Lampung, Tim Ahli Smart Village, Dinas PMDT Provinsi Lampung, dan Pejabat Fungsional Bappeda Lampung.</p> <p>Pada kesempatan ini Tim Ahli Smart Village dan Dinas PMDT Provinsi Lampung menyampaikan progress terhadap 130 Desa Smart Village, dari 130 desa tersebut semuanya sudah terinput di aplikasi. Terkait tata kelola pemerintahan sudah berada diatas rata-rata, dan pola pemberdayaan sudah efektif. Selain itu, terdapat kendala adanya blank spot dilapangan yaitu sulitnya akses internet dan sinyal yang lemah.</p> <p>Selanjutnya, di tahun 2022 akan lebih melibatkan masing-masing Pemerintah Kabupaten, dengan membuat tim koordinasi kabupaten yang melibatkan semua OPD.</p> <hr/> <p>👤 Administrator Selasa 07 Desember 2021 - 17:36:48 #bappeda #pemerintah #perencanaan</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
4	14 Desember 2021	<p>Pembahasan Sasaran, Indikator, Target dan Road Map Program KPB di Provinsi Lampung</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-pembahasan-sasaran-indikator-target-dan-road-map-program-kpb-di-provinsi-lampung.html#ixzz7KAY0FdTe</p>	 <p>Pembahasan Sasaran, Indikator, Target dan Road Map Program KPB di Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung-Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan Pembahasan Sasaran, Indikator, Target dan Road Map Program Kartu Petani Berjaya (KPB) di Provinsi Lampung. Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung ini, diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (14/12/2021).</p> <p>Kegiatan dalam rangka upaya percepatan pembangunan pertanian melalui Program Kartu Petani Berjaya di Provinsi Lampung, dan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung ini, dihadiri oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Tim KPB Universitas Bandar Lampung, Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung, serta OPD terkait.</p>
5	21 Desember 2021	<p>Rapat Pembahasan Kuota PBI JKN Tahun 2022 Provinsi Lampung</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-rapat-pembahasan-kuota-pbi-jkn-tahun-2022-provinsi-lampung.html#ixzz7KAYn2xid</p>	 <p>Rapat Pembahasan Kuota PBI JKN Tahun 2022 Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung-Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan membuka Rapat Pembahasan Kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2022 Provinsi Lampung. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dan luring di Ruang Rapat Alimudin Umar, Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (21/12/2021).</p> <p>"Kegiatan ini dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat untuk mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya sesuai dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Dengan adanya kerjasama pemerintah dengan BPJS diharapkan adanya jaminan dan peningkatan terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p> <p>Kegiatan yang juga dimoderatori oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung Eka Yuslita Dewi ini dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi, serta OPD terkait.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
6	27 Desember 2021	<p>Laporan Penyampaian Refleksi Akhir Tahun 2021 Oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung</p> <p>Sumber Berita: http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-laporan-penyampaian-refleksi-akhir-tahun-2021-oleh-kepala-bappeda-provinsi-lampung.html#ixzz7KAZt8FuI</p>	 <p>Laporan Penyampaian Refleksi Akhir Tahun 2021 Oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung</p> <p>Bandar Lampung- Laporan Penyampaian Refleksi Akhir Tahun Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2021 oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Mahan Agung, Senin (27/12/2021).</p> <p>Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan dalam laporannya menyampaikan, Refleksi Akhir Tahun merupakan penjabaran evaluasi umum terhadap kinerja pembangunan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan 4 pilar pembangunan, yakni pembangunan Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, Pilar Hukum dan Pemerintahan, Pilar Lingkungan serta prioritas pembangunan infrastruktur sebagai dukungan utama pilar pembangunan.</p> <p>Selanjutnya, Refleksi Akhir Tahun sebagai Feedback untuk mengintegrasikan, mensinkronkan serta mensinergikan langkah dan upaya pembangunan Lampung kedepan sebagai implementasi janji kerja guna mencapai Visi Rakyat Lampung Berjaya. Serta sebagai upaya membangun ekspektasi positif masyarakat Lampung dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan terhadap penyelenggaraan pembangunan kedepan atas refleksi capaian pembangunan tahun 2021.</p> <p>"Tujuan penyampaian Refleksi Akhir Tahun 2021 adalah untuk menyampaikan informasi atas penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Memperkuat sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui kerangka regulasi dan anggaran pembangunan kedepan. Dan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terpadu mulai dari perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.</p>

No	Tanggal/ Bulan	Judul	Rilis
		RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022	 <p data-bbox="639 911 1497 977">Refleksi Akhir Tahun Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2021</p> <p data-bbox="639 1003 1513 1193">Bandar Lampung - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2021 (Senin, 27/12/2021) menyampaikan, penyelenggaraan pembangunan daerah selama kurun waktu tahun 2021, masih dihadapkan pada tantangan dalam penanggulangan Covid-19. Upaya yang terus kita lakukan, bersinergi dengan Kebijakan Pemerintah Pusat serta mobilisasi langkah dan dukungan seluruh masyarakat Lampung, Pemda Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, juga peran serta Forkopimda, dunia usaha, Perguruan tinggi dan Organisasi Profesi serta Organisasi kemasyarakatan, menunjukkan keberhasilannya di dua bulan terakhir tahun 2021.</p> <p data-bbox="639 1224 1513 1385">Meskipun dihadapkan pada tantangan dalam penanggulangan Covid-19, kinerja pembangunan Pilar Ekonomi Provinsi Lampung tetap baik. Hal ini ditandai dengan indikator pertumbuhan ekonomi Lampung yang terus semakin membaik, sampai dengan Semester 1 Tahun 2021 ekonomi Lampung tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2020 yang tumbuh negatif 1,67%. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II mencapai kondisi tertinggi sebesar 6,82% diatas capaian Nasional. Serta inflasi yang tetap terkendali pada rentang 3±1. Juga ditandai dengan Nilai Tukar Petani yang mulai membaik pada bulan November 2021 sebesar 105,25.</p> <p data-bbox="639 1422 1513 1657">Kinerja pertumbuhan ekonomi Lampung tersebut didorong oleh beberapa faktor, yaitu Sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang terus berkinerja positif seperti produksi komoditas Kopi Lampung yang mencapai 115 ribu ton pada tahun 2021. Semakin membaiknya sektor pariwisata diwujudkan dengan telah dilakukannya Groundbreaking Bakauheni Harbour City oleh Wakil Menteri BUMN sebagai Proyek Strategis Nasional. Selain itu juga memprioritaskan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan UKM center di beberapa lokasi. Nilai ekspor Provinsi Lampung triwulan III-2021 mencapai 1.320,73 juta US\$ atau meningkat 29,27% dibandingkan triwulan II-2021 yang mencapai 1.021,72 juta US\$. Sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2020 yang mencapai 768,08 juta US\$, nilai ekspor Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar 71,95%.</p> <p data-bbox="639 1688 1513 1763">Penghargaan lain yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam pembangunan pilar ekonomi adalah sebagai Gubernur terbaik yang mensupport program Pertashop dari PT. Pertamina dan penghargaan Pembinaan Produktivitas Pramakarya 2021 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.</p>

**REKAP DATA COVID-19 PROVINSI LAMPUNG
JANUARI-JUNI 2021**

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung
Januari 2021

TGL	KABUPATEN / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONVIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	TOTAL	KASUS BARU	TOTAL	KONFIRMASI	KONFIRMASI
04-Jan	PROVINSI	34	227	0	54	62	6629	5044	357
05-Jan	PROVINSI	41	237	1	55	84	6713	5141	359
06-Jan	PROVINSI	41	238	1	55	87	6798	5201	364
07-Jan	PROVINSI	57	219	2	57	92	6890	5266	366
08-Jan	PROVINSI	58	270	2	57	122	7012	5311	375
09-Jan	PROVINSI	58	289	1	58	119	7131	5373	377
10-Jan	PROVINSI	40	279	0	59	97	7228	5410	382
11-Jan	PROVINSI	17	242	3	62	135	7363	5467	383
12-Jan	PROVINSI	23	236	1	63	190	7553	5533	396
13-Jan	PROVINSI	146	207	1	63	108	7661	5651	407
14-Jan	PROVINSI	42	331	3	66	84	7745	5723	412
15-Jan	PROVINSI	56	327	1	66	166	7911	5798	422
16-Jan	PROVINSI	92	342	0	65	114	8025	5875	429
17-Jan	PROVINSI	58	335	0	65	118	8143	5906	433
18-Jan	PROVINSI	42	373	4	68	85	8228	5943	444
19-Jan	PROVINSI	54	316	2	69	124	8352	6102	449
20-Jan	PROVINSI	55	302	4	71	174	8526	6186	453
21-Jan	PROVINSI	49	292	1	72	128	8654	6246	456
22-Jan	PROVINSI	37	285	2	73	120	8774	6301	470
23-Jan	PROVINSI	40	281	2	73	145	8919	6382	475
24-Jan	PROVINSI	29	265	2	75	165	9084	6459	478
25-Jan	PROVINSI	14	248	2	77	108	9192	6594	486
26-Jan	PROVINSI	51	209	2	79	126	9318	6662	492
27-Jan	PROVINSI	26	229	1	80	148	9466	6749	495
28-Jan	PROVINSI	49	232	1	80	118	9584	6921	498
29-Jan	PROVINSI	34	227	1	81	146	9730	7066	505
30-Jan	PROVINSI	31	238	0	81	145	9875	7193	512
31-Jan	PROVINSI	15	225	1	81	134	10009	7386	521

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung
Februari 2021

TGL	KABUPATEN / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONVIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	TOTAL	JUMLAH	TOTAL	KONFIRMASI	KONFIRMASI
01-Feb	PROVINSI	27	196	2	83	147	10156	7655	530
02-Feb	PROVINSI	30	189	1	84	165	10321	7800	535
03-Feb	PROVINSI	35	218	0	78	124	10445	7946	547
04-Feb	PROVINSI	40	210	2	80	98	10543	8092	553
05-Feb	PROVINSI	26	239	0	79	114	10657	8204	558
06-Feb	PROVINSI	30	219	0	79	115	10772	8319	562
07-Feb	PROVINSI	29	173	5	84	114	10886	8427	565
08-Feb	PROVINSI	17	177	1	85	61	10947	8544	571
09-Feb	PROVINSI	54	182	0	85	98	11045	8797	576
10-Feb	PROVINSI	34	204	4	84	106	11151	8927	585
11-Feb	PROVINSI	71	237	2	84	66	11217	9048	594
12-Feb	PROVINSI	30	244	0	83	76	11293	9151	596
13-Feb	PROVINSI	25	239	1	84	75	11368	9253	599
14-Feb	PROVINSI	19	235	2	86	89	11457	9350	601
15-Feb	PROVINSI	18	220	0	86	68	11525	9486	603
16-Feb	PROVINSI	60	186	2	88	78	11603	9757	605
17-Feb	PROVINSI	48	197	2	88	75	11678	9910	607
18-Feb	PROVINSI	37	234	1	88	67	11745	10023	610
19-Feb	PROVINSI	42	229	0	88	79	11824	10091	612
20-Feb	PROVINSI	30	201	0	88	98	11922	10195	617
21-Feb	PROVINSI	25	225	0	88	73	11995	10296	623
22-Feb	PROVINSI	27	212	0	88	92	12087	10405	625
23-Feb	PROVINSI	33	209	0	88	94	12181	10531	628
24-Feb	PROVINSI	60	211	0	87	68	12249	10624	630
25-Feb	PROVINSI	35	261	0	87	68	12317	10710	636
26-Feb	PROVINSI	37	254	0	87	68	12385	10819	638
27-Feb	PROVINSI	30	233	0	87	82	12467	10872	642
28-Feb	PROVINSI	35	235	0	83	68	12535	10939	648

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung
Maret 2021

TGL	KABUPATEN / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONVIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	TOTAL	JUMLAH	TOTAL	KONFIRMASI	KONFIRMASI
01-Mar	PROVINSI	22	242	0	83	73	12608	11006	654
02-Mar	PROVINSI								
03-Mar	PROVINSI								
04-Mar	PROVINSI								
05-Mar	PROVINSI								
06-Mar	PROVINSI	46	243	1	85	41	12859	11333	670
07-Mar	PROVINSI	31	238	0	85	48	12907	11384	671
08-Mar	PROVINSI	14	179	0	85	53	12960	11463	672
09-Mar	PROVINSI	43	168	0	85	60	13020	11528	674
10-Mar	PROVINSI	38	171	1	79	58	13078	11691	677
11-Mar	PROVINSI	23	181	0	79	46	13124	11731	685
12-Mar	PROVINSI	15	168	0	79	42	13166	11810	688
13-Mar	PROVINSI	29	159	1	80	43	13209	11851	691
14-Mar	PROVINSI	27	156	0	80	48	13257	11881	694
15-Mar	PROVINSI	11	151	0	80	47	13304	11918	698
16-Mar	PROVINSI	35	137	2	84	43	13347	11966	703
17-Mar	PROVINSI	51	160	0	84	41	13388	12032	709
18-Mar	PROVINSI	52	196	1	85	37	13425	12095	714
19-Mar	PROVINSI	20	208	0	85	40	13465	12170	716
20-Mar	PROVINSI	43	168	0	83	54	13519	12199	725
21-Mar	PROVINSI	9	159	0	83	58	13577	12234	731
22-Mar	PROVINSI	6	137	1	83	36	13613	12275	734
23-Mar	PROVINSI								
24-Mar	PROVINSI	28	123	0	83	51	13701	12354	738
25-Mar	PROVINSI	28	142	0	83	51	13752	12416	739
26-Mar	PROVINSI	37	157	1	84	43	13795	12474	744
27-Mar	PROVINSI	43	173	0	84	48	13843	12527	749
28-Mar	PROVINSI	27	204	2	86	35	13878	12568	749
29-Mar	PROVINSI	6	185	1	86	61	13939	12614	752
30-Mar	PROVINSI	55	169	0	86	51	13990	12697	756
31-Mar	PROVINSI	38	182	0	85	29	14019	12749	759

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung
April 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONVIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	JMLH	JMLH	TOTAL	KONFIRMASI	TOTAL
01-Apr	PROVINSI	29	225	1	86	43	14062	12788	760
02-Apr	PROVINSI	47	203	1	86	72	14134	12825	766
03-Apr	PROVINSI	19	152	1	82	44	14178	12886	769
04-Apr	PROVINSI	35	163	0	82	28	14206	12912	771
05-Apr	PROVINSI	15	165	0	82	28	14234	12958	774
06-Apr	PROVINSI	33	159	0	82	38	14272	12997	774
07-Apr	PROVINSI	42	173	1	84	44	14316	13075	779
08-Apr	PROVINSI	47	158	1	85	39	14355	13130	782
09-Apr	PROVINSI	19	173	0	85	49	14404	13157	786
10-Apr	PROVINSI	55	184	0	85	54	14458	13186	788
11-Apr	PROVINSI	24	215	0	85	52	14510	13242	790
12-Apr	PROVINSI	25	203	1	86	68	14578	13287	791
13-Apr	PROVINSI	44	181	0	86	79	14657	13342	795
14-Apr	PROVINSI	39	212	0	86	58	14715	13388	803
15-Apr	PROVINSI	26	179	0	86	48	14763	13418	810
16-Apr	PROVINSI	56	202	0	86	67	14830	13446	812
17-Apr	PROVINSI	41	238	3	89	70	14900	13478	814
18-Apr	PROVINSI	31	227	2	88	88	14988	13540	822
19-Apr	PROVINSI	28	223	0	86	91	15079	13594	826
20-Apr	PROVINSI	60	189	1	87	107	15186	13656	831
21-Apr	PROVINSI	71	229	0	87	88	15274	13707	833
22-Apr	PROVINSI	57	232	0	87	63	15337	13747	836
23-Apr	PROVINSI	33	248	1	88	80	15417	13776	842
24-Apr	PROVINSI	65	233	3	91	68	15485	13820	845
25-Apr	PROVINSI	31	187	1	92	81	15566	13881	846
26-Apr	PROVINSI	35	202	3	95	67	15633	13911	851
27-Apr	PROVINSI	34	239	4	96	69	15702	14038	853
28-Apr	PROVINSI	82	237	4	100	115	15817	14107	855
29-Apr	PROVINSI	40	300	1	100	97	15914	14181	859
30-Apr	PROVINSI	68	297	2	102	61	15975	14271	863

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung
Mei 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KOMVIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	JMLH	TOTAL	KONFIRMASI		
01-Mei	PROVINSI	80	296	1	103	66	16041	14344	865
02-Mei	PROVINSI	30	321	0	103	75	16116	14386	867
03-Mei	PROVINSI	19	296	0	103	95	16211	14480	868
04-Mei	PROVINSI	35	241	0	103	52	16263	14537	875
05-Mei	PROVINSI	73	225	1	103	77	16340	14644	880
06-Mei	PROVINSI	39	263	0	94	67	16407	14713	883
07-Mei	PROVINSI	28	246	2	96	53	16460	14772	892
08-Mei	PROVINSI	48	245	0	96	77	16537	14878	898
09-Mei	PROVINSI	33	242	0	96	54	16591	14974	905
10-Mei	PROVINSI	19	228	0	96	44	16635	15050	908
11-Mei	PROVINSI	56	215	0	96	85	16720	15141	913
12-Mei	PROVINSI	30	229	0	96	88	16808	15194	919
13-Mei	PROVINSI	26	240	0	96	49	16857	15237	925
14-Mei	PROVINSI	3	255	0	96	29	16886	15274	928
15-Mei	PROVINSI	24	239	1	97	65	16951	15347	929
16-Mei	PROVINSI	49	253	0	97	58	17009	15400	935
17-Mei	PROVINSI	25	264	0	97	60	17069	15436	939
18-Mei	PROVINSI	34	271	0	97	55	17124	15467	944
19-Mei	PROVINSI	50	167	1	98	64	17188	15517	948
20-Mei	PROVINSI	55	212	1	101	69	17257	15558	951
21-Mei	PROVINSI	57	218	2	103	86	17343	15656	955
22-Mei	PROVINSI	43	270	2	104	70	17413	15727	965
23-Mei	PROVINSI	13	262	0	103	104	17517	15786	968
24-Mei	PROVINSI	22	214	0	103	94	17611	15817	969
25-Mei	PROVINSI	27	188	0	103	84	17695	15890	973
26-Mei	PROVINSI	51	169	0	103	75	17770	15936	978
27-Mei	PROVINSI	17	200	0	103	56	17826	16023	983
28-Mei	PROVINSI	39	186	0	103	85	17911	16079	984
29-Mei	PROVINSI	33	192	0	103	98	18009	16148	989
30-Mei	PROVINSI	27	192	0	103	89	18098	16232	997
31-Mei	PROVINSI	13	215	0	103	99	18197	16283	1002

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung
Juni 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONVIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	JMLH	JMLH	TOTAL	KONFIRMASI	
01-Jun	PROVINSI	33	201	2	104	97	18294	16408	1015
02-Jun	PROVINSI	16	200	0	104	90	18384	16456	1022
03-Jun	PROVINSI	38	198	2	106	100	18484	16518	1027
04-Jun	PROVINSI	17	203	1	106	74	18558	16592	1033
05-Jun	PROVINSI	39	198	1	106	83	18641	16653	1041
06-Jun	PROVINSI	22	218	0	106	94	18735	16719	1043
07-Jun	PROVINSI	22	216	3	108	119	18854	16786	1047
08-Jun	PROVINSI	20	177	0	108	103	18957	16893	1055
09-Jun	PROVINSI	35	153	4	112	112	19069	16950	1065
10-Jun	PROVINSI	25	174	0	111	97	19166	17007	1072
11-Jun	PROVINSI	27	175	1	112	89	19255	17075	1080
12-Jun	PROVINSI	45	157	3	114	96	19351	17159	1084
13-Jun	PROVINSI	32	203	1	113	113	19464	17253	1090
14-Jun	PROVINSI	17	187	2	113	128	19592	17361	1091
15-Jun	PROVINSI	60	185	2	114	109	19701	17427	1095
16-Jun	PROVINSI	55	208	2	115	62	19763	17506	1096
17-Jun	PROVINSI	73	247	2	116	92	19855	17606	1100
18-Jun	PROVINSI	44	267	3	118	88	19943	17719	1101
19-Jun	PROVINSI	61	246	1	117	117	20060	17777	1108
20-Jun	PROVINSI	48	248	3	119	141	20201	17954	1114
21-Jun	PROVINSI	35	237	1	119	119	20320	18006	1121
22-Jun	PROVINSI	26	228	3	120	72	20392	18100	1127
23-Jun	PROVINSI	81	236	0	119	142	20534	18171	1134
24-Jun	PROVINSI	38	264	2	121	121	20655	18249	1139
25-Jun	PROVINSI	64	277	1	122	153	20808	18321	1145
26-Jun	PROVINSI	77	317	2	124	148	20956	18393	1148
27-Jun	PROVINSI	85	369	5	129	235	21191	18487	1159
28-Jun	PROVINSI	39	396	6	132	159	21350	18544	1169
29-Jun	PROVINSI	81	398	6	138	125	21475	18606	1178
30-Jun	PROVINSI	87	447	3	141	197	21672	18746	1197

**REKAP DATA COVID-19 PROVINSI LAMPUNG
JULI-DESEMBER 2021**

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung

Juli 2021

TGL	KABUPATEN / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONFIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	TOTAL	KASUS BARU	TOTAL	KONFIRMASI	KONFIRMASI
01-Jul	PROVINSI	75	468	4	145	206	21878	18864	1203
02-Jul	PROVINSI	197	445	2	147	285	22163	19073	1215
03-Jul	PROVINSI	186	608	9	154	286	22449	19283	1224
04-Jul	PROVINSI	40	719	11	161	281	22730	19417	1241
05-Jul	PROVINSI	64	700	9	170	306	23036	19540	1259
06-Jul	PROVINSI	110	719	12	180	266	23302	19680	1273
07-Jul	PROVINSI	209	712	14	191	320	23622	19757	1290
08-Jul	PROVINSI	58	786	4	197	373	23995	19882	1307
09-Jul	PROVINSI	193	760	9	205	383	24378	20062	1326
10-Jul	PROVINSI	192	807	8	209	336	24714	20208	1357
11-Jul	PROVINSI	117	866	14	222	326	25040	20397	1377
12-Jul	PROVINSI	101	871	11	233	430	25470	20574	1400
13-Jul	PROVINSI	100	862	9	238	325	25795	20799	1422
14-Jul	PROVINSI	141	936	10	249	320	26115	20987	1456
15-Jul	PROVINSI	166	953	5	254	349	26464	21160	1484
16-Jul	PROVINSI	127	1054	8	262	420	26884	21426	1508
17-Jul	PROVINSI	147	879	3	265	448	27332	21750	1530
18-Jul	PROVINSI	60	930	8	273	677	28009	21945	1556
19-Jul	PROVINSI	54	852	6	273	650	28659	22231	1595
20-Jul	PROVINSI	100	870	12	292	419	29078	22421	1634
21-Jul	PROVINSI	57	857	31	327	441	29519	22783	1670
22-Jul	PROVINSI	129	835	13	317	424	29943	23019	1708
23-Jul	PROVINSI	81	843	13	328	445	30388	23463	1743
24-Jul	PROVINSI	177	839	10	336	499	30887	23830	1780
25-Jul	PROVINSI	86	910	12	346	399	31286	24196	1821
26-Jul	PROVINSI	41	902	9	353	449	31735	24429	1856
27-Jul	PROVINSI	94	819	8	354	581	32316	24776	1908
28-Jul	PROVINSI	173	861	6	358	517	32833	25182	1951
29-Jul	PROVINSI	138	855	7	364	687	33520	25504	2017
30-Jul	PROVINSI	153	839	9	370	569	34089	25814	2076
31-Jul	PROVINSI	107	943	7	376	678	34767	26393	2135

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung
Agustus 2021

TGL	KABUPATEN /	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONFIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
	KOTA	BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	TOTAL	KASUS BARU	TOTAL	KONFIRMASI	KONFIRMASI
01-Aug	PROVINSI	113	905	0	373	581	35348	26980	2231
02-Aug	PROVINSI	59	963	8	381	472	35820	27375	2295
03-Aug	PROVINSI	120	1028	7	388	599	36419	27804	2352
04-Aug	PROVINSI	142	1001	0	381	717	37136	28171	2422
05-Aug	PROVINSI	108	1050	7	388	680	37816	28521	2474
06-Aug	PROVINSI	94	987	6	393	696	38512	28978	2549
07-Aug	PROVINSI	97	875	2	395	437	38949	29628	2603
08-Aug	PROVINSI	88	800	0	395	497	39446	30058	2665
09-Aug	PROVINSI	67	743	3	398	367	39813	30462	2705
10-Aug	PROVINSI	111	676	1	399	494	40307	31291	2757
11-Aug	PROVINSI	122	692	2	403	430	40737	31832	2823
12-Aug	PROVINSI	101	701	0	378	372	41109	32389	2887
13-Aug	PROVINSI	64	707	0	378	467	41576	32861	2933
14-Aug	PROVINSI	149	538	0	378	468	42044	33392	2999
15-Aug	PROVINSI	70	608	0	378	382	42426	33818	3052
16-Aug	PROVINSI	68	549	0	372	375	42801	34206	3098
17-Aug	PROVINSI	117	558	0	371	367	43168	34729	3146
18-Aug	PROVINSI	28	595	0	371	229	43397	35127	3180
19-Aug	PROVINSI	78	533	0	371	375	43772	35568	3209
20-Aug	PROVINSI	118	564	0	371	371	44143	36088	3255
21-Aug	PROVINSI	102	563	0	371	319	44462	36553	3299
22-Aug	PROVINSI	53	520	0	371	243	44705	36860	3325
23-Aug	PROVINSI	40	555	0	371	250	44955	37215	3363
24-Aug	PROVINSI	96	498	0	371	229	45184	37622	3388
25-Aug	PROVINSI	69	211	0	371	289	45473	37844	3425
26-Aug	PROVINSI	65	201	0	371	204	45677	38170	3447
27-Aug	PROVINSI	43	214	0	371	226	45903	38533	3471
28-Aug	PROVINSI	76	186	0	371	248	46151	38818	3495
29-Aug	PROVINSI	41	178	0	371	163	46314	39139	3519
30-Aug	PROVINSI	34	194	0	371	117	46431	39362	3535
31-Aug	PROVINSI	52	201	0	371	243	46674	39675	3566

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung

September 2021

TGL	KABUPATE N / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONFIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	TOTAL	KASUS BARU	TOTAL	KONFIRMASI	KONFIRMASI
01-Sep	PROVINSI	34	209	0	371	179	46853	39932	3583
02-Sep	PROVINSI	35	214	0	371	149	47002	40101	3595
03-Sep	PROVINSI	21	230	0	371	119	47121	40317	3608
04-Sep	PROVINSI	45	173	0	371	111	47232	40526	3618
05-Sep	PROVINSI	51	192	0	371	136	47368	40705	3629
06-Sep	PROVINSI	29	201	0	371	130	47498	40895	3647
07-Sep	PROVINSI	51	204	0	371	107	47605	41080	3655
08-Sep	PROVINSI	32	186	0	371	121	47726	41301	3660
09-Sep	PROVINSI	36	193	0	371	130	47856	41494	3668
10-Sep	PROVINSI	116	169	0	371	100	47956	41597	3678
11-Sep	PROVINSI	24	156	0	371	92	48048	41755	3686
12-Sep	PROVINSI	36	148	0	371	65	48113	41878	3693
13-Sep	PROVINSI	315	155	0	371	69	48182	42020	3700
14-Sep	PROVINSI	27	153	0	371	80	48262	42160	3707
15-Sep	PROVINSI	28	99	0	369	73	48335	42230	3713
16-Sep	PROVINSI	25	96	0	369	71	48406	42309	3721
17-Sep	PROVINSI	29	94	0	369	63	48469	42449	3727
18-Sep	PROVINSI	38	87	0	369	75	48544	42546	3734
19-Sep	PROVINSI	29	93	0	369	54	48598	42653	3739
20-Sep	PROVINSI	21	98	0	369	46	48644	42724	3744
21-Sep	PROVINSI	17	92	0	369	57	48701	42841	3746
22-Sep	PROVINSI	8	105	0	369	48	48749	42952	3747
23-Sep	PROVINSI	6	104	0	369	52	48801	43029	3749
24-Sep	PROVINSI	7	89	0	369	43	48844	43111	3752
25-Sep	PROVINSI	8	88	0	369	37	48881	43171	3756
26-Sep	PROVINSI	9	79	1	370	51	48932	43246	3761
27-Sep	PROVINSI	4	82	1	370	27	48959	43304	3763
28-Sep	PROVINSI	6	59	1	370	35	48994	43387	3764
29-Sep	PROVINSI	7	60	0	369	39	49033	43445	3770
30-Sep	PROVINSI	2	60	0	369	31	49064	43491	3774

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung

Oktober 2021

TGL	KABUPATEN / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONFIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	TOTAL	KASUS BARU	TOTAL	KONFIRMASI	KONFIRMASI
01-Oct	PROVINSI	9	60	0	369	40	49104	43532	3777
02-Oct	PROVINSI	4	59	0	369	33	49137	43577	3780
03-Oct	PROVINSI	6	62	0	369	25	49162	43806	3786
04-Oct	PROVINSI	1	60	0	369	19	49181	44328	3784
05-Oct	PROVINSI	16	61	0	369	39	49220	44634	3786
06-Oct	PROVINSI	12	73	0	369	24	49244	44674	3787
07-Oct	PROVINSI	3	79	0	369	32	49276	44707	3788
08-Oct	PROVINSI	8	83	0	369	28	49304	44791	3790
09-Oct	PROVINSI	6	77	0	369	22	49326	44828	3792
10-Oct	PROVINSI	1	74	0	369	15	49341	44848	3794
11-Oct	PROVINSI	2	79	0	369	14	49355	44866	3794
12-Oct	PROVINSI	3	81	0	369	24	49379	44884	3796
13-Oct	PROVINSI	5	79	0	369	25	49404	44898	3797
14-Oct	PROVINSI	3	79	0	369	16	49420	44924	3798
15-Oct	PROVINSI	2	77	0	369	19	49439	44947	3801
16-Oct	PROVINSI	4	70	0	369	10	49449	44957	3805
17-Oct	PROVINSI	2	67	0	369	15	49464	44976	3807
18-Oct	PROVINSI	3	66	0	369	12	49476	44994	3808
19-Oct	PROVINSI	5	68	0	369	10	49486	45010	3809
20-Oct	PROVINSI	4	67	0	369	10	49496	45029	3810
21-Oct	PROVINSI	3	62	0	369	3	49499	45045	3810
22-Oct	PROVINSI	2	64	0	369	5	49504	45063	3810
23-Oct	PROVINSI	0	65	0	369	10	49514	45079	3810
24-Oct	PROVINSI	0	65	0	369	1	49515	45088	3811
25-Oct	PROVINSI	0	65	0	369	2	49517	45108	3811
26-Oct	PROVINSI	2	67	0	369	11	49528	45130	3811
27-Oct	PROVINSI	2	67	0	369	13	49541	45142	3811
28-Oct	PROVINSI	3	65	0	369	14	49555	45161	3811
29-Oct	PROVINSI	1	64	0	369	11	49566	45237	3811
30-Oct	PROVINSI	3	65	0	369	6	49572	45246	3811
31-Oct	PROVINSI	1	64	0	369	4	49576	45248	3811

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung

November 2021

TGL	KABUPATEN / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONFIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	TOTAL	KASUS BARU	TOTAL	KONFIRMASI	KONFIRMASI
01-Nov	PROVINSI	1	65	0	369	1	49577	45252	3813
02-Nov	PROVINSI	0	66	0	369	12	49589	45258	3814
03-Nov	PROVINSI	1	64	0	369	2	49591	45263	3814
04-Nov	PROVINSI	0	65	0	369	2	49593	45311	3814
05-Nov	PROVINSI	0	65	0	369	3	49596	45315	3814
06-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	1	49597	45317	3814
07-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	2	49599	45331	3814
08-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	2	49601	45345	3814
09-Nov	PROVINSI	0	3	0	369	5	49606	45359	3815
10-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	2	49608	45365	3816
11-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	3	49611	45381	3816
12-Nov	PROVINSI	1	0	0	369	2	49613	45382	3816
13-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	6	49619	45384	3817
14-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	4	49623	45390	3818
15-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	0	49623	45391	3819
16-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	5	49628	45397	3820
17-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	2	49630	45400	3820
18-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	4	49634	45402	3820
19-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	1	49635	45402	3820
20-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	7	49642	45404	3820
21-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	8	49650	45411	3820
22-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	1	49651	45414	3820
23-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	4	49655	45416	3821
24-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	0	49655	45418	3822
25-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	3	49658	45423	3823
26-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	1	49659	45433	3823
27-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	2	49661	45434	3823
28-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	4	49665	45437	3823
29-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	1	49666	45440	3823
30-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	7	49673	45447	3824

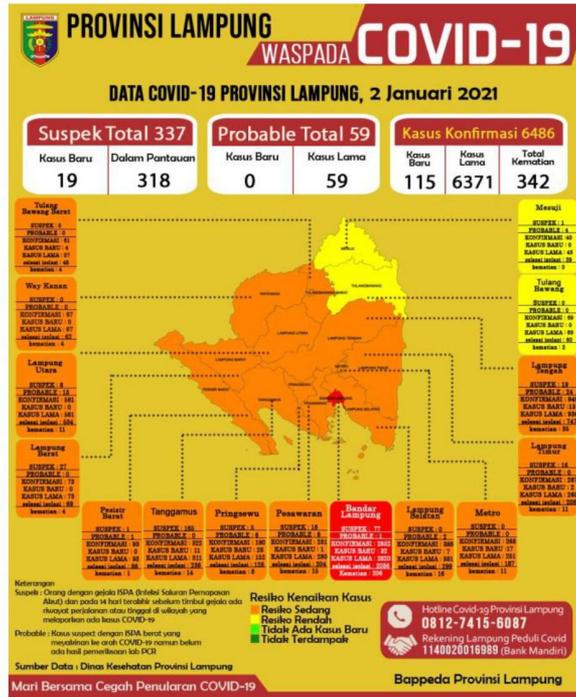
Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung

Desember 2021

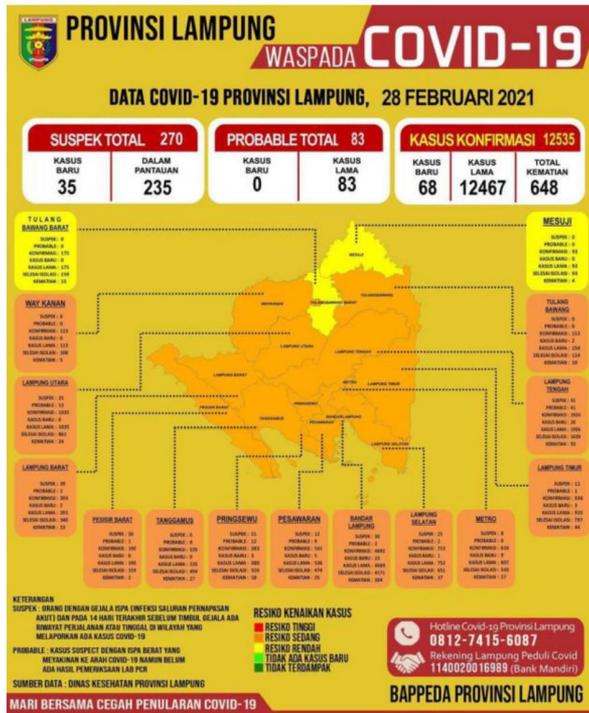
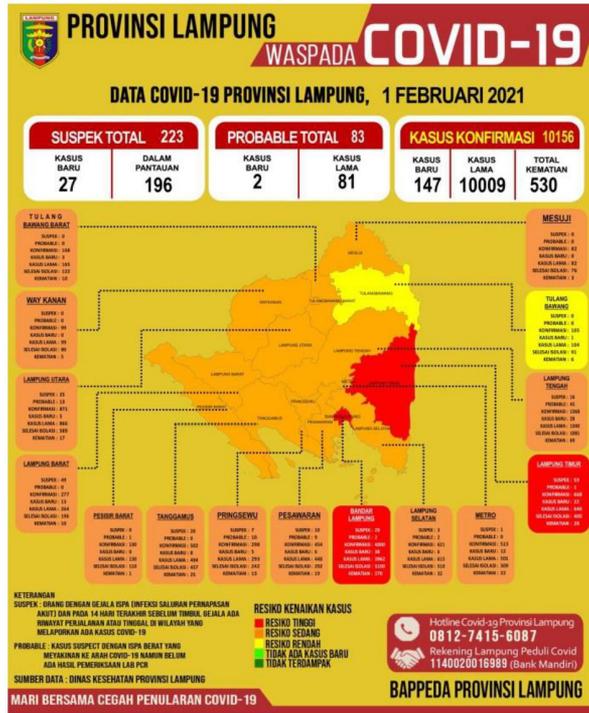
TGL	KABUPATEN / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONFIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	TOTAL	KASUS BARU	TOTAL	KONFIRMASI	KONFIRMASI
01-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	7	49680	45452	3824
02-Dec	PROVINSI	2	0	0	369	12	49692	45453	3824
03-Dec	PROVINSI	0	2	0	369	18	49710	45470	3825
04-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	2	49712	45471	3825
05-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49713	45471	3825
06-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49713	45474	3825
07-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49714	45476	3825
08-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49715	45476	3825
09-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49716	45477	3825
10-Dec	PROVINSI	7	0	0	369	0	49715	45487	3825
11-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49717	45488	3825
12-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	4	49721	45494	3825
13-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	3	49724	45495	3825
14-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49724	45496	3825
15-Dec	PROVINSI	3	0	0	369	3	49727	45498	3825
16-Dec	PROVINSI	3	0	0	369	1	49728	45498	3825
17-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49728	45503	3825
18-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49729	45505	3825
19-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	3	49732	45505	3825
20-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	3	49735	45506	3825
21-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49736	45508	3825
22-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49737	45512	3825
23-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49738	45513	3825
24-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49739	45515	3825
25-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	2	49741	45520	3825
26-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49741	45520	3825
27-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49741	45523	3825
28-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49741	45523	3825
29-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49741	45524	3825
30-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49741	45524	3825
31-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49741	45524	3825

PETA COVID-19 PROVINSI LAMPUNG
JANUARI-JUNI 2021

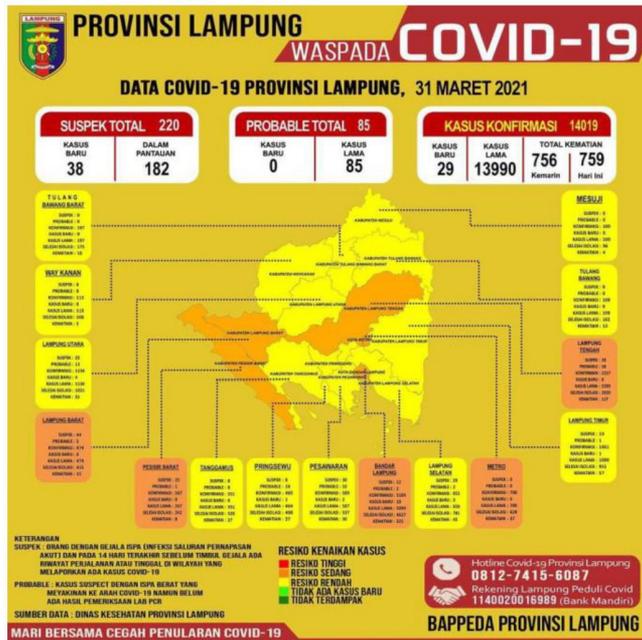
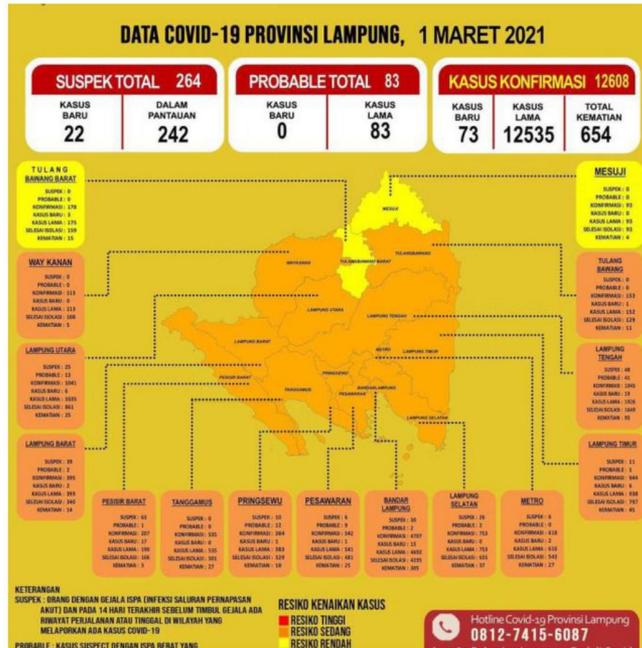
Peta Covid-19 Provinsi Lampung 2 & 31 Januari 2021



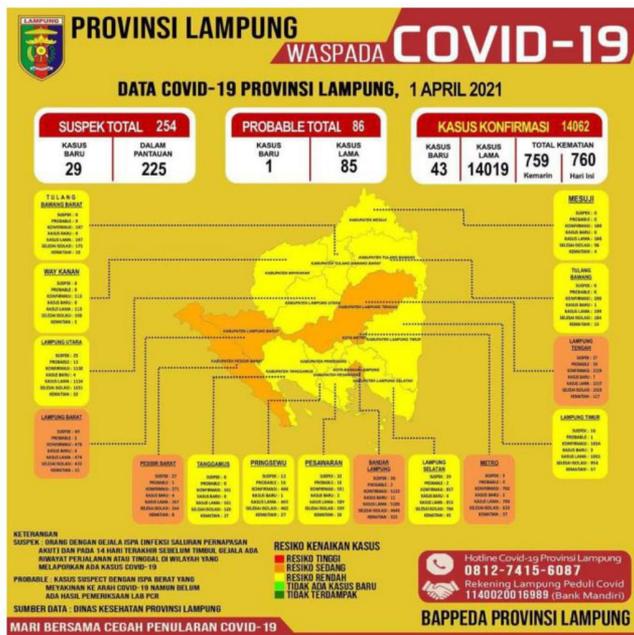
Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 28 Februari 2021



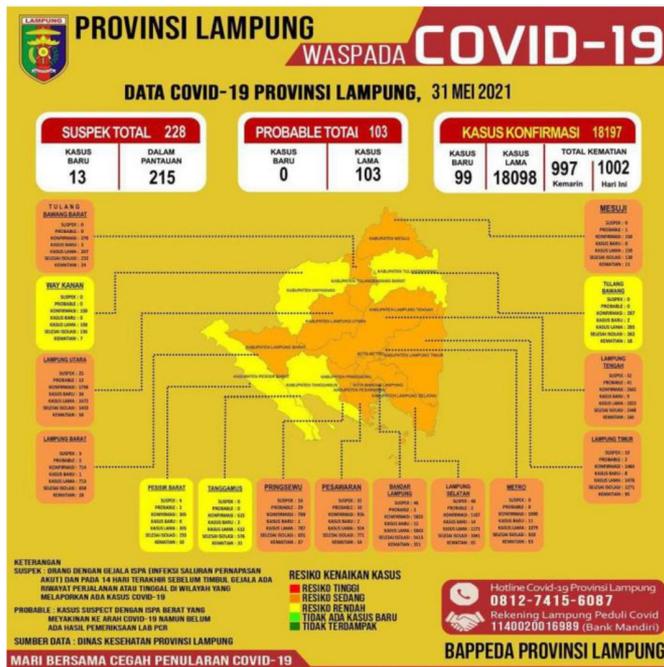
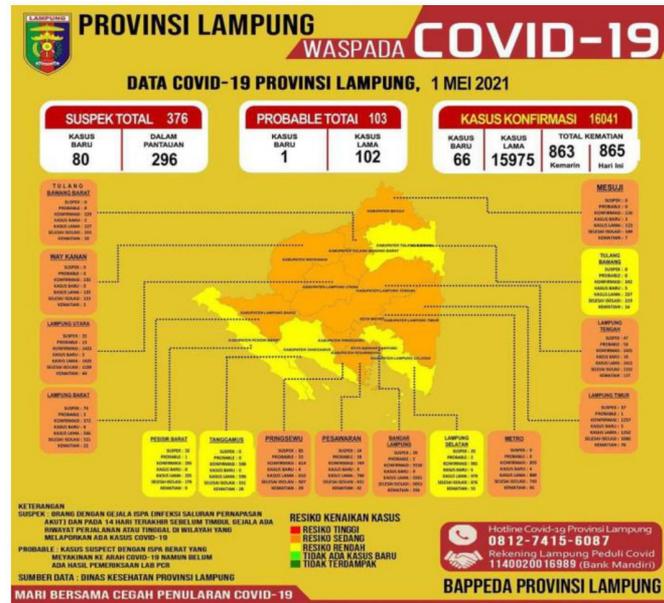
Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 31 Maret 2021



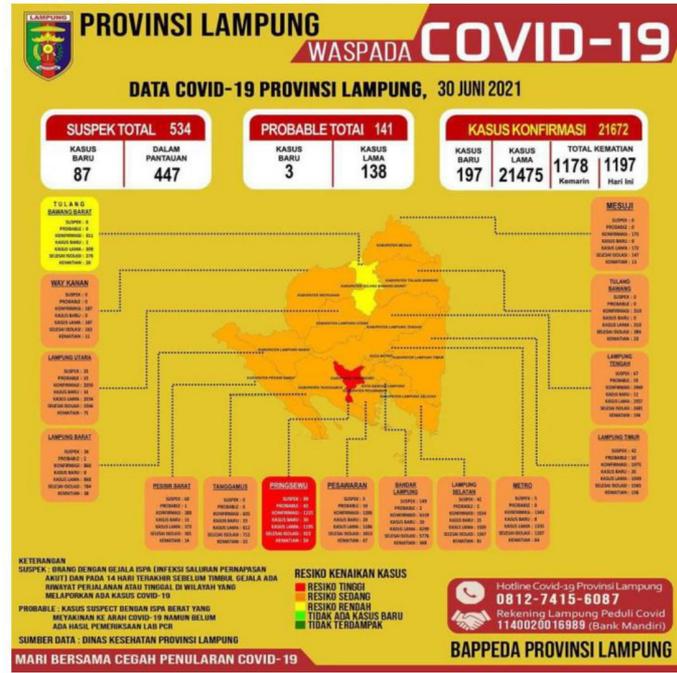
Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 30 April 2021



Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 31 Mei 2021



Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 30 Juni 2021



PETA COVID-19 PROVINSI LAMPUNG
JULI-DESEMBER 2021

Peta Covid-19 Provinsi Lampung 2 & 31 Juli 2021



Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 31 Agustus 2021



Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 30 September 2021



Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 30 Oktober 2021





Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 30 November 2021





Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 30 Desember 2021



PETA ZONASI RESIKO COVID-19

31 DESEMBER 2021



ZONA TERPAPAR COVID-19 PROVINSI LAMPUNG

ZONA MERAH

ZONA ORANGE

ZONA KUNING

- BANDAR LAMPUNG
- METRO
- LAMPUNG UTARA
- LAMPUNG SELATAN
- LAMPUNG TIMUR
- LAMPUNG TENGAH
- LAMPUNG BARAT
- PESISIR BARAT
- TULANG BAWANG BARAT
- TULANG BAWANG
- MESUJI
- TANGGAMUS
- PRINGSUWU
- PESAWARAN
- WAY KANAN

- RESIKO TINGGI
- RESIKO SEDANG
- RESIKO RENDAH
- TIDAK ADA KASUS BARU
- TIDAK TERDAMPAK

KASUS COVID-19 PROVINSI LAMPUNG



Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Hotline Covid-19 Provinsi Lampung
0812-7415-6087
Rekening Lampung Peduli Covid
1140020016989 (Bank Mandiri)

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung

Juli 2021

TGL	KABUPATEN / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONFIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	TOTAL	KASUS BARU	TOTAL	KONFIRMASI	KONFIRMASI
01-Jul	PROVINSI	75	468	4	145	206	21878	18864	1203
02-Jul	PROVINSI	197	445	2	147	285	22163	19073	1215
03-Jul	PROVINSI	186	608	9	154	286	22449	19283	1224
04-Jul	PROVINSI	40	719	11	161	281	22730	19417	1241
05-Jul	PROVINSI	64	700	9	170	306	23036	19540	1259
06-Jul	PROVINSI	110	719	12	180	266	23302	19680	1273
07-Jul	PROVINSI	209	712	14	191	320	23622	19757	1290
08-Jul	PROVINSI	58	786	4	197	373	23995	19882	1307
09-Jul	PROVINSI	193	760	9	205	383	24378	20062	1326
10-Jul	PROVINSI	192	807	8	209	336	24714	20208	1357
11-Jul	PROVINSI	117	866	14	222	326	25040	20397	1377
12-Jul	PROVINSI	101	871	11	233	430	25470	20574	1400
13-Jul	PROVINSI	100	862	9	238	325	25795	20799	1422
14-Jul	PROVINSI	141	936	10	249	320	26115	20987	1456
15-Jul	PROVINSI	166	953	5	254	349	26464	21160	1484
16-Jul	PROVINSI	127	1054	8	262	420	26884	21426	1508
17-Jul	PROVINSI	147	879	3	265	448	27332	21750	1530
18-Jul	PROVINSI	60	930	8	273	677	28009	21945	1556
19-Jul	PROVINSI	54	852	6	273	650	28659	22231	1595
20-Jul	PROVINSI	100	870	12	292	419	29078	22421	1634
21-Jul	PROVINSI	57	857	31	327	441	29519	22783	1670
22-Jul	PROVINSI	129	835	13	317	424	29943	23019	1708
23-Jul	PROVINSI	81	843	13	328	445	30388	23463	1743
24-Jul	PROVINSI	177	839	10	336	499	30887	23830	1780
25-Jul	PROVINSI	86	910	12	346	399	31286	24196	1821
26-Jul	PROVINSI	41	902	9	353	449	31735	24429	1856
27-Jul	PROVINSI	94	819	8	354	581	32316	24776	1908
28-Jul	PROVINSI	173	861	6	358	517	32833	25182	1951
29-Jul	PROVINSI	138	855	7	364	687	33520	25504	2017
30-Jul	PROVINSI	153	839	9	370	569	34089	25814	2076
31-Jul	PROVINSI	107	943	7	376	678	34767	26393	2135

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung
Agustus 2021

TGL	KABUPATEN /	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONFIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
	KOTA	BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	TOTAL	KASUS BARU	TOTAL	KONFIRMASI	KONFIRMASI
01-Aug	PROVINSI	113	905	0	373	581	35348	26980	2231
02-Aug	PROVINSI	59	963	8	381	472	35820	27375	2295
03-Aug	PROVINSI	120	1028	7	388	599	36419	27804	2352
04-Aug	PROVINSI	142	1001	0	381	717	37136	28171	2422
05-Aug	PROVINSI	108	1050	7	388	680	37816	28521	2474
06-Aug	PROVINSI	94	987	6	393	696	38512	28978	2549
07-Aug	PROVINSI	97	875	2	395	437	38949	29628	2603
08-Aug	PROVINSI	88	800	0	395	497	39446	30058	2665
09-Aug	PROVINSI	67	743	3	398	367	39813	30462	2705
10-Aug	PROVINSI	111	676	1	399	494	40307	31291	2757
11-Aug	PROVINSI	122	692	2	403	430	40737	31832	2823
12-Aug	PROVINSI	101	701	0	378	372	41109	32389	2887
13-Aug	PROVINSI	64	707	0	378	467	41576	32861	2933
14-Aug	PROVINSI	149	538	0	378	468	42044	33392	2999
15-Aug	PROVINSI	70	608	0	378	382	42426	33818	3052
16-Aug	PROVINSI	68	549	0	372	375	42801	34206	3098
17-Aug	PROVINSI	117	558	0	371	367	43168	34729	3146
18-Aug	PROVINSI	28	595	0	371	229	43397	35127	3180
19-Aug	PROVINSI	78	533	0	371	375	43772	35568	3209
20-Aug	PROVINSI	118	564	0	371	371	44143	36088	3255
21-Aug	PROVINSI	102	563	0	371	319	44462	36553	3299
22-Aug	PROVINSI	53	520	0	371	243	44705	36860	3325
23-Aug	PROVINSI	40	555	0	371	250	44955	37215	3363
24-Aug	PROVINSI	96	498	0	371	229	45184	37622	3388
25-Aug	PROVINSI	69	211	0	371	289	45473	37844	3425
26-Aug	PROVINSI	65	201	0	371	204	45677	38170	3447
27-Aug	PROVINSI	43	214	0	371	226	45903	38533	3471
28-Aug	PROVINSI	76	186	0	371	248	46151	38818	3495
29-Aug	PROVINSI	41	178	0	371	163	46314	39139	3519
30-Aug	PROVINSI	34	194	0	371	117	46431	39362	3535
31-Aug	PROVINSI	52	201	0	371	243	46674	39675	3566

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung

September 2021

TGL	KABUPATE N / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONFIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	TOTAL	KASUS BARU	TOTAL	KONFIRMASI	KONFIRMASI
01-Sep	PROVINSI	34	209	0	371	179	46853	39932	3583
02-Sep	PROVINSI	35	214	0	371	149	47002	40101	3595
03-Sep	PROVINSI	21	230	0	371	119	47121	40317	3608
04-Sep	PROVINSI	45	173	0	371	111	47232	40526	3618
05-Sep	PROVINSI	51	192	0	371	136	47368	40705	3629
06-Sep	PROVINSI	29	201	0	371	130	47498	40895	3647
07-Sep	PROVINSI	51	204	0	371	107	47605	41080	3655
08-Sep	PROVINSI	32	186	0	371	121	47726	41301	3660
09-Sep	PROVINSI	36	193	0	371	130	47856	41494	3668
10-Sep	PROVINSI	116	169	0	371	100	47956	41597	3678
11-Sep	PROVINSI	24	156	0	371	92	48048	41755	3686
12-Sep	PROVINSI	36	148	0	371	65	48113	41878	3693
13-Sep	PROVINSI	315	155	0	371	69	48182	42020	3700
14-Sep	PROVINSI	27	153	0	371	80	48262	42160	3707
15-Sep	PROVINSI	28	99	0	369	73	48335	42230	3713
16-Sep	PROVINSI	25	96	0	369	71	48406	42309	3721
17-Sep	PROVINSI	29	94	0	369	63	48469	42449	3727
18-Sep	PROVINSI	38	87	0	369	75	48544	42546	3734
19-Sep	PROVINSI	29	93	0	369	54	48598	42653	3739
20-Sep	PROVINSI	21	98	0	369	46	48644	42724	3744
21-Sep	PROVINSI	17	92	0	369	57	48701	42841	3746
22-Sep	PROVINSI	8	105	0	369	48	48749	42952	3747
23-Sep	PROVINSI	6	104	0	369	52	48801	43029	3749
24-Sep	PROVINSI	7	89	0	369	43	48844	43111	3752
25-Sep	PROVINSI	8	88	0	369	37	48881	43171	3756
26-Sep	PROVINSI	9	79	1	370	51	48932	43246	3761
27-Sep	PROVINSI	4	82	1	370	27	48959	43304	3763
28-Sep	PROVINSI	6	59	1	370	35	48994	43387	3764
29-Sep	PROVINSI	7	60	0	369	39	49033	43445	3770
30-Sep	PROVINSI	2	60	0	369	31	49064	43491	3774

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung

Oktober 2021

TGL	KABUPATEN / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONFIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	TOTAL	KASUS BARU	TOTAL	KONFIRMASI	KONFIRMASI
01-Oct	PROVINSI	9	60	0	369	40	49104	43532	3777
02-Oct	PROVINSI	4	59	0	369	33	49137	43577	3780
03-Oct	PROVINSI	6	62	0	369	25	49162	43806	3786
04-Oct	PROVINSI	1	60	0	369	19	49181	44328	3784
05-Oct	PROVINSI	16	61	0	369	39	49220	44634	3786
06-Oct	PROVINSI	12	73	0	369	24	49244	44674	3787
07-Oct	PROVINSI	3	79	0	369	32	49276	44707	3788
08-Oct	PROVINSI	8	83	0	369	28	49304	44791	3790
09-Oct	PROVINSI	6	77	0	369	22	49326	44828	3792
10-Oct	PROVINSI	1	74	0	369	15	49341	44848	3794
11-Oct	PROVINSI	2	79	0	369	14	49355	44866	3794
12-Oct	PROVINSI	3	81	0	369	24	49379	44884	3796
13-Oct	PROVINSI	5	79	0	369	25	49404	44898	3797
14-Oct	PROVINSI	3	79	0	369	16	49420	44924	3798
15-Oct	PROVINSI	2	77	0	369	19	49439	44947	3801
16-Oct	PROVINSI	4	70	0	369	10	49449	44957	3805
17-Oct	PROVINSI	2	67	0	369	15	49464	44976	3807
18-Oct	PROVINSI	3	66	0	369	12	49476	44994	3808
19-Oct	PROVINSI	5	68	0	369	10	49486	45010	3809
20-Oct	PROVINSI	4	67	0	369	10	49496	45029	3810
21-Oct	PROVINSI	3	62	0	369	3	49499	45045	3810
22-Oct	PROVINSI	2	64	0	369	5	49504	45063	3810
23-Oct	PROVINSI	0	65	0	369	10	49514	45079	3810
24-Oct	PROVINSI	0	65	0	369	1	49515	45088	3811
25-Oct	PROVINSI	0	65	0	369	2	49517	45108	3811
26-Oct	PROVINSI	2	67	0	369	11	49528	45130	3811
27-Oct	PROVINSI	2	67	0	369	13	49541	45142	3811
28-Oct	PROVINSI	3	65	0	369	14	49555	45161	3811
29-Oct	PROVINSI	1	64	0	369	11	49566	45237	3811
30-Oct	PROVINSI	3	65	0	369	6	49572	45246	3811
31-Oct	PROVINSI	1	64	0	369	4	49576	45248	3811

Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung

November 2021

TGL	KABUPATEN / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONFIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	TOTAL	KASUS BARU	TOTAL	KONFIRMASI	KONFIRMASI
01-Nov	PROVINSI	1	65	0	369	1	49577	45252	3813
02-Nov	PROVINSI	0	66	0	369	12	49589	45258	3814
03-Nov	PROVINSI	1	64	0	369	2	49591	45263	3814
04-Nov	PROVINSI	0	65	0	369	2	49593	45311	3814
05-Nov	PROVINSI	0	65	0	369	3	49596	45315	3814
06-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	1	49597	45317	3814
07-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	2	49599	45331	3814
08-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	2	49601	45345	3814
09-Nov	PROVINSI	0	3	0	369	5	49606	45359	3815
10-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	2	49608	45365	3816
11-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	3	49611	45381	3816
12-Nov	PROVINSI	1	0	0	369	2	49613	45382	3816
13-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	6	49619	45384	3817
14-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	4	49623	45390	3818
15-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	0	49623	45391	3819
16-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	5	49628	45397	3820
17-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	2	49630	45400	3820
18-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	4	49634	45402	3820
19-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	1	49635	45402	3820
20-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	7	49642	45404	3820
21-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	8	49650	45411	3820
22-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	1	49651	45414	3820
23-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	4	49655	45416	3821
24-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	0	49655	45418	3822
25-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	3	49658	45423	3823
26-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	1	49659	45433	3823
27-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	2	49661	45434	3823
28-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	4	49665	45437	3823
29-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	1	49666	45440	3823
30-Nov	PROVINSI	0	0	0	369	7	49673	45447	3824

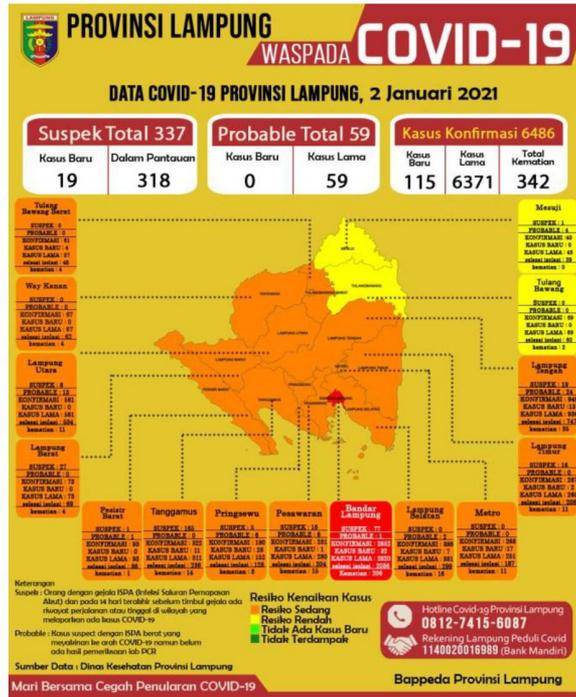
Data Terdampak Covid-19 Provinsi Lampung

Desember 2021

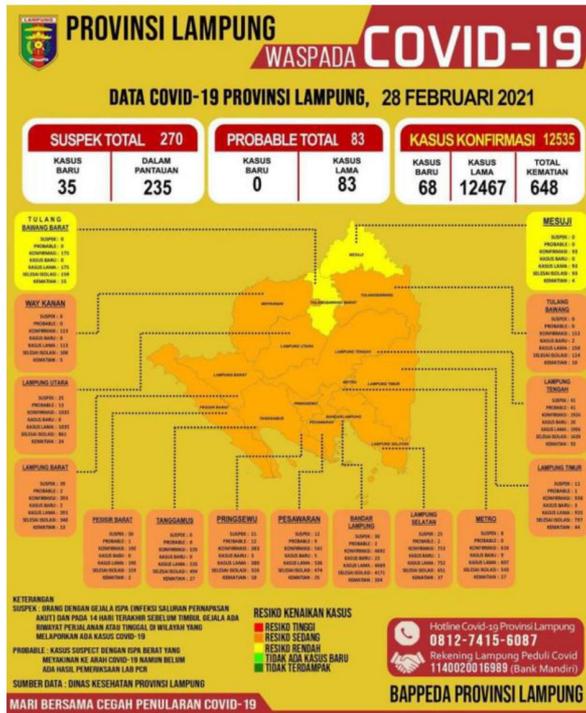
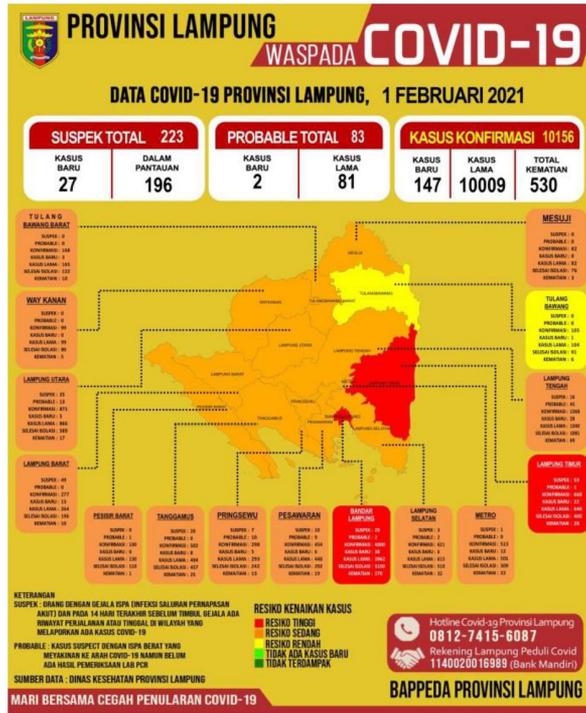
TGL	KABUPATEN / KOTA	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE		KASUS KONFIRMASI		SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
		BARU	DALAM PANTAUAN	BARU	TOTAL	KASUS BARU	TOTAL	KONFIRMASI	KONFIRMASI
01-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	7	49680	45452	3824
02-Dec	PROVINSI	2	0	0	369	12	49692	45453	3824
03-Dec	PROVINSI	0	2	0	369	18	49710	45470	3825
04-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	2	49712	45471	3825
05-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49713	45471	3825
06-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49713	45474	3825
07-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49714	45476	3825
08-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49715	45476	3825
09-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49716	45477	3825
10-Dec	PROVINSI	7	0	0	369	0	49715	45487	3825
11-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49717	45488	3825
12-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	4	49721	45494	3825
13-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	3	49724	45495	3825
14-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49724	45496	3825
15-Dec	PROVINSI	3	0	0	369	3	49727	45498	3825
16-Dec	PROVINSI	3	0	0	369	1	49728	45498	3825
17-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49728	45503	3825
18-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49729	45505	3825
19-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	3	49732	45505	3825
20-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	3	49735	45506	3825
21-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49736	45508	3825
22-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49737	45512	3825
23-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49738	45513	3825
24-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	1	49739	45515	3825
25-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	2	49741	45520	3825
26-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49741	45520	3825
27-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49741	45523	3825
28-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49741	45523	3825
29-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49741	45524	3825
30-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49741	45524	3825
31-Dec	PROVINSI	0	0	0	369	0	49741	45524	3825

PETA COVID-19 PROVINSI LAMPUNG
JANUARI-JUNI 2021

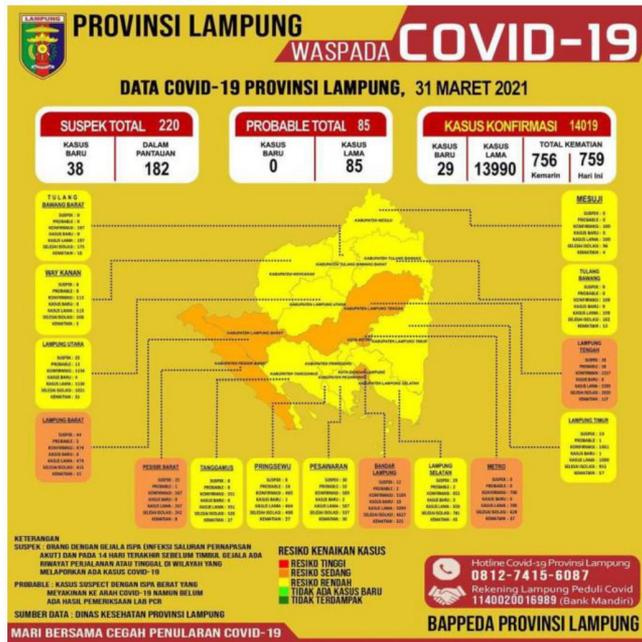
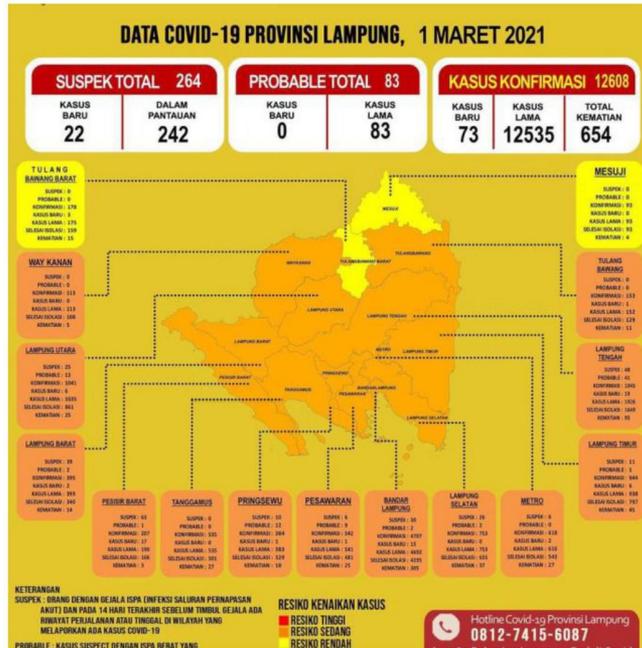
Peta Covid-19 Provinsi Lampung 2 & 31 Januari 2021



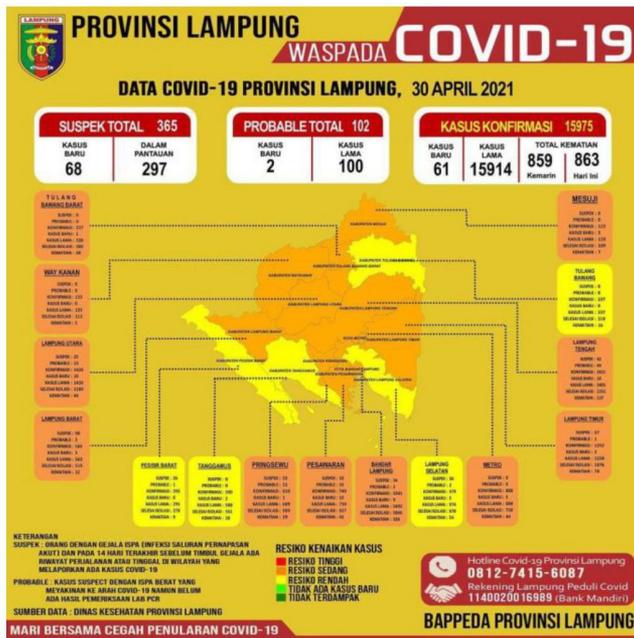
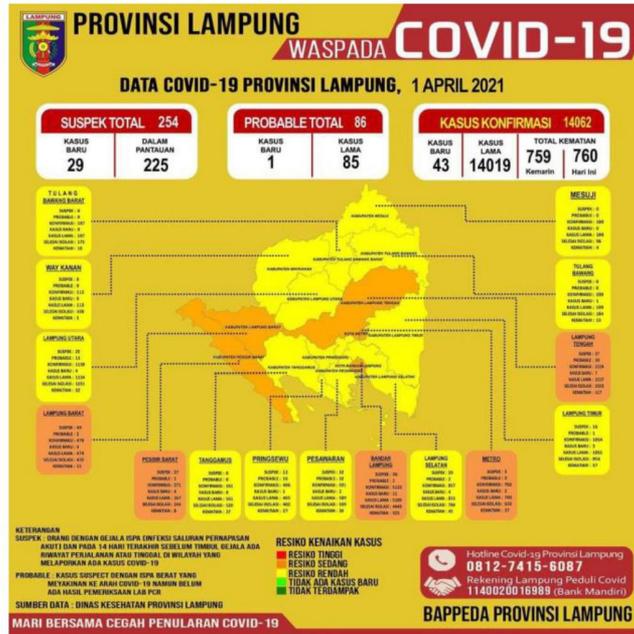
Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 28 Februari 2021



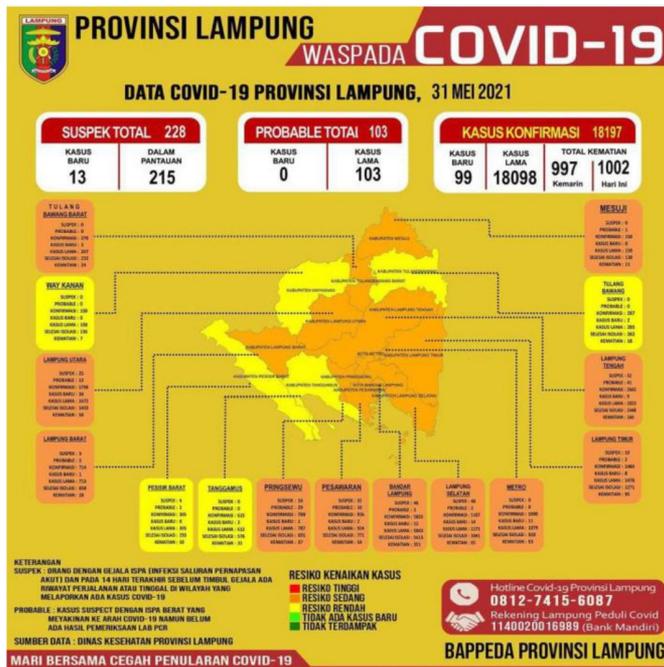
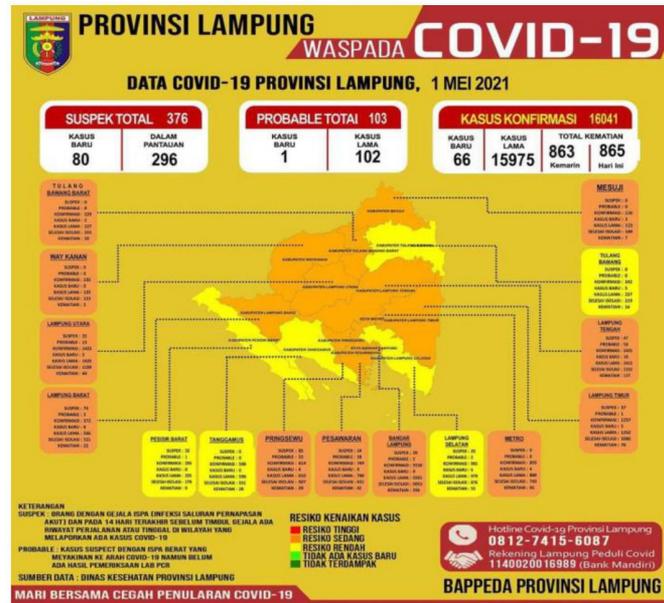
Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 31 Maret 2021



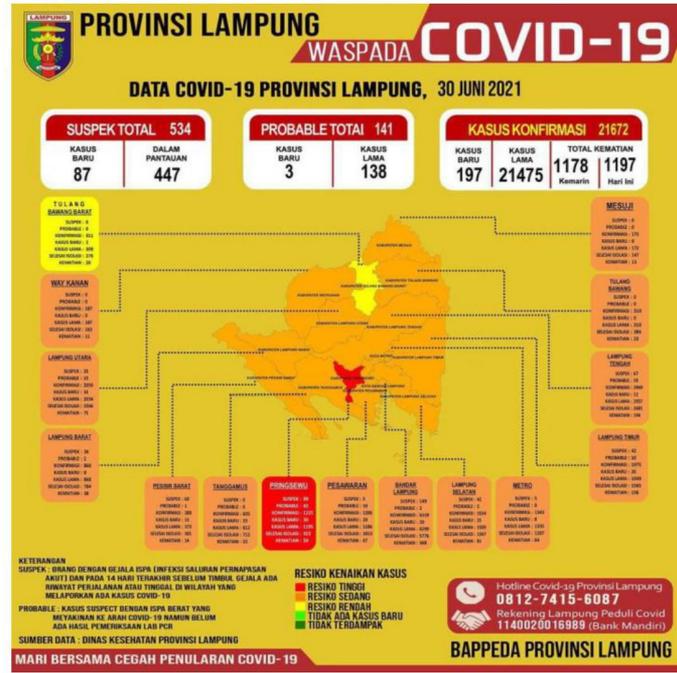
Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 30 April 2021



Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 31 Mei 2021



Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 30 Juni 2021



PETA COVID-19 PROVINSI LAMPUNG
JULI-DESEMBER 2021

Peta Covid-19 Provinsi Lampung 2 & 31 Juli 2021



Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 31 Agustus 2021



Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 30 September 2021



Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 30 Oktober 2021





Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 30 November 2021





Peta Covid-19 Provinsi Lampung 1 & 30 Desember 2021



PETA ZONASI RESIKO COVID-19

31 DESEMBER 2021



ZONA TERPAPAR COVID-19 PROVINSI LAMPUNG

ZONA MERAH

ZONA ORANGE

ZONA KUNING

- BANDAR LAMPUNG
- METRO
- LAMPUNG UTARA
- LAMPUNG SELATAN
- LAMPUNG TIMUR
- LAMPUNG TENGAH
- LAMPUNG BARAT
- PESISIR BARAT
- TULANG BAWANG BARAT
- TULANG BAWANG
- MESUJI
- TANGGAMUS
- PRINGSUWU
- PESAWARAN
- WAY KANAN

- RESIKO TINGGI
- RESIKO SEDANG
- RESIKO RENDAH
- TIDAK ADA KASUS BARU
- TIDAK TERDAMPAK

KASUS COVID-19 PROVINSI LAMPUNG



Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Hotline Covid-19 Provinsi Lampung
0812-7415-6087
Rekening Lampung Peduli Covid
1140020016989 (Bank Mandiri)

